

Bunga Rampai

Upaya Penyadaran
Gender,
Kesehatan dan
Lingkungan

Pengunting

BUDI UTOMO



Pusat Penelitian Kesehatan
Universitas Indonesia



FORD FOUNDATION

Jakarta, 2009

Judul**Bunga Rampai**

Upaya Penyadaran Gender, Kesehatan
dan Lingkungan

Penyunting:

Budi Utomo

Lay out dan Cover:

Martopo Waluyono

Fotografi:

Luluk Ishardini

Pertama kali diterbitkan di Jakarta
pada tahun 2009 oleh
Pusat Penelitian Kesehatan
Universitas Indonesia
Gedung G. Ruang 211
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kampus Baru UI, Depok
Jawa Barat 16424
Telp. (021) 727 0154, Fax. (021) 727 0153
E-mail: chrui@ui.edu

Hak cipta dilindungi. Semua isi buku ini dilarang
diproduksi ulang, disimpan dalam *retrieval*
system, atau dikirimkan dalam bentuk atau alat
apapun, elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman,
atau yang lain tanpa izin terlebih dahulu dari
Pusat Penelitian Kesehatan UI.

© 2009 Pusat Penelitian Kesehatan UI

ISBN: 978-979-8232-30-5

Terbitan Oktober 2009
Cetak di Indonesia

G-help

G-help (*Gender Health Environmental Linkages Program*) yang dimulai sejak Juni 2006 merupakan suatu wahana kolaborasi tukar pikir dan pengalaman organisasi-organisasi yang peduli dengan masalah gender, kesehatan dan lingkungan. Program yang dikoordinasi oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK UI) dan mendapatkan bantuan dana dari Ford Foundation ini melibatkan mitra 7 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang seksualitas dan kesehatan reproduksi dan 7 LSM lain yang bergerak di bidang lingkungan dan pembangunan masyarakat. Pada perkembangan lanjut program ini yang melibatkan juga organisasi lain dengan kepedulian yang sama merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses dan meluaskan cakupan pelayanan kesehatan reproduksi; menjamin hak-hak sumberdaya, keadilan dan penghidupan bagi komunitas terpinggirkan dan yang bergantung pada sumberdaya alam. Lebih spesifik, program bertujuan menjembatani hubungan dinamis antara masalah gender, kesehatan dan lingkungan dalam rangka mempercepat pencapaian pengurangan kemiskinan di Indonesia. Program diharapkan berkontribusi terhadap program pembangunan berkelanjutan dengan proses terukur dalam mencapai masyarakat yang sehat dan produktif di lingkungan sehat.



MITRA KERJA

YDA (Yayasan Duta Awam), Yayasan Fatayat NU, YHS (Yayasan Hotline Surabaya), HuMa (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), JAVLEC (Java Learning Center), KONPHALINDO (Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia), Yayasan KONSEPSI (Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi), Yayasan Rahima, Yayasan Rifka Annisa, GEF-SGP (Global Environment Facility-Small Grants Programme), Yayasan Talenta, KKI WARSI (Komunitas Konservasi Indonesia Warung Informasi Konservasi), YMA (Yayasan Mitra Aksi), dan YMTR (Yayasan Masyarakat Tertinggal Riau).

Tim G-help

Budi Utomo
Purwa Kurnia Sucahya
Dini Dachlia
Dian Sidik Arsyad
Luluk Ishardini
Dwiastuti Yunita Saputri
Nurul Huriah Astuti
Linda Widiyanti
Muhammad Arafat Patria



Kata Pengantar

Masalah gender, keterpurukan kesehatan dan kerusakan lingkungan saling mempengaruhi, tetapi penanganan terhadap masalah-masalah ini sering masih berjalan sendiri-sendiri. Penanganan masalah kesehatan sering kurang memperhatikan faktor lingkungan dan penanganan masalah lingkungan sering mengabaikan aspek kesehatan. Demikian pula masalah gender baik sebagai penyebab maupun sebagai konsekuensi masalah kesehatan dan masalah lingkungan belum terakomodasi optimal dalam program pembangunan kesehatan dan lingkungan.

Dengan latar-belakang di atas, *G-help (Gender, Health and Environmental Linkages Program)* yang dibentuk tahun 2006 telah memberikan fasilitasi kepada berbagai organisasi kemasyarakatan peduli kesehatan atau lingkungan untuk memasukkan wacana saling keterkaitan antara gender, kesehatan dan lingkungan dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program mereka. Sebagai refleksi pengaruh dan dampak fasilitasi tersebut, berikut disampaikan sekumpulan tulisan yang disiapkan oleh teman-teman dari organisasi kemasyarakatan dalam wahana G-help. Tulisan-tulisan ini mengangkat masalah ketidakadilan gender, keterpurukan kesehatan, dan/ atau kerusakan lingkungan, pengalaman dalam mengatasi masalah tersebut, dan kemudian bagaimana wacana saling keterkaitan gender, kesehatan dan lingkungan dimasukkan dalam pendekatan program-program mereka.

Ani Purwati dari Konphalindo berargumen betapa penting pemenuhan hak perempuan atas informasi lingkungan berkelanjutan. Dibanding laki-laki, perempuan karena peran sosial mereka lebih peka terhadap masalah lingkungan dan lebih rentan terhadap dampak

kesehatan dan sosial kerusakan lingkungan. Pemenuhan hak tersebut akan membuat perempuan lebih memahami peran mereka dan lebih berdaya mengoptimasi peran mereka dalam penyelamatan lingkungan.

Keterlibatan di wahana G-help membuat Farida Hanum dari Yayasan Hotline Surabaya semakin yakin mengenai pentingnya meningkatkan kemampuan menggunakan data dalam mengembangkan dan mengelola suatu program pembangunan, termasuk kesehatan. Dengan data, monitoring kemajuan dan evaluasi pencapaian program mereka dalam memberdayakan masyarakat di Desa Licin, Kabupaten Banyuwangi, menjadi lebih mudah dan lebih terukur.

Lenni Herawati dari Rifka Annisa Yogyakarta melaporkan pengalaman mereka bahwa efektivitas program peningkatan kesadaran gender akan meningkat apabila isu gender dan kekerasan terhadap perempuan dikaitkan langsung dengan isu yang lebih luas yang lebih mudah diterima masyarakat. Mengangkat isu kesehatan atau isu lingkungan lebih mudah diterima masyarakat ketimbang isu perempuan.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan miskin di desa kawasan hutan, Moh. Taquiuddin dari KONSEPSI Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa merubah tatanan sosial budaya untuk keadilan gender tidak mudah. Perlu waktu, tenaga dan pikiran yang tak sedikit, dari meluruskan pola pikir laki-laki untuk tidak menganggap remeh perempuan, hingga membangkitkan percaya diri perempuan itu sendiri.

Sebagai respon terhadap kenyataan masalah ketidakadilan gender di desa-desa pinggir hutan di DI Yogyakarta, Fachrudin Rijadi dari Javlec melaporkan bahwa kebijakan Javlec saat ini mensyaratkan kesetaraan gender dalam program kerja sama dengan mitra. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penerapan wacana saling keterkaitan gender, kesehatan dan lingkungan.

Ulfa HM dari Yayasan Mitra Aksi di Jambi menceritakan pengalaman mereka tentang upaya pemberdayaan perempuan dalam perbaikan kesehatan reproduksi. Mereka semakin yakin bahwa

penanganan masalah kesehatan reproduksi perlu memperhatikan pula masalah terkait lain, termasuk lingkungan dan sosial-budaya masyarakat.

Haleluya Giri Rahmasih dari Yayasan Duta Awam di Solo yang bergerak dalam pemberdayaan petani menyampaikan realitas peminggiran perempuan petani dalam pembangunan sektor pertanian di pedesaan. Walaupun bukan lembaga yang khusus menangani perempuan, kini YDA Solo berupaya melibatkan perempuan pada setiap aktivitas program.

Menurut Nur Achmad dari Rahima di Jakarta, salah satu faktor pelestari ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan adalah pemahaman agama yang bias. Agama masih sering dipahami dengan mengabaikan prinsip dasar kehadiran agama, seperti prinsip kesederajatan manusia, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan pembelaan terhadap mereka yang dilemahkan. Menyikapi ini, Rahima telah berijtihad untuk menguatkan hak-hak perempuan dan berupaya membangun kehidupan yang adil dan ramah bagi laki-laki dan perempuan melalui berbagai langkah dan media, salah satunya dengan penguatan ulama perempuan.

Bambang Teguh Karyanto dari Lembaga Studi Desa untuk Petani SD INPERS menulis pengalaman mereka dalam pemberdayaan perempuan melalui pengembangan biogas sebagai sumber energi alternatif. Biogas mempunyai manfaat tidak saja bagi peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga peningkatan peran sosial-ekonomi dan hak perempuan dan pelestarian lingkungan.

Sebagai pimpinan YMTR di Batam, drg. Sri Rupiaty melaporkan kegiatan program mereka dalam memberdayakan kesehatan reproduksi dan ekonomi masyarakat tempatan di Kepulauan Riau. Pelatihan analisis masalah dan pengembangan program yang mereka terima dari G-help telah menambah pemahaman dan keterampilan kader dan staf dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan program.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi upaya kita membangun yang lebih baik menuju masyarakat sehat yang produktif, berkeadilan gender dan sosial serta berwawasan pelestarian lingkungan. Atas nama tim dan mitra G-help, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bambang Wispriyono sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Sabarinah Prasetyo sebagai Kepala Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Dr. Meiwita Budiharsana sebagai penanggung jawab terdahulu program kesehatan reproduksi Ford Foundation, dan Dr. Ujjwal Pradhan sebagai penanggung jawab terdahulu program pembangunan masyarakat dan lingkungan Ford Foundation yang telah membantu dan mendukung kegiatan G-help.

Jakarta, Oktober 2009

Prof. Budi Utomo
Direktur Program



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Penyebaran Informasi Berbasis Gender: Memenuhi Hak Masyarakat akan Informasi Lingkungan Berkelanjutan oleh Ani Purwati	1-11
Pembelajaran G-help di YHS, Surabaya: Pemberdayaan Masyarakat di Desa Licin, Kabupaten Banyuwangi oleh Farida Hanum	13-24
Integrasi gender dalam program Jejaring Ford Foundation (JFF) oleh Lenni Herawati	25-33
Hutan Kemasyarakatan dan Perempuan oleh Moh. Taquiuddin	35-47
Kehutanan Masyarakat dan Kesetaraan Gender di Desa-Desa Pinggir Hutan oleh Fachrudin Rijadi	49-60
Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Desa di Jambi oleh Ulfa HM	61-67
Perempuan Petani: Entitas Terlupakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Petani di Solo oleh Haleluya Giri Rahmasih	69-77
Penguatan Ulama Perempuan untuk Penguatan Hak-hak Perempuan oleh Nur Achmad	79-93
Peran Perempuan Petani dalam Pemanfaatan Energi Alternatif (Biogas) sebagai Bagian Rehabilitasi Kawasan Hyang Argopuro oleh Bambang Teguh Karyanto	95-104

Dampak Pelatihan Analisis Masalah dan Pengembangan Program di YMTR, Batam oleh Sri Rupianti	105-113
---	---------

Lampiran Laporan Kegiatan Lokakarya Lapangan Desa Genggeling, Lombok Utara, NTB (22-27 Februari 2009) dan Desa Ngawu, Gunung Kidul, DI Yogyakarta (12-17 April 2009)	115-154
--	---------



Bunga Rampai

Upaya Penyadaran
Gender,
Kesehatan
dan Lingkungan

Penyebaran Informasi
Berbasis Gender:
Memenuhi Hak Masyarakat
akan Informasi Lingkungan
Berkelanjutan

Artikel 1

Penyebaran Informasi Berbasis Gender: Memenuhi Hak Masyarakat akan Informasi Lingkungan Berkelanjutan

ANI PURWATI

KONPHALINDO

(Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia)

P E N D A H U L U A N

Berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran, kebakaran hutan, banjir dan banyak lagi merupakan permasalahan semua pihak baik pembuat kebijakan maupun masyarakat. Mereka adalah warga negara yang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, salah satu haknya adalah hak atas informasi lingkungan hidup. Apa yang terjadi jika pemberian informasi tidak tepat isi, tidak tepat waktu, dan tidak tepat sasaran? Bisa jadi, masyarakat tidak tahu ancaman bencana akibat kerusakan lingkungan atau terlambat mengetahui kejadian bencana tersebut. Masyarakat dari semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, tidak mengetahui bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga mereka dilanda kepanikan dan bahkan menjadi korban.

Selain sebagai dasar pijak dalam mengatasi situasi darurat bencana, hak atas informasi lingkungan hidup sangat penting bagi masyarakat dalam peran mengelola lingkungan hidup berkelanjutan. Untuk mendukung peran masyarakat tersebut, setiap individu mempunyai hak memperoleh informasi lingkungan hidup dalam batas kewenangan otoritas publik, termasuk informasi aktivitas yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun di lingkungan mereka (ICEL, 2007).

Pembagian peran sosial di masyarakat menempatkan perempuan lebih sering dan lebih dalam berinteraksi dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perempuan lebih peka dalam mengelola lingkungan sekitar. Kemampuan berkelompok perempuan memungkinkan terbentuknya suatu gerakan dengan kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang sesuai. Dengan demikian, perempuan mempunyai hak mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai keterkaitan perempuan dan lingkungan hidup sehingga peran, akses, dan kontrol mereka terhadap manfaat yang diterima dapat lebih maksimal (Langit Perempuan, 2008).

Dengan visi sebagai pusat informasi pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (Konphalindo) bermaksud memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat, pemerintah atau pembuat kebijakan lainnya. Melalui penyebaran informasi pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, Konphalindo ingin memenuhi misinya untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat dan mendorong perubahan sikap masyarakat untuk menciptakan kondisi alam dan lingkungan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Konphalindo mengembangkan dan mengelola Portal Lingkungan Hidup Berita Bumi (www.beritabumi.or.id), mengelola perpustakaan dan penerbitan buku. Sebagai portal lingkungan hidup, Berita Bumi berisi berbagai informasi lingkungan hidup tentang rekayasa genetika dan keamanan hayati, pertanian organik, sumber daya alam, kehutanan, keanekaragaman

hayati, bencana alam dan lingkungan, dan lingkungan dan perubahan iklim dalam berbagai perspektif. Sasaran informasi seluasnya termasuk masyarakat umum, akademisi, pemerintah atau pembuat kebijakan lainnya, organisasi non pemerintah, swasta serta lintas gender.

Akses dan kontrol terhadap semua artikel yang bisa menjadi informasi pengelolaan lingkungan hidup tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Berita Bumi berupaya mengakomodir siapapun dia baik laki-laki maupun perempuan yang bisa menjadi sumber artikel ataupun penulisnya. Sebagai media publikasi dan penyebaran informasi lingkungan hidup berkelanjutan bagi berbagai kelompok masyarakat, Konphalindo menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk di antaranya Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK-UI) yang mengkoordinasi Program Gender, Kesehatan dan Lingkungan (*Gender, Health and Environmental Linkages Program/ G-HELP*). Melalui berbagai kegiatan dan pelatihan yang terkait dengan G-help, Konphalindo yang diwakili penulis menjadi lebih memahami permasalahan lingkungan dan kesehatan yang berperspektif gender. Sekarang ini, setiap sosialisasi program dan penyebaran informasi lingkungan hidup berkelanjutan oleh Konphalindo senantiasa mengaitkan ketiga isu penting tersebut.

Berikut tulisan sebagai refleksi Konphalindo yang diwakili penulis dalam mengaitkan isu lingkungan, kesehatan dan gender.

1. Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan dengan Pertanian Organik dan Keamanan Hayati

Untuk mewujudkan lingkungan berkelanjutan secara langsung, Konphalindo melakukan upaya sosialisasi pertanian organik dan keamanan hayati dari produk-produk bioteknologi modern (transgenik) dan pemasaran produk organik melalui berbagai cara termasuk diskusi, lokakarya, dan seminar. Dalam upaya sosialisasi itu perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kepanitiaan,

menjadi fasilitator dan peserta. Demikian pula dalam memasarkan produk organik, termasuk melakukan promosi, penimbangan, pengiriman, dan promosi.

Sebagai media pemenuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, pertanian mempunyai peran penting. Untuk itu perlu penjaminan keamanan pertanian serta produk-produk pertanian dari bermacam risiko seperti bahaya pupuk dan pestisida kimia sintetis, ancaman hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi sumber bibit maupun benih produk pangan dan holtikultura akibat kontaminasi rekayasa genetik (transgenik), penurunan produksi dan sebagainya. Melalui pengembangan pertanian organik yang memperhatikan keadilan gender, tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis seperti pertanian konvensional yang terintegrasi dengan daya dukung alam, serta menjaga keselarasan alam dalam siklus hidup. Pengembangan seperti ini diharapkan bisa menghasilkan produk yang sehat, aman dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dari semua kalangan.

Sebagai contoh adalah pengembangan pertanian organik KebonKu milik Tita di Ciburial, Cisarua, Bogor yang berlangsung sejak 2002. Semua aktivitas pertanian organik seluas 8 hektar bersama perkebunan teh seluas 12 hektar melibatkan kesetaraan jumlah laki-laki dan perempuan. Mereka semua bisa melakukan pembibitan, penanaman, pemanenan, pembuatan kompos, dan peternakan sesuai kapasitas masing-masing tanpa pembedaan. Yang terpenting bagi Tita adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap baik. Meskipun belum mencapai keuntungan yang diharapkan, yaitu produksi sayur-sayuran sebesar 400 kg per bulan (saat ini rata-rata 200-250 kg per bulan), Tita tetap bersabar mengembangkan pertanian organik. Padahal di awal pengembangannya, ibu satu orang anak ini sempat berputus asa. Namun dengan ketekunan dan kesabaran, perbaikan hasil baik kuantitas dan kualitas hasil panen cukup melegakan.

2. Bahaya Pestisida Kimia Sintetis pada Kesehatan

Kualitas produk organik yang baik mempunyai manfaat kesehatan bagi konsumen karena melalui proses yang ramah lingkungan (organis), produk organik tidak mengandung pestisida yang beracun. Menurut Heri Tabadepu dari Peka Indonesia, organis adalah cara hidup yang menghargai keseimbangan dan fungsi makhluk hidup, tidak egois, jujur, dan berkeadilan (Purwati, 2009). Dalam pertanian organis, lahan dan air tidak tercemar bahan-bahan kimia sintetis seperti pupuk dan pestisida. Selain itu, pertanian organis menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan (pupuk organik, pestisida nabati) dan melakukan proses olah tanah yang minimum, sehingga bermacam keanekaragaman hayati masih bisa hidup serta benih bebas rekayasa genetik. Pengendalian hama dan penyakit juga tidak menggunakan bahan kimia, tetapi dengan sistem rotasi tanam, mekanis dan selektif.

Pestisida kimia tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan menghindari makanan toksik yang berpestisida selain bisa membantu mencegah kegemukan juga menjaga pola konsumsi secara keseluruhan. Seperti merubah pangan sumber karbohidrat dari beras putih ke beras merah, tidak makan makanan yang digoreng serta melakukan aktifitas aerobik (Purwati, 2009). Bahaya pestisida cukup mengkhawatirkan, bahkan bisa merenggut nyawa, seperti pengalaman petani di Banjar Wang Bung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Penyemprotan hama wereng di lahannya dengan pestisida ternyata berdampak kematian pada rekan petani yang lain. Menurut Rena, ketika menyemprot hama tersebut, Jojol, sang petani yang naas tidak menggunakan masker dan sewaktu mengaduk obat juga tidak menggunakan sarung tangan. Angin di sawah pun kencang sehingga obatnya bisa terhirup nafas penyemprot. “Kata dokter yang memeriksa, dia memang keracunan,” tambah Rena (Muhajir, 2009).

Peran Perempuan di Pertanian yang begitu besar tak pelak lagi juga membuat perempuan berisiko tinggi terhadap dampak pestisida.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Dunia (FAO), jumlah perempuan yang terlibat di sektor pertanian meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga kerja perempuan dalam sektor pertanian mengalami peningkatan hampir empat kali lipat dari tahun 1960 sebanyak 7,43 juta menjadi 20,82 juta orang pada tahun 2000 (Fahmi, 2008). Beberapa studi di beberapa negara Asia juga menunjukkan perempuan merupakan pekerja utama di sektor pertanian dan perkebunan yang berhubungan langsung dengan penggunaan pestisida dalam pekerjaannya sehari-hari (Fahmi, 2008). Sebuah studi di India memperkirakan dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2001 lebih dari 1000 orang pekerja di perkebunan telah terpapar pestisida. Dari angka tersebut, lebih dari 500 orang diantaranya meninggal dengan jumlah perempuan mencapai setengahnya. Selain kematian, perempuan petani dan perempuan buruh perkebunan banyak yang menderita penyakit dan mengalami gangguan kesehatan yang kronis dan akut, seperti kuku jari tangan membusuk, gatal-gatal, perut mual dan nyeri, sakit punggung, pusing, nafas sesak, mata kabur/rabun, mudah marah, sakit kepala, sesak di dada, bengkak, nyeri otot, rasa gatal kulit dan infeksi kulit, bahkan timbulnya kanker (Fahmi, 2008).

3. Ramah Lingkungan dan Pemenuhan Hak Perempuan

Dengan penggunaan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dan kesehatan, baik pupuk maupun pestisida organik, diharapkan dapat menghindari dampak-dampak berbahaya pupuk dan pestisida kimia sintesis. Pertanian organik menjamin hak kesehatan perempuan petani karena semua yang melakukan aktivitas pertanian ini adalah perempuan petani sendiri. Mereka akan sangat mengerti dengan apa yang dilakukan, termasuk bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pertanian organik, sehingga tidak akan membahayakan kesehatan dirinya sendiri.

Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan (KNPB) di Yogyakarta, 21 Januari 2004 telah menghasilkan kesepakatan yang salah

satunya adalah komitmen meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di segala bidang. Dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai aset nasional pembangunan yang potensial, diharapkan pada masa depan akan memberikan kontribusi yang positif dan bermakna terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan. Namun demikian di negara-negara berkembang seperti Indonesia, perempuan sering menjadi korban kerusakan lingkungan hidup yang tanpa disadari telah menciptakan diskriminasi perlakuan terhadap perempuan (Kalyanamitra, 2005).

Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari ancaman kerusakan yang telah dilakukan oleh korporasi dan pengurus negara. Perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan air, tanah dan alam secara menyeluruh. Karena itulah perempuan juga menjadi kelompok pertama dan paling rentan terhadap risiko dampak kerusakan bumi akibat eksploitasi sumber daya alam oleh industri, seperti banyak perempuan dan anak yang tercemar oleh limbah dari perusahaan-perusahaan pertambangan Internasional.

Di Indonesia, nama-nama perempuan telah berpeluh keringat dan darah memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Mungkin tidak banyak yang mengenal mereka, tetapi merekalah yang berada di barisan utama mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya menghadapi kekuatan modal (korporasi) dan penguasa. Mama Yosepha yang begitu militan menghadapi kekuatan PT. Freeport, ibu-ibu Sugapa di Sumatera Utara yang mempertahankan hutan ecoliptusnya yang akan diambil alih oleh PT. Inti Indorayon untuk kebutuhan bahan pulp dan papernya, Ibu Naomi yang tidak pernah menyerah menghadapi PT. Inco yang telah merampas tanah ulayat masyarakat adat Soroako Sulawesi Selatan, serta ibu-ibu di Buyat Sulawesi Utara yang harus berjuang dengan penyakitnya akibat limbah buangan PT. Newmont Minahasa Raya, meskipun mereka selalu mengalami kekalahan demi kekalahan (Khalid, 2007).

Masih banyak lagi rentetan nama perempuan yang mungkin masih sedikit tercatat dalam sejarah gerakan perjuangan rakyat. Namun, dengan tiada henti dan tak pernah takut, para perempuan ini berjuang dengan sebuah landasan nilai filosofis bahwa yang diperjuangkan adalah nilai-nilai kebenaran dari sumber-sumber kehidupan mereka dan untuk keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Tangan-tangan perempuan yang begitu kuat dan berani inilah yang bersedia menjadi 'martir' bagi sebuah perjuangan rakyat atas mewujudkan keadilan ekologi, yang selama ini telah tergadaikan oleh pengurus negaranya sendiri. Sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan di sektor sumber daya alam telah terjadi. Kekerasan baik fisik maupun psikis telah dialami oleh perempuan yang begitu gigih memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, kekerasan ekonomi juga harus mereka alami, sehingga perempuan selalu menjadi kelompok yang paling miskin karena ketiadaan akses dan kontrolnya di dalam pengelolaan sumber daya alam. Seharusnya negara dapat menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut (Khalid, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A., Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan, *10 Nopember 2008*, www.cakrawalatimur.org, accessed 30 June 2009.
- ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Focus Group Discussion: Akses Informasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 13 Desember 2007, Jakarta.
- Kalyanamitra, Pembangunan Berkelanjutan, Peluang Mengapresiasi Kontribusi Perempuan, 8 April 2005, http://www.kalyanamitra.or.id/berita_detail.php?brID=379, accessed 30 June 2009.
- Khalid, K., 2007, Eco-Feminis dan Perjuangan Merebut Keadilan Ekologi, www.prakarsa-rakyat.org, accessed 30 June 2009.
- Langit Perempuan, Melangit di langit perempuan, 12 Juni 2008, <http://www.langitperempuan.com/2008/06/aliansi-perempuan-peduli-lingkungan-hidup/>, accessed 30 June 2009.
- Muhajir, A., Revolusi Hijau, Menjerat Petani dengan Racun, 19 Juni 2009, <http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&opiniID= OP0029&ikey =319>, accessed 30 June 2009.

Purwati, A., Tidak Beracun, Produk Organik Memberi Nilai Kesehatan, 4 Juni 2009, http://www.beritabumi.or.id/?g=berita_dtl&newsID=B0163&ikey=1, accessed 30 June 2009.



Pembelajaran G-help
di YHS, Surabaya:
Pemberdayaan Masyarakat
di Desa Licin, Kabupaten
Banyuwangi

Artikel 2

Pembelajaran G-help di YHS, Surabaya: Pemberdayaan Masyarakat di Desa Licin, Kabupaten Banyuwangi

FARIDA HANUM

YHS (Yayasan Hotline Surabaya)

P E N D A H U L U A N

Yayasan Hotline Surabaya (YHS) adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja melayani kelompok perempuan marjinal (terpinggirkan) baik di area miskin kota maupun pedesaan. Visi YHS adalah bekerja untuk martabat manusia dan dunia yang lebih adil dengan program pendidikan kesadaran, pelayanan kelompok khusus dan advokasi kebijakan untuk mendukung terpenuhinya hak masyarakat.

Sejak tahun 1992 YHS memfokuskan diri pada isu pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan pekerja seks baik di lokalisasi maupun di jalanan mencakup seluruh area di Kota Surabaya. Pada Tahun 1999 YHS mengenalkan Kesehatan Reproduksi sebagai isu yang lebih besar mengingat persoalan IMS dan HIV/AIDS tidak bisa didekati dengan intervensi program dengan fokus hanya pekerja

seks. Selain kesehatan reproduksi yang kemudian melibatkan kelompok perempuan miskin di sekitar lokalisasi, YHS melihat persoalan lain yang menjadi sumber masalah yaitu perdagangan perempuan dan anak. Area kerja pun berubah seiring dengan pemahaman persoalan pelacuran yang tidak akan bisa dikurangi jika tidak ada intervensi di daerah-daerah asal para pekerja seks ini. Maka YHS memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah *pilot program* penanganan perdagangan perempuan dan anak, disamping terus melanjutkan lebih agresif upaya-upaya yang telah berjalan di Surabaya. Pada saat itulah, sekitar pertengahan Nopember 2007 YHS mulai berpartisipasi aktif dalam G-help.

KETERLIBATAN YHS DALAM G-HELP

Pada periode 2003–2005 YHS mengalami banyak perubahan dalam manajemen program. Dengan masuknya orang-orang dengan latar belakang pengalaman terbatas dalam kerja-kerja sosial di organisasi non-pemerintah yang cenderung radikal dan bebas, YHS mau tidak mau melakukan ‘penyesuaian’ agar spiritualisme yang menjadi tradisi YHS bisa diterima oleh staf baru dan YHS sendiri mendapatkan keuntungan mulai belajar ‘tertib manajemen’ dan memaknai kebebasan sebagai hak fundamental seiring dengan pengelolaan manajemen organisasi dan program yang lebih terstruktur. Maka kesempatan bantuan teknis melalui G-help segera disambut antusias.

Sebenarnya YHS saat mendapat bantuan dana dari *Ford Foundation* untuk memulai program pelayanan medis dengan biaya bersubsidi bagi Perempuan Miskin Kota di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah belajar banyak tentang pemakaian data untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan perubahan perilaku. Namun, hasil program ini belum optimal seperti diharapkan. Salah satu yang pantas disayangkan adalah kegagalan dalam menerapkan uji coba perhitungan biaya klinik, padahal kami mengharapkan suatu model pelayanan klinik yang dapat dijangkau oleh kekuatan masyarakat kelas

bawah. Saat G-help mengenalkan penggunaan data dalam pengembangan dan manajemen program, YHS merasa lebih siap dan familiar dengan metode yang dipakai. Walaupun terus terang menurut kami metode yang dikenalkan, terutama manajemen data serta monitoring dan evaluasi, akan dianggap berbelit-belit bagi kebanyakan pegiat masyarakat dibawah bendera organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, metode tersebut mempunyai kekuatan pendobrak yang mungkin terlambat kami sadari.

Barangkali bagi saya pribadi, sistem manajemen data adalah yang paling menarik. Disamping kita bisa belajar bagaimana intervensi yang akan kita lakukan menjadi logis sekaligus bisa diuji dengan fakta, sistem ini juga menjadi senjata efektif untuk advokasi. Maka kami mulai taat membuat perencanaan dengan tujuan yang jelas di berbagai tingkatan program termasuk ukuran-ukuran praktis pencapaian tujuan program. Hal ini penting agar kami bisa menghindarkan 'kerusuhan' saat melakukan evaluasi program yang sering menjadi ajang debat bela diri. Pengalaman beberapa orang dari YHS dalam mengikuti lokakarya lapangan di Bogor (Halimun), di Lombok Utara & Yogyakarta dan Pelatihan Manajemen program di Surabaya telah memberikan semangat dan inspirasi baru dalam mengembangkan, memperbaiki, dan mengelola suatu program kesehatan.

PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH YHS DARI G-HELP

Dari pengalaman yang cukup singkat, kami mendapatkan pembelajaran yang cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Dokumentasi data menjadi kekuatan dalam melakukan analisis, hal ini penting direncanakan dengan sadar;
- ❖ Analisis sosial membantu kita melihat masalah secara menyeluruh;
- ❖ Perencanaan yang rinci, tetapi jelas dan realistis akan mempermudah pelaksanaan dan mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan program;

- ❖ Monitoring dan evaluasi membantu pelaksana program menjaga konsistensi gerakan dan memperkaya inovasi pendekatan.

Melalui lokakarya lapangan, kami juga mentransformasikan pengalaman kerja dan proses belajar bersama dengan banyak kelompok dari mitra LSM yang lain. Secara khusus kami juga bisa merefleksikan metode pendampingan masyarakat yang sudah dilakukan YHS pada saat terlibat dalam lokakarya di lapangan baik di Bogor, Lombok, maupun Yogyakarta. Kami menyadari tentang tiga hal, yaitu:

1. Pengembangan program dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana program dalam penentuan strategi dan metode pemberdayaan.
2. Pemilihan isu sebagai ‘pintu masuk’ proses pemberdayaan mempunyai beberapa pilihan sesuai kondisi dan penyesuaian:
 - Jika isu program sesuai dengan isu komunitas maka bisa langsung melakukan aksi bersama;
 - Jika isu program tidak sesuai dengan isu komunitas maka kita perlu menentukan strategi ‘entry point’, dan;
 - Isu kesehatan mempunyai risiko lebih kecil menghadapi penolakan tetapi berdampak luas dengan tingkat keterlibatan perempuan cukup tinggi;
3. Metode pendekatan pengorganisasian massa memerlukan perhatian antara lain:
 - Menerapkan prinsip partisipatif sehingga keterlibatan massa meningkat termasuk peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di keluarga dan lingkungannya;
 - Mengenali karakteristik kelompok yang akan didampingi;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi represi yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya;
 - Konsistensi penerapan *community organizer* (CO) akan dipengaruhi oleh komitmen lembaga pelaksana program/pendamping;

- Aksi – refleksi (lapangan-kelas) menjadi forum pembelajaran sekaligus monitoring dan evaluasi yang efektif.

STUDI KASUS: BANYUWANGI

Mei 2003 saya masuk ke Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan beberapa wawancara untuk mendapatkan gambaran tentang perdagangan perempuan dan anak. Dengan perantara seorang teman lama yang aktif di organisasi perempuan akhirnya saya datang ke desa Licin dan berbicara dengan 7 perempuan dan 3 laki-laki. Data ini akan kami pakai sebagai dasar skenario teater rakyat (Ludruk Suroboyoan) sebagai media advokasi di empat kota dan kabupaten di Jawa Timur. Dua bulan setelah itu saya kembali bersama tim untuk mementaskan cerita ‘Gerhana Gerhana’ dan mendapat tanggapan luar biasa khususnya dari para perempuan. Diantaranya adalah teman-teman perempuan dari desa Licin. Ketika melihat antusiasme seperti itu saya menawarkan belajar bersama untuk menangani kasus-kasus perempuan di desa itu. Akhir tahun 2003 kami melaksanakan lokakarya yang pertama kali diikuti 23 orang perempuan perwakilan dari 4 dusun yang kemudian menamakan kelompoknya Syifa’un Nisa’ yang berarti Obat Bagi Perempuan.

PERMASALAHAN YANG TERJADI

Dalam lokakarya selama satu bulan (3 hari pelatihan di kelas dan 3 minggu di lapangan) itu kami berbicara tentang persoalan-persoalan kesehatan reproduksi dan perdagangan perempuan yang mencakup tentang akses pelayanan KB, aborsi tidak aman, Infeksi Saluran Reproduksi, seksualitas, sejarah pelacuran di desa itu dan perilaku remaja yang berisiko. Akar persoalan tersebut adalah pandangan masyarakat yang menganggap pendidikan tidak penting, bias gender, dan kondisi ekonomi yang masih lemah. Meski semua peserta lokakarya setuju persoalan diatas, namun hal yang paling dirasakan masyarakat

adalah ketiadaan data untuk meyakinkan. Lantas kami mengajarkan metode pengumpulan data untuk memperkuat pemahaman masalah.

Para perempuan yang terdiri dari ibu rumah tangga, guru madrasah ibtidaiyah, penjual baju di pasar dan petani itu kemudian mulai mewawancara tetangganya sesuai dengan tugas yang diberikan. Setelah satu minggu kami berkumpul, para perempuan tersebut mempresen-tasikan temuan mereka. Kami mendiskusikan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi persoalan yang ada. Hari berikutnya kembali para perempuan itu mengkomunikasikan hasil diskusi kami ke tetangga yang mereka kenal dan berkumpul pada hari minggu. Begitulah kami melakukannya hingga mendapatkan satu rencana untuk memberi pendampingan bagi ibu-ibu yang membutuhkan pelayanan alat kontrasepsi, persalinan dan pemeriksaan kehamilan, serta pelayanan kesehatan lainnya. Sedang untuk masalah perdagangan perempuan dan anak kami melihat pendidikan formal dan pemberian keterampilan bagi anak-anak perempuan adalah jawabannya. Namun kemampuan kelompok perempuan ini terbatas, maka dipilihlah isu kesehatan reproduksi sebagai program pertama dengan memanfaatkan posyandu yang ada di dusun-dusun.

Setelah lokakarya tersebut, saya dan dua orang teman terus mendampingi melakukan diskusi-diskusi hingga kelompok mereka cukup kuat. Saya dan teman-teman berkunjung tiap bulan sesuai jadwal yang dibuat oleh Syifa'un Nisa' untuk memberi tambahan informasi atau membahas kegiatan yang sudah direncanakan. Kami menyumbangkan buku-buku yang bisa dipelajari bersama dan mendorong Syifa'un Nisa' membuat perpustakaan mini yang dikelola sebagai bentuk penggalangan dana kelompok. Seiring perjalanan waktu beberapa perempuan tidak bisa aktif lagi karena kesibukan pribadi. Hingga bulan ke delapan ada 11 orang yang tetap aktif dan membantu para perempuan untuk mengerti persoalan kesehatan reproduksi dan perdagangan perempuan yang mereka sampaikan lewat pertemuan PKK, pengajian rutin, dan pelayanan posyandu.

Suatu kali, saat kami melakukan pertemuan membahas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, seorang anggota Syifa'un Nisa' menginformasikan tentang keberadaan Dana Sehat yang dimaksudkan sebagai jaminan sosial bagi kesehatan keluarga miskin. Kebetulan anggota ini adalah istri Modin desa dan aktif membantu di kantor desa sebagai pengurus PKK. Seperti dalam pelatihan sebelumnya, mereka membagi kelompok dengan tugas khusus untuk mendapatkan informasi dari kepala desa tentang Dana Sehat, informasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan mendapatkan data keluarga miskin yang dilakukan oleh kader posyandu. Sebulan kemudian semua tim melaporkan tugas masing-masing dan pertemuan itu merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan Dana Sehat dalam bentuk seminar. Ini akan menjadi seminar pertama yang pernah dilakukan di desa tersebut. Dan mereka berhasil melaksanakan. Kepercayaan yang diberikan masyarakat seiring dengan tawaran kerjasama dengan Puskesmas dan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana sehat bagi 600 keluarga miskin serta mendampingi mereka saat mengakses pelayanan publik. Kepercayaan ini memberi semangat dan rasa percaya diri kelompok untuk melanjutkan kerja-kerjanya.

APLIKASI PROSES PEMBELAJARAN DARI G-HELP DI BANYUWANGI

Tahun 2005, dengan dukungan dana dari Organisasi Perburuhan Internasional melalui program IPEC (*International Program to Eliminate Child Labour*) YHS menawarkan kerjasama kepada Syifa'un Nisa' untuk menjalankan program penanganan perdagangan perempuan dan anak. Program ini berjalan hingga akhir 2007.

Meskipun isu utama adalah mencegah anak-anak menjadi korban perdagangan orang, kami tetap memasukkan isu kesehatan reproduksi

dan gender untuk memperkuat kampanye penyadaran. Pada saat kami bekerjasama anggota Syifaun Nisa' tinggal 8 orang. Namun pada tahun kedua program kami mampu menarik minat kelompok remaja desa Licin untuk bergabung dan membantu para perempuan yang penuh semangat ini merealisasi mimpi mereka yaitu memberi pelayanan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah.

Dengan bantuan seorang teman kami berkenalan dengan seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang bersedia memfasilitasi untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kemudian kami mengakses program Kejar Paket B setara SMP dan Keaksaraan Fungsional (KF) bagi perempuan usia 35 tahun atau lebih yang buta huruf. Melalui pendidikan inilah isu lingkungan bisa dimasukkan. Pembahasan berkisar tentang saluran air dan sampah rumah tangga, MCK (mandi-cuci-kakus), sumber air yang mulai mengecil, penebangan pohon secara liar, serta pergantian musim yang tidak jelas lagi. Untuk anak-anak Kejar paket B tiap tiga bulan kami mengadakan Kelas Alam untuk memperkenalkan isu lingkungan kepada peserta didik.

Syifa'un Nisa' dan PKBM 'RejengT' menjalin kerjasama dengan Bidan Desa yang memberikan layanan pemeriksaan dan pertolongan persalinan dengan biaya diangsur (dijamin oleh Syifa'un Nisa') bagi keluarga miskin, mendampingi masyarakat mengakses pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas maupun RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Blambangan dengan memanfaatkan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat, perubahan dari Dana Sehat) dan pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anak bekerjasama dengan Dinas Catatan Sipil kabupaten Banyuwangi. Syifa'un Nisa' kini menjadi kelompok yang mempunyai data cukup lengkap tentang keluarga miskin di desa Licin dan sering menjadi rujukan bagi Bidan dan Puskesmas juga pemerintah desa. Anggota mereka dipercaya menjadi pengelola program Pengentasan Kemiskinan atau program Kesehatan di desa. Mereka pun

berani memberikan laporan hasil kerja kelompok kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Namun seperti pepatah 'tak ada gading yang tak retak' masih banyak hal dalam kinerja Syifa'un Nisa' dan PKBM 'RejengT' juga YHS sendiri yang perlu ditingkatkan agar lebih banyak lagi masyarakat marjinal yang bisa dibantu. Menjaga konsistensi adalah persoalan yang mendesak untuk segera diperbaiki. Meski keterampilan mencari dan mengolah data sudah dimiliki, tetapi konsistensi dalam melaksanakan dari hari ke hari belum memuaskan karena belum menjadi kebiasaan yang bisa mendorong inisiatif baru. Disamping itu kemampuan melakukan analisis masalah perlu terus ditingkatkan.

K E S I M P U L A N

Keberhasilan kami dalam mendampingi Syifa'un Nisa' dan PKBM 'RejengT' didukung oleh pembelajaran kami dalam mengatur program dengan perencanaan dan evaluasi yang terencana. Dokumentasi data menjadi alat yang membantu kami bisa melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Pada akhirnya komitmen untuk bekerja bersama masyarakat dampingan adalah syarat yang tak bisa diabaikan untuk menyempurnakan segala metode yang kita miliki.

R E K O M E N D A S I

- ❖ Secara keseluruhan program G-help menarik dan sangat membantu. Karena itu perlu terus melakukan perbaikan agar lebih maksimal memberi manfaat buat mitra kerjanya.
- ❖ Dari sisi program perlu dilihat kembali semangat untuk belajar bersama. Jika G-help dipakai sebagai forum belajar bersama maka partisipasi mitra kerja bisa makin ditingkatkan termasuk dalam mendesain program. Paling tidak perencanaan desain bisa dibagi sehingga kebutuhan mitra kerja bisa terakomodir. Studi kasus

pendampingan dalam lokakarya lapangan cukup menarik, tetapi prosesnya tetap harus mengedepankan partisipasi peserta sehingga membangkitkan semangat kebersamaan.

- ❖ *Bantuan teknis* dari G-help ke YHS sangat bermanfaat untuk membantu melakukan refleksi sekaligus berbagi pengalaman. Kelemahan YHS dalam manajemen data semakin bisa diminimalisir dan kami berharap bisa saling memperkaya informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayang Tak Berwajah, 2003, Insist Press.
- FOOTSTEPS, 2003, Laporan Workshop on Community Organizing for Women Leader in Licin, (FootSteps - LOCOA).
- Freire, P., 1972, *Pedagogy of The Oppressed*, Harmondsworth: Penguin.
- Globe, Frank G., 1987, *Madzhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Kanisius.
- Murphy, D., 1985, *Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (penerjemah); "Membangun Organisasi Rakyat"*, Asian Committee for People's Organization, Hongkong.
- Selenar, D., Endara, N., and Carvajal, J., 1999, *Participatory Rural Appraisal and Planing*, International Institute of Rural Reconstruction.
- Topatimasang, R., et al, 2003, *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*, SEAPCP, Insist Press.
- Yayasan Hotline Surabaya (YHS), 2007, *Progress Report on Empowering Community to Prevent Child Trafficking in Sub district of Licin, Banyuwangi (2006 - 2007)*, ILO-IPEC.



Integrasi Gender
dalam Program Jejaring
Ford Foundation (JFF)

Artikel 3

Integrasi Gender dalam Program Jejaring *Ford Foundation* (JFF)

LENNI HERAWATI

Yayasan Rifka Annisa

GEMPA YOGYAKARTA

27 Mei 2006, gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta. Korban jiwa yang tercatat di *Crisis Center* Kantor Kementerian Koordinator Kesra RI sebanyak 5.730 jiwa. Kerusakan diperkirakan mencapai 50 ribu bangunan, belum termasuk sarana umum seperti air bersih, sarana telekomunikasi, jalan, jembatan, sekolah, sarana irigasi, sarana ibadah dan kantor. Selain itu, bencana alam tersebut turut memberikan efek domino terhadap kerusakan perekonomian dan kondisi tatanan sosial masyarakat.

Bantuan beruntun datang dari dalam dan luar negeri, begitupun para sukarelawan. Makanan, obat-obatan dan tenda menjadi kebutuhan prioritas untuk segera didistribusikan. Kemudian disusul dengan bantuan lain seperti pembangunan kembali rumah ataupun fasilitas umum yang rusak. Beragam bantuan tersebut tentunya diperuntukkan bagi semua korban bencana. Tetapi, seringkali bantuan tidak diikuti

dengan pertimbangan kondisi korban yang beragam. Kebutuhan anak, ‘manula’ dan perempuan sering terabaikan. Seperti kebutuhan susu, pakaian dalam, pembalut, dan fasilitas kesehatan reproduksi tidak menjadi prioritas bagi para pengelola bantuan yang umumnya laki-laki.

Ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan gender disebabkan budaya patriarkhi yang masih kuat di masyarakat. Pembagian peran sosial di masyarakat yang meletakkan laki-laki sebagai pihak yang terlibat dalam musyawarah kampung, berdialog, memutuskan dan menentukan prioritas bantuan menjadi persoalan kunci yang berakibat ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lain. Belum lagi perempuan pun masih merasa tabu terlibat dalam wilayah publik sebagai penentu kebijakan. Begitulah kira-kira budaya yang berlaku sejauh ini di masyarakat.

PROGRAM PEMULIHAN SOSIAL DAN EKONOMI

Setahun gempa berlalu, Bantul telah nampak bangkit. Setahun peringatan gempa dilakukan dengan beragam aktifitas, bahkan hampir di banyak kampung. Ada yang mengadakan seminar tentang penanggulangan risiko bencana, beragam acara pameran yang menampilkan kembali hidupnya industri kerajinan asal Bantul.

Tepat setahun itu pula Rifka Annisa bersama 10 ‘ornop’ Yogyakarta dan Jateng memulai program integratif jejaring *Ford Foundation* (JFF) di Bantul. Tepatnya di Dusun Kadisoro, Klisat, Kedungpring, Joho dan Warungpring. Setahun setelah berlalunya bencana membuat fokus program menitikberatkan pada pemulihan sosial dan ekonomi melalui aktifitas program yang beragam, termasuk pembangunan kembali perumahan, pemulihan *asset* ekonomi mikro perempuan, advokasi transparansi anggaran, pemeliharaan kesehatan, pemulihan psikososial, tata kelola perumahan dan revitalisasi kesenian tradisional

MENDORONG KEADILAN GENDER

Dalam program JFF, Rifka Annisa lebih berperan dalam upaya pemulihan sosial dengan fokus keadilan gender. Dalam hal ini peran-peran gender didorong menuju keadilan sosial di masyarakat, diantaranya dengan membangun kesadaran gender, mendorong terbentuknya kelompok-kelompok perempuan, yang kemudian mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mendampingi perempuan yang menerima perlakuan tidak adil yang berbentuk kekerasan. Dalam pelaksanaan di komunitas, Rifka Annisa mengambil strategi pelibatan multi-pihak. Jika ketimpangan sosial terjadi akibat adanya pihak yang dominan dan terpinggirkan, kuat dan lemah, atau atas dan bawah, maka ketimpangan itu dijembatani dengan mempertemukan satu tahap saling menghargai dan menjauhi bentuk-bentuk kekerasan.

Upaya membangun kesadaran masyarakat berkeadilan gender tidak mudah. Selain ditentang beberapa pihak yang merasa terusik, program ini dikatakan tidak menguntungkan masyarakat seperti halnya program fisik, bangunan ataupun bantuan ekonomi. Belum lagi hal ini membuat masyarakat berhadapan bukan dengan pihak luar saja, akan tetapi yang lebih terberat berhadapan dengan diri mereka sendiri karena gender dibentuk oleh budaya dan seringkali sudah menjadi sebuah kebiasaan bahkan keyakinan.

Sebagai langkah awal, Rifka Annisa melakukan penyuluhan-penyuluhan bagi ibu-ibu. Dari penyuluhan ini dan diskusi dapat dikenali berbagai kondisi yang selama ini tidak menguntungkan pihak perempuan. Diskusi-diskusi terus berlanjut dari bulan pertama hingga ketiga yang kemudian memunculkan pula kader-kader baru yang sangat peduli terhadap isu ketidakadilan. Untuk semakin mempermudah dan memperjelas tujuan kerja kesadaran gender di kampung mereka, mulailah masing-masing dusun membentuk organisasi perempuan yang

dapat mendorong berdayanya perempuan dan terwakilinya kepentingan-kepentingan Perempuan. Organisasi Perempuan ini terlibat di dalam pertemuan-pertemuan Panitia Pembangunan Dusun (PPD).

Selain melaksanakan program sendiri, dengan berjalannya program integratif ditemukan kebutuhan-kebutuhan yang saling bersinergi dengan program lain, seperti program pembangunan kembali rumah, pemulihan ekonomi, kesehatan, advokasi, dan lainnya. Program pembangunan kembali rumah biasanya melibatkan hanya laki-laki, sehingga kebutuhan perempuan sering terabaikan. Dalam program integratif ini perempuan diundang untuk turut membicarakan rumah yang ramah perempuan. Misalnya saja, dapur yang dalam budaya saat ini paling banyak digunakan perempuan, maka perempuan lebih tahu kebutuhan tata letak ataupun interior dapur, termasuk keberadaan dan posisi jendela untuk keluarnya asap dari memasak, air bersih untuk mencuci bahan makanan dan lainnya, cahaya yang memadai untuk penerangan saat memasak, dan lain-lain.

Sebelumnya, banyak diantara bangunan yang sudah mulai berdiri belum memiliki prioritas pada dapur ataupun kamar mandi. Karena soal bangunan seringkali diserahkan kepada laki-laki, prioritas teras lebih utama karena alasan yang dilihat pertama kali adalah bagian depan rumah. Banyak rumah memiliki teras bagus tetapi belum memiliki dapur. Pembagian peran budaya (gender) yang tidak adil ini juga terlihat dalam kebiasaan keluarga dalam menjaga kesehatan lingkungan. Seperti program pemantauan jentik nyamuk yang melibatkan hanya ibu-ibu. Setelah diadakan penyuluhan dan diupayakan keterlibatan laki-laki, baru tanggung jawab terhadap lingkungan rumah dilakukan bersama ibu dan bapak rumah tangga.

Upaya keadilan gender juga penting melibatkan laki-laki. Di daerah program, sebagian besar ibu-ibu merupakan perempuan pekerja. Budaya patriarkhi yang masih kuat menjadikan perempuan memiliki tanggung jawab mengurus rumah sekaligus menafkahi keluarga. Dengan

dibangunnya kesadaran laki-laki diharapkan perempuan tidak lagi mengalami beban ganda dan mulai dengan pembagian kerja yang adil ataupun kerjasama di dalam rumah tangga. Setelah suami ikut terjun menjaga kebersihan rumah, ibu-ibu mengaku sangat terbantu dan beban kerja berkurang hingga jarang mengeluh masuk angin atau sakit-sakit dibagian tubuh. Kesadaran baru bapak-bapak juga berkontribusi terhadap kesehatan keluarga. Jika dulu pekerjaan mengurus bak mandi, membakar sampah dan pekerjaan lain rumah tangga adalah pekerjaan ibu-ibu, sekarang dilakukan juga oleh suami.

Yang menarik pula, muncul upaya advokasi hak-hak warga ke badan legislatif dengan mulai melibatkan suara kelompok-kelompok perempuan. Salah satu organisasi non-pemerintah dalam JFF melaksanakan suatu program yang mendorong partisipasi warga dalam memenuhi hak-hak ekonomi-sosial dan budaya (ekosob). Program ini juga memberi ruang yang lebih luas kepada perempuan melalui perwakilan kelompok-kelompok perempuan untuk mampu menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka.

JFF PASCA RIFKA ANNISA BERINTERAKSI DENGAN G-HELP

Rifka Annisa terlibat dalam program G-help tepat di tengah berjalannya program JFF. Program G-help dan JFF hampir sama dalam hal keragaman isu program, tetapi berbeda dalam beberapa hal manajemen program. Pada JFF masing-masing isu program menjadi tanggungjawab salah satu lembaga yang merancang dan mengelola program, sehingga ada banyak pihak yang melakukan manajemen program didalam satu kelompok sasaran. Sedangkan pada G-help manajemen program di satu lembaga yang melibatkan multi-sektor lembaga yang peduli dengan isu gender, kesehatan dan lingkungan. Masing-masing pola manajemen ini memiliki kekuatan dan kelemahan.

Manfaat yang dirasakan Rifka Annisa setelah terlibat dalam G-help adalah timbulnya keyakinan untuk mengaitkan langsung program gender dengan isu keadilan gender yang lebih luas. Jika pada awal Rifka merancang program dengan fokus keadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan, kemudian program terutama saat pelaksanaan di komunitas mencoba bersinergi dengan isu-isu yang lebih luas yang lebih mudah diterima masyarakat. Bersinergi dengan lain, seperti program perumahan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, nilai-nilai keadilan gender dapat lebih mudah dimasukkan.

Pelajaran penting lain melalui G-help adalah pembelajaran monitoring dan evaluasi. Kami di Rifka Annisa menjadi lebih jelas perbedaan antara monitoring dan evaluasi dan semakin yakin akan kebutuhan data dalam memantau kemajuan program dan menilai dampak program. Sekarang ini monitoring program dilakukan bulanan, dan evaluasi dampak atau kontribusi program terhadap perubahan dilakukan setiap 6 bulan. Data-data baru hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan betapa sulit menerapkan keadilan gender dengan membangun kesadaran hanya salah satu pihak dan terfokus hanya pada kekerasan terhadap perempuan. Padahal di komunitas, ketidakadilan gender terkait langsung dengan situasi sosial masyarakat setempat.

TANTANGAN DAN PEMBELAJARAN

Bagi Rifka Annisa sendiri yang telah lama bekerja di isu keadilan gender, tentunya memiliki tantangan tersendiri. Rifka berhadapan tidak saja dengan pihak yang merasa diserang (laki-laki), tetapi seringkali pula dengan perempuan yang sudah meyakini ketidakadilan gender sebagai kodrat yang ditakdirkan Tuhan bagi perempuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Rifka Annisa melibatkan multi-pihak, yang kuat dan yang lemah, yang selama ini dominan dan yang dipinggirkan, dan juga kelas atas dan kelas bawah. Kedepan, kebutuhan mengintegrasikan

isu gender dengan isu-isu lain yang lebih luas sesuai dengan kondisi sosial masyarakat perlu menjadi acuan dalam pengembangan program. Kesadaran gender yang langsung dikaitkan dengan isu yang lebih luas dengan kondisi masing-masing komunitas dapat memperlihatkan secara kongkrit kepada masyarakat dan banyak pihak bentuk-bentuk keadilan gender sehingga mereka dapat lebih menerima dan merasakan manfaatnya.



SEKILAS RIFKA ANNISA

Rifka Annisa WCC – yang berarti teman perempuan – adalah women’s crisis center yang berdiri sejak 26 Agustus 1993 di Yogyakarta. Didirikan oleh beberapa perempuan yang bersepakat menyediakan layanan bantuan bagi perempuan korban kekerasan, Rifka Annisa bervisi mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial-gender yang tidak mentoleransi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu strategi yang digunakan adalah program penguatan gerakan masyarakat untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PKTP). Inisiatif ini berangkat dari kesadaran bahwa salah satu cara terbaik memastikan bahwa upaya PKTP dapat terwujud berkesinambungan adalah dengan melibatkan komunitas basis tersebut sebagai pelaku utama perubahan.



Hutan Kemasyarakatan dan Perempuan

Artikel 4

Hutan Kemasyarakatan dan Perempuan

MOH. TAQIUDDIN

Yayasan KONSEPSI

(Konsorsium Untuk Studi dan
Pengembangan Partisipasi)

KONDISI HUTAN NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Kondisi hutan di NTB saat ini cukup memprihatinkan. Hasil pencitraan satelit memperlihatkan sebagian besar hutan diambang kerusakan besar. Dari satu juta lebih areal hutan, 63 persen dalam kondisi rusak. Degradasi kawasan hutan pun mencapai luasan 50 ribu hektar per tahun. Kerusakan hutan NTB dipicu oleh aktivitas perambahan liar di dalam kawasan dibarengi dengan praktek pengelolaan lahan (hutan) yang mengabaikan perlindungan tanah dan air. Dinas Kehutanan NTB (2007) mencatat angka 527.962,11 hektar luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan yang tersebar di seluruh kabupaten. Dari luas tersebut, 37.834,70 hektar berada di wilayah Lombok Barat dengan jumlah perambah liar ditaksir sembilan ribu orang.

KEMISKINAN DAN KERUSAKAN HUTAN

Pada 2003 silam, BKKBN pernah melakukan pendataan rumah tangga miskin di NTB. Hasilnya, hampir 60 persen rumah tangga bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan (Ediawan dkk, 2005). Stigmatisasi kawasan hutan sebagai kantong kemiskinan pun melekat saat itu.

Potret masyarakat sekitar hutan ditandai dengan gambaran pemilikan lahan yang sempit, pendapatan hasil pertanian yang rendah, dan kekurangterampilan berusaha di luar sektor pertanian. Di tengah kesulitan dan keterbatasan, perambah hutan menjadi pilihan hidup yang memungkinkan. Intervensi terhadap areal hutan kerap kali tidak terkontrol, dengan akibat degradasi lingkungan.

Pemerintah dan sejumlah pihak terkait bukannya berpangku tangan. Sejak 1995, telah dirintis skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui kemitraan Dinas Kehutanan dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES (sekarang bernama KONSEPSI NTB). Upaya ini diyakini menjadi suatu langkah kompromi menjawab masalah kemiskinan di satu pihak dan pelestarian hutan di pihak yang lain.

HKm nyatanya telah memberi ruang bagi masyarakat pinggiran hutan untuk mengelola kawasan hutan sekitar mereka. Pendekatan kelembagaan yang dipadukan dengan aspek teknis ternyata mampu membawa kesejahteraan dan kelestarian fungsi hutan di beberapa kawasan yang menjadi lokasi program.

Namun demikian, inisiasi HKm bukannya tanpa masalah. Bongkar pasang kebijakan pemerintah (pusat) dan masih lemahnya sosialisasi konsep HKm di lapangan menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, HKm seringkali dijadikan dalih bagi para perambah untuk membuka lahan hutan secara sporadis. Akibatnya, kerusakan areal hutan cenderung meluas dari waktu ke waktu. Kerusakan sumberdaya hayati semacam ini membuat masyarakat sekitar hutan tetap terperangkap dalam jerat kemiskinan.

Harus diakui bahwa mengatasi kemiskinan yang dibarengi dengan upaya pelestarian hutan seringkali menuai persoalan dilematis. Memastikan kelestarian fungsi hutan seringkali berbenturan dengan orientasi pemenuhan kebutuhan ekonomi para pihak terkait. Bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah demi pundi-pundi pendapatan.

PEREMPUAN DAN PENGELOLAAN HUTAN

Dampak kerusakan hutan ternyata tidaklah netral gender. Realita keterpurukan lingkungan hidup berdampak negatif terhadap kehidupan jutaan perempuan Indonesia. Skenario globalisasi melalui politik kebijakan pengelolaan lingkungan yang cenderung patriarkis telah meminggirkan perempuan. Aturan-aturan yang ada mulai dari pusat, daerah hingga lokal lalai memasukkan aspirasi dan kepentingan perempuan. Pada kasus HKM misalnya, jarang sekali dijumpai nama perempuan dalam daftar nama pengelola. Tak heran di sekitar kawasan hutan banyak ditemukan perempuan janda miskin yang memerankan fungsi kepala keluarga.

Penelitian KONSEPSI (2005) di 14 dusun di empat desa kawasan hutan Lombok Barat menunjukkan bahwa dari 3.191 KK di Sesaot, 195 KK di antaranya dengan perempuan janda miskin sebagai kepala keluarga. Usia perempuan ini dari 20 hingga lebih dari 70 tahun. Tercatat 97 orang menjanda karena suami meninggal, selebihnya cerai hidup. Sebanyak 75 persen dari janda cerai hidup tidak lagi dinafkahi oleh mantan suami, padahal anak-anak hidup bersama sang ibu. Lepasnya tanggung jawab mantan suami sesungguhnya satu bentuk penciptaan 'kemiskinan baru' bagi perempuan.

Beban yang mesti ditanggung janda miskin begitu berat. Bayangkan, mereka harus menghidupi lima hingga sembilan orang tanggungan keluarga. Pendapatan mereka umumnya diperoleh harian dengan cara berburuh, seperti mengangkut hasil hutan,

membersihkan lahan, menjual rumput hingga mengangkut pasir. “Uang yang ada cukup untuk satu hari saja, sementara belanja besok harus berburuh lagi” - penuturan M dari Dusun Gontoran Sesaot.

Persoalan janda miskin adalah kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan struktur sosial patriarkis. Para janda miskin ini tidak kuasa melawan ketidakadilan yang menimpa diri mereka, baik dari mantan suami maupun kebijakan otoritas setempat. Data pemerintahan desa tidak cukup memberi informasi terkait posisi dan status mereka.

Masalah perempuan kawasan hutan juga terkait dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kelompok. Begitu sulit mengharapkan kehadiran dan mendengarkan suara perempuan dalam suatu forum kelompok karena tidak diundang ataupun kesibukan mereka mengurus rumah tangga. Hilangnya suara mereka boleh jadi juga karena agenda pertemuan tidak terkait dengan kepentingan perempuan. Suara perempuan cukup diwakili para suami. “Biasanya kaum ibu membawa anaknya dalam pertemuan. Mereka kurang serius mengikuti pertemuan, apalagi jika anaknya menangis”- demikian pendapat salah seorang laki-laki dalam sebuah diskusi di Koperasi Tani (Koptan) HKm Santong.

Nyata sekali, peran sosial perempuan kerap kali menghambat partisipasi mereka. Hambatan ini membuat perempuan kurang percaya diri. Seorang Ibu di Dusun Kalirangget Desa Batu Mekar mengungkapkan: “...cukup bagi kami menerima apa yang diputuskan bapak-bapak saja. Kalau ikut pertemuan, biasanya kami banyak diam. Kami malu berbicara, takut salah”.

Kerusakan hutan berdampak pada bertambahnya beban domestik perempuan, terutama mereka yang tinggal di kawasan hutan. Penurunan debit air misalnya, menuntut kaum ibu dan anak-anak mencari sumber air ke tempat lain meski harus berjalan jauh. Situasi demikian dialami kaum perempuan di Desa Salut-Lombok Utara ketika musim kemarau

beberapa tahun lalu. Mereka harus berjalan satu hari penuh mengambil air bersih di Amor-Amor Bayan. Seiring dengan laju kerusakan hutan, kondisi demikian berpeluang berulang di kemudian hari.

Masalah lain yang mesti diperhatikan adalah persoalan kesehatan reproduksi. Sejumlah penyakit seringkali diderita ibu hamil apalagi ketika kualitas lingkungan sekitar menurun. Himpitan ekonomi dan beban kerja yang berat membuat para ibu hamil dan anak rentan terhadap kesakitan dan kematian. Di samping itu, terisolasinya kawasan hutan menghambat akses para ibu terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan reproduksi.

KEBERPIHAKAN PADA PEREMPUAN

KONSEPSI merupakan organisasi masyarakat madani yang bertekad mempromosikan nilai-nilai keadilan tanpa pembedaan suku, agama, warna kulit, gender dan keturunan. Sejak masih bernama LP3ES Cabang NTB¹, isu gender sudah menjadi perhatian program pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Sesaot.

Ketika HKm pertama kali diuji-coba tahun 1995 pada areal seluas 25 hektar, Kelompok Mitra Pengamanan Hutan (KMPH) Sesaot menetapkan empat butir kriteria penggarap, salah satu adalah “para perempuan petani tanpa suami yang memiliki tanggungan anak dan tidak mempunyai pekerjaan”. Dari 58 penggarap yang terpilih, memang lebih didominasi kepala keluarga laki-laki. Demikian juga empat tahun kemudian saat perluasan HKm hingga 211 hektar, jarang sekali nama KK janda miskin ditemukan dalam daftar penggarap HKm yang mencapai jumlah 1.224 orang.

Memprioritaskan KK janda miskin sebagai penggarap HKm sesungguhnya sebagai bentuk pengakuan keberadaan mereka (tindakan

¹ Mulai tanggal 21 April 2001, LP3ES Cabang NTB menjadi lembaga lokal independen terpisah secara struktur dari LP3ES Pusat (Jakarta) dan diberi nama KONSEPSI (Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi)

afirmatif). Selain itu, memberi lahan kelola berarti membantu kesulitan hidup janda miskin. Dari hasil budidaya tanaman di lahan HKm, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi.

Aktivitas pengelolaan lahan bukan hal asing bagi kebanyakan perempuan perdesaan di Lombok. Di lahan-lahan HKm, kita akan menjumpai lebih banyak perempuan beraktivitas ketimbang laki-laki, apalagi saat pemeliharaan tanaman berlangsung. Umumnya, laki-laki mempercayai keuletan dan ketelatenan perempuan dalam hal budidaya dan perawatan tanaman. Bahkan, tidak jarang kita menemukan perempuan di Sesaot misalnya ikut dalam aktivitas pembukaan dan pengolahan tanah.

Menempatkan perempuan dalam tata kelola hutan seringkali mengacu pada label stereotipe yang terstigmatisasi pada sebuah kultur masyarakat. Penelitian Harsoyo dkk (2007) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan desa hutan di Jawa biasanya terkait dengan aktivitas budidaya tanaman kehutanan, perkebunan, dan buah-buahan, dan suami melakukan pekerjaan mengolah tanah. Model pembagian tugas demikian karena stereotipe pekerjaan mengolah tanah memerlukan tenaga kuat, sedangkan aktifitas menanam dan memanen memerlukan ketelatenan (Harsoyo dkk, 2007).

Membicarakan hak-hak perempuan kala itu memang cukup sensitif bagi masyarakat sekitar Hutan Lindung Sesaot. Hambatan dan tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, mulai dari lemahnya kapasitas personal hingga tatanan sosial budaya yang patriarkis. KONSEPSI — saat itu masih bernama LP3ES NTB— mulai mengubah pendekatan. Diskusi dengan kaum ibu pun mulai aktif dilakukan. Suara dan keinginan perempuan pun mulai terdengar. Pada sisi lain, pemahaman gender juga diberikan kepada pengurus kelompok yang didominasi laki-laki. Sosialisasi melalui berbagai cara dan media digiatkan. Berbagai jenis pelatihan pun dilaksanakan. Perlahan, namun pasti, upaya tersebut menampakkan hasil.

Pertengahan tahun 1999, berdirilah kelompok wanita di Gubuk² Bajur (Sesaot) yang mengembangkan usaha simpan pinjam guna mendukung modal ekonomi produktif rumah tangga. Untuk aktivitas sosial, kelompok ini menerapkan pola banjar³ untuk membantu sesama jika ada acara perkawinan atau musibah kematian. Aktivitas kaum perempuan di Bajur hingga kini masih berlangsung.

Pada tingkatan rumah tangga, pembagian peran suami-isteri dalam berbagai urusan mulai dipraktekkan beberapa keluarga. Bukan hal yang tabu lagi bagi Pak AR (40 Tahun) memandikan anak ataupun duduk menjerang air di dapur manakala sang isteri mengerjakan tugas lain. Menariknya lagi, Bu JM (35 tahun) begitu hafal menguraikan kondisi aset rumah tangga dan perkiraan hasil panen pada lahan-lahan yang mereka kelola (hutan, sawah dan kebun). Kehidupan rumah tangga Pak Man, demikian panggilan akrabnya, menjadi contoh menarik bagaimana suami isteri berbagi peran dalam keseharian⁴.

Berjalannya aktivitas berkelompok para ibu menjadi dinamika tersendiri bagi masyarakat sekitar hutan Sesaot. Posisi dan peran perempuan mulai diperhitungkan meski bersifat kasus per kasus. Sebagai sebuah ikhtiar, ‘sesuatu yang kecil’ lebih baik daripada ‘tidak ada sama sekali’ manakala ‘sesuatu yang besar’ masih sulit tercapai.

Peran dan posisi kaum perempuan pada tingkat komunitas kawasan memang belum banyak berubah. Meski berbagai upaya telah dilakukan, hasil tetap saja nihil. KK janda miskin masih saja belum

² Gubuk merupakan bahasa sasak dari dasan, dusun atau kampung sebagai unit komunitas dalam sebuah wilayah desa.

³ Banjar dalam istilah suku sasak sebagai suatu kelompok adat atau perkumpulan masyarakat dengan anggota penduduk suatu kampung/dusun (dasan) atau beberapa dasan berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan sosial, puak atau agama. Lihat dalam http://psik-demokrasi.org/files_pdf/demokrasi+dalam+perspektif+suku+sasak-ali+jadid_20071210201217.pdf, accessed 17 September 2008.

⁴ AR adalah mantan Ketua KMPH Mitra Sesaot. Saat ini menjabat Ketua BPD Desa Lebah Sempage Kec. Narmada dan Ketua Kelompok Tani Ternak. Penulis menyaksikan sendiri kehidupan rumah tangga informan saat melakukan penelitian lapangan di bulan April 2009. Selama dua hari dua malam, penulis menginap di rumah Pak AR. Menurut Pak AR, pembagian tugas suami isteri semacam ini telah dipraktekkan sejak lama ketika sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan LP3ES dulu.

disentuh kebijakan lokal tata-kelola kawasan, walaupun keberadaan mereka telah diakui secara normatif. Inilah realita yang bisa ditangkap ketika KONSEPSI melakukan penelitian lapangan di tahun 2005. Bisa jadi, kondisi ini berlangsung karena lemahnya kapasitas lembaga pendamping dalam memahami persoalan.

PERUBAHAN SETELAH “BERSENTUHAN” DENGAN G-HELP

Persoalan gender tidaklah parsial, bukan sebatas tuntutan kesetaraan hak kelola hutan antara laki-laki dan perempuan. Gender terkait juga dengan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Demikianlah pemahaman mendasar KONSEPSI ketika berdiskusi dengan Tim G-help PPK UI pertengahan 2007 silam. Berbagai kekurangan pun mulai terasa manakala tim tamu memperkenalkan sejumlah alat analisa gender.

Catatan penting dari Prof. Budi Utomo saat itu adalah “analisis gender bertujuan mencapai keadilan, bukan kesetaraan”. Penjelasannya, keadilan gender mempertimbangkan perbedaan kehidupan perempuan dan laki-laki serta mengakui perlunya perbedaan pendekatan untuk menghasilkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Sementara, kesetaraan gender didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Anggapan ini gagal mengenali bahwa perlakuan sama tidak menghasilkan keadilan, karena laki-laki dan perempuan berbeda pengalaman hidup.

G-help menginisiasi sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi mitranya. Alhasil, KONSEPSI akhirnya memiliki perspektif baru perihal tata kelola lingkungan kekinian. Di mana ada keterkaitan langsung antara pengelolaan lingkungan dengan isu gender, kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Karena itu, model kelola hutan apapun yang akan dijalankan harus mampu menjawab keempat

persoalan tersebut. Pembelajaran yang diperoleh dari G-help inilah kemudian diterapkan berdasarkan situasi lapangan.

Keterlibatan dan suara kaum perempuan mulai diperhatikan. Pengurus kelompok secara aktif mendatangi dan berdiskusi dengan kelompok-kelompok perempuan di sejumlah lokasi dan kondisi. Hal ini terjadi ketika pengelola HKm Sesaot menyusun rencana pengelolaan kawasan pada bulan Oktober 2007. Rencana tersebut meliputi rencana umum selama masa 35 tahun dan rencana operasional yang sifatnya tahunan. Ahmad Mulyadi-salah seorang pengurus KMPH Sesaot menuturkan:

“...pengurus aktif mendatangi tempat-tempat di mana kaum perempuan biasanya berkumpul. Di sanalah kita banyak melakukan diskusi. Dalam hal penyusunan rencana kelola HKm, perempuanlah yang menentukan jenis tanaman apa yang akan diusahakan. Kita juga menyadari bahwa perempuan sebenarnya sangat menentukan keberhasilan HKm. Karena merekalah yang banyak terlibat sejak penanaman, pemeliharaan hingga pemasaran hasil”⁵.

Sejak bulan Desember 2007, terbentuk kelompok ‘Ale-Ale’ yang diinisiasi oleh 25 orang perempuan dari empat desa di kawasan hutan lindung Sesaot (Ranget, Sesaot, Jurang Malang dan Lebah Sempage). Selaku pendamping kelompok, Asiah menceritakan:

“...kelompok ini bermula dari pelatihan keterampilan yang diadakan Lawe Yogya dan diikuti 25 orang. Bahwa kegiatan harus tetap jalan setelah pelatihan dan disepakatilah terbentuknya satu kelompok perempuan yang diberi nama ‘Ale-Ale’. Kebetulan saat itu banyak sekali ‘laron’ (ale-ale) beterbangan. Perempuan yang

⁵ Wawancara dilakukan di Kantor KONSEPSI pada tanggal 9 Juni 2009.

ikut pelatihan saat itu ingin mengambil filosofi laron yang cepat berkembang apalagi ketika musim hujan...”⁶

Filosofi ‘laron’ agaknya mulai menuai hasil. ‘Ale-ale’ ternyata bukanlah sebatas kumpulan para pengrajin semata. Kelompok ini justru menjadi representasi kaum perempuan sekitar kawasan hutan lindung Sesaot. Setiap kali forum kawasan menggelar pertemuan, perwakilan ale-ale selalu terlibat. Posisi strategisnya makin disadari ketika wakil kelompok ini terlibat dalam lokakarya analisa gender Tim G-help. Konsolidasi terus dilakukan hingga saat ini, melalui antara lain pertemuan minggu kedua setiap bulan.

P E M B E L A J A R A N

- ❖ Membicarakan posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan hutan bukanlah perkara mudah. Apalagi melakukan perubahan tatanan sosial budaya. Perlu waktu, tenaga dan pikiran yang tak sedikit. Banyak hal yang harus dikerjakan, dari meluruskan pola pikir laki-laki untuk tidak menganggap remeh perempuan, hingga membangkitkan percaya diri perempuan itu sendiri.
- ❖ Perempuan seringkali gagap jika terlibat di luar urusan domestik. Oleh karena itu, analisa gender menjadi langkah awal dalam perencanaan tata kelola hutan di tingkat lokal pada setiap level pengambilan keputusan, mulai dari keluarga, kelompok, dusun, desa hingga daerah. Sebuah keputusan bermakna adil, ketika secara tegas memberi porsi yang sama bagi semua kelompok gender.

⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2009 di Kantor KONSEPSI.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, 2007, Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat, Dokumen Kebijakan.
- Ediawan, A, Kemiskinan dan Kehutanan di Indonesia, 18-20 Agustus 2005, Makalah Workshop Membangun Kolaborasi Multi Pihak dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat-Senggigi.
- Harsoyo, Sastriyani, Indah, dkk, 2007, Peranan Perempuan dalam Kehutanan, <http://www.psw-ugm.web.id/2008/05/26/penelitian-2007/>, accessed 29 May 2009.
- KONSEPSI (Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi), 2005, Studi Profil Perempuan Janda Miskin di Sekitar Kawasan Hutan Lombok Barat, Laporan KONSEPSI-KEHATI.



Kehutanan Masyarakat dan Kesetaraan Gender di Desa-Desa Pinggir Hutan

Artikel 5

Kehutanan Masyarakat dan Kesenjangan Gender di Desa-Desa Pinggir Hutan

FACHRUDIN RIJADI
JAVLEC (Java Learning Center)

PENDAHULUAN

Semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Manakala kita melihat karakteristik dari masing-masing secara fisik, dengan mudah kita membedakannya. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin ini hanyalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang dibawa sejak lahir.

Seandainya perbedaan itu tidak menjadikan ketidakadilan, tidak menjadikan pertentangan, tidak ada penekanan dan penindasan satu jenis kelamin dengan yang lain, tidak masalah. Pada kenyataan, perbedaan itu telah merambat pada suatu kondisi di mana salah satu pihak merasa dan dianggap lebih tinggi derajat, lebih berkuasa dan lebih segalanya dari pihak lain. Hal inilah yang memunculkan ketidakadilan dan ketidakesetaraan.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender telah menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Melalui perjalanan panjang meyakinkan dunia bahwa perempuan hanya karena perbedaan jenis kelamin telah mengalami diskriminasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 menyetujui konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW. Indonesia pada tahun 1984 telah meratifikasi CEDAW menjadi UU No. 7/1984, namun kurang disosialisasikan dengan baik oleh negara. Akhirnya, konvensi maupun Undang-Undang tersebut dalam kenyataan tidak sanggup menghapus diskriminasi yang dialami perempuan Indonesia

Javlec (Java Learning Center) sebagai suatu *Community Foundation* yang didirikan oleh Komunitas Pendukung dan Penyelamatan Hutan Jawa (KPPHJ) merupakan suatu jaringan organisasi non pemerintah (ornop) yang peduli dan bekerja dalam upaya-upaya penyelamatan hutan Jawa. Namun jejaring Javlec yang menyebar di seluruh Jawa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, hal ini bisa terlihat dari banyaknya kepengurusan di kelompok tani, pengurus LSM, dan pejabat-pejabat kehutanan daerah yang belum menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip kesetaraan gender. Demikian pula dokumen dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan belum menunjukkan keseimbangan kepentingan antara laki-laki dan perempuan.

Kasus di desa-desa pinggir hutan di wilayah Gunung Kidul merupakan contoh masalah gender di lingkup jejaring Javlec. Karena sebagian besar suami merantau ke kota-kota besar, perempuan di kawasan ini menghabiskan waktu hampir 10 dalam 12 bulan sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus kebutuhan sehari-hari keluarga di rumah, termasuk urusan anak, ternak, kebun dan pertanian. Situasi itu merupakan fakta lapangan yang perlu kita cermati dengan seksama untuk dipecahkan.

BUDAYA JAWA DAN KESETARAAN GENDER

Menelusuri garis wewenang dalam pembentukan, artikulasi dan pelaksanaan peraturan, banyak menyingkap hirarki-hirarki sosial dan bentuk-bentuk kekuasaan dalam kehidupan. Hirarki-hirarki ini dapat dikepalai seorang lelaki atau perempuan yang kuat dari berbagai koalisi sosial atau sumber-sumber yang lebih besar, lebih abstrak dan lebih luas. Dalam bentuk paling dasar, otoritas terkondisi secara biologis. Kepala rumah tangga, suami, sesepuh, kakek kandung dan berbagai orang-orang kuat lain memaksa dan mempertahankan ketertiban dalam zona pengaruh mereka. Patriarki dalam masyarakat berkembang di dunia, tak terkecuali Jawa. Dalam kebudayaan pra modern—ukuran fisik dan sistem otot lelaki yang lebih unggul dan peran biologis perempuan yang melahirkan anak—menghasilkan suatu pembagian kerja berdasar jenis kelamin yang masih berlaku hingga sekarang. Kaum lelaki menjadi penyedia kebutuhan hidup dan pelindung keluarga dengan implikasi pemberian otonomi dan kesempatan yang relatif besar.

Pembagian kerja menyebabkan peran-peran sosial terbatas bagi kedua jenis kelamin dan menciptakan perbedaan kekuasaan yang dalam beberapa hal lebih menguntungkan laki-laki. Jenjang wewenang berasal dari perbedaan biologis meluas mendalam ke ranah publik. Kaum lelaki mendominasi lembaga-lembaga ekonomi, politik dan keagamaan di mana-mana. Peraturan-peraturan diartikulasikan sehingga normatif mempertahankan kekuasaan mereka.

Di Indonesia, perempuan yang menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan maupun swasta belum sebanding dengan laki-laki. Padahal dari jumlah, penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Meskipun kita sudah mempunyai menteri perempuan, duta besar perempuan, bahkan jenderal dan presiden perempuan juga pernah, namun perbedaan jumlah sangat jauh. Walaupun besar dalam jumlah, perempuan “kurang terlihat”. Kesempatan menduduki jabatan eksekutif baru dinikmati segelintir perempuan (Raharjo, 1995).

Sebenarnya, undang-undang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan, tetapi kendala budaya dan struktural membuat perempuan masih kesulitan, terutama dalam hal partisipasi pengambilan keputusan dan kekuasaan. Lingkungan dan struktur budaya tidak banyak mendukung partisipasi penuh perempuan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan.

Banyak istilah-istilah dalam budaya Jawa mendudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Istilah-istilah ini sudah tertanam dalam-dalam di masyarakat, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Contoh, istilah 'istri sebagai kanca wingking', artinya teman belakang, yang mengurus bagian 'belakang' rumah tangga, terutama urusan anak, memasak, dan mencuci. Istilah lain 'suwarga nunut neraka katut', artinya suami menentukan apakah istri masuk surga atau neraka. Kalau suami masuk surga, berarti istri juga masuk surga, dan kalau suami masuk neraka, istri juga masuk neraka walaupun istri berhak masuk surga karena amal perbuatan baik. Istilah lain lagi yang merendahkan istri yaitu seorang istri 'harus bisa manak, macak, masak dan berapa kata lain berawal 'm'. Manak berarti harus bisa memberikan keturunan, macak berarti harus selalu berdandan untuk suami, dan harus bisa memasak untuk suami. Istilah lain yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri yakni dapur, pupur, kasur, sumur dan mungkin masih ada akhiran 'ur-ur' yang lain.

Citra, peran dan status perempuan telah diciptakan oleh budaya. Seorang perempuan diidealkan budaya sebagai, antara lain, lemah lembut, penurut, tidak membantah, tidak boleh 'melebihi' laki-laki. Peran di rumah tangga sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut, dan ibu yang 'mrantasi' atau sigap menangani masalah. Sedangkan citra laki-laki, antara lain, 'serba tahu', sebagai panutan harus 'lebih' dari perempuan, rasional, agresif. Peran laki-laki ideal adalah sebagai pencari nafkah keluarga, pelindung, 'mengayomi', sebagai kepala keluarga (Raharjo, 1995).

Perempuan masih dianggap 'warga kelas dua' yang tidak begitu diperhitungkan. Implikasi dari konsep posisi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang telah memisahkan sektor kehidupan 'domestik' dan 'publik'. Perempuan lebih berkiperah dalam sektor domestik sementara laki-laki dalam sektor publik. Ideologi semacam ini telah disyahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran perempuan (Abdullah, 1997).

GENDER DAN KEHUTANAN MASYARAKAT

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan. Berbagai bentuk ketidakadilan gender antara lain marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, sub-ordinasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan stereotipi atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (Fakih, 1999). Kenyataan ini banyak dijumpai di masyarakat desa-desa pinggir hutan. Dari hasil survei Javlec dan sumber-sumber di lapangan terlihat perbedaan aktivitas harian antara laki-laki dan perempuan (Tabel I).

Tabel 1: Beban Kerja Perempuan dan Laki-laki dalam Hari

Perempuan		Laki-laki	
04.00	Bangun tidur, masak air dan masak nasi		
05.00	Mencuci pakaian, mandi dan mandiin anak	05.00	Bangun tidur
06.00	Urusan anak sekolah, Bersih-bersih rumah dan halaman	06.00-	Mandi, memberi makan ternak, bersihkan kandang
07.30-08.00 08.00	Sarapan Mencari rumput, kayu, belanja	07.30 07.30	Sarapan Cari Nafkah
11.30	Masak siang	11.30	Istirahat siang dan makan siang
12.30	Makan siang		
13.30-16.00	Mencangkul, menyiangi rumput, merumput, gembala ternak	12.30	Melanjutkan Cari Nafkah
16.00-19.00	Dawis, masak malam,	17.00-19.00	Masukkan ternak ke kandang, mandi
19.00-19.30	Makan malam	19.00-19.30	Makan malam
19.30-24.00	Mendampingi anak belajar, lipat baju, menunggu suami pulang	19.30-21.00	Nonton TV
		21.00-24.00	Pertemuan kelompok
24.00	tidur	24.00	Tidur

Sumber: Pemetaan Partisipatif Desa di wilayah Pegunungan Menoreh, Tanah Simpen, YBL Masta, 2007

DIRENDAHKANNYA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM ORGANISASI KEHUTANAN

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih rendah. Diperkirakan paling banyak 5% perempuan terlibat dalam organisasi kehutanan. Kondisi ini membuat laju kerusakan hutan semakin meningkat setiap tahun. Kebijakan yang ada sering tidak memikirkan kaum terpinggirkan, termasuk perempuan. Di beberapa tempat di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Malang, kekeringan memaksa ibu-ibu berjalan jauh berkilo-kilo hanya untuk mendapatkan air bersih.

Kaum laki-laki atau para suami mendominasi proses pengambilan keputusan terkait dengan kehutanan masyarakat. Istri di rumah umumnya tidak mengetahui tentang hasil keputusan yang telah diambil oleh organisasi kemasyarakatan. Istri hanya mengetahui soal pembagian sewa lahan garapan dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Istri atau perempuan tidak pernah dilibatkan pada persoalan bagi hasil, masa tanam dan yang terkait dengan perjanjian kerja sama dengan pihak pemerintah. Budaya yang melatarbelakangi perempuan harus menurut suami, perempuan bertugas di belakang tapi ujung-ujungnya perempuanlah yang harus menyelesaikan semua pekerjaan di hutan, dari mulai menanam, memupuk, hingga menyangi bahkan panen palawija.

Kepengurusan organisasi kehutanan juga masih didominasi kaum laki-laki. Pekerjaan terkait hutan masih dipersepsikan sebagai pekerjaan maskulin, termasuk menjaga keamanan hutan, mengangkat kayu, dan lainnya. Waktu rapat atau pertemuan organisasi kehutanan belum berpihak kepada perempuan karena biasanya rata-rata pertemuan/rapat-rapat kelompok tani diadakan malam hari setelah sholat isya atau di atas jam 21.00 malam. Keadaan ini yang terkadang perempuan atau para ibu tidak dibolehkan suami hadir dalam pertemuan-pertemuan

kelompok karena dianggap rentan terhadap isu-isu negatif, seperti pemerkosaan, perselingkuhan, dan kekerasan lain.

Selain itu, kebijakan dalam kehutanan masyarakat belum menyentuh persoalan kesehatan reproduksi ibu dan anak. Perempuan hamil tetap harus melakukan aktifitas perhutanan, seperti menanam, menyangi, mengambil rumput, dan lainnya. Kebiasaan turun temurun tidak memberikan perlakuan khusus bagi kaum ibu atau perempuan.

Minimnya fasilitas kesehatan yang memadai, tidak ada dokter, buruknya kondisi jalan raya dan fasilitas lain di desa-desa pinggir hutan merupakan penyebab tingginya kematian ibu dan anak. Situasi ini banyak terjadi dikarenakan adanya tarik ulur kepentingan para pihak di daerah, sebagai contoh yang banyak muncul misalnya perselisihan akses jalan raya di desa-desa pinggir hutan. Banyak dijumpai akses jalan raya di desa pinggir hutan tidak diperhatikan dan banyak yang rusak berat yang diakibatkan konflik kepentingan dan bukan prioritas utama pembangunan di daerah. Banyak para pihak beranggapan negatif tentang hal ini, ada anggapan jika jalan dipinggir hutan dibangun dengan baik maka akan semakin memperparah kondisi hutan (kasus illegal logging, dll). Selain anggapan-anggapan tersebut juga dimungkinkan penda setempat tidak mengganggu di RAPBD Kabupaten atau Propinsi, karena bukan kewenangan Pemerintah daerah yang harus membangun sarana jalan raya di daerah-daerah pinggir hutan dan seolah-olah lepas tangan dengan menganggap pihak pelaksana kehutanan yang harus memperbaiki fasilitas jalan karena kendaraan berat pengangkut kayu sering melalui jalan raya yang ada. Jika dikonfirmasi ke pihak kehutanan, mereka beralasan bahwa pihak kehutanan kekurangan anggaran dan banyak alasan lainnya.

P E N U T U P

Kesetaraan gender perlu diwujudkan melalui komitmen kuat dan tindakan mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural mulai dari diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia internasional. Semuanya dimulai dari kemauan diri melakukan gerakan transformasi, bukan gerakan balas dendam. Gerakan tersebut berupaya menciptakan hubungan fundamental yang lebih baru dan lebih baik sesama manusia. Perjuangan kesetaraan gender tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Persoalan ketidakadilan gender bukan persoalan kaum laki-laki, melainkan sistem dan struktur dalam masyarakat.

Kesadaran perlu diikuti kemauan membongkar pemahaman diri sendiri dari ketidakadilan yang membelenggu menuju perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Lambat laun ‘ketidakadilan gender’ dapat dikurangi, bahkan diakhiri untuk tujuan kemaslahatan dan penghargaan hak asasi yang paling hakiki.

Tatanan budaya Jawa yang sebenarnya adi luhung jangan dijadikan kambing hitam sebagai penyebab ketidakadilan gender. Javlec akan memulai dari jejaring kecil berusaha memasukkan isu kesetaraan gender ini melalui kebijakan-kebijakan kerjasama (MOU) dengan mensyaratkan adanya kaidah-kaidah kesetaraan gender dalam program-program yang akan diajukan atau dijalankan oleh mitra-mitra di Jawa. Kita berharap agar pranata budaya jangan sampai menghalangi para perempuan berkiprah dan menunjukkan eksistensinya dalam ranah publik. Sehingga antara budaya dan kesetaraan gender dapat berjalan seirama tanpa harus dipertentangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., 1997, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhasin, K., 1996, Menggugat Patriarki, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Fakih, M., 1996, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawati, T., Budaya Jawa dan Kesenjangan Gender , Jurnal Komunikasi Massa, Juli 2007, Vol. 1, No. 1, hal. 25-34.
- Mc Donald, M., E. Sprenger, dan I. Dubel, 1999, Gender dan Perubahan Organisasi, Amsterdam: INSIST dan REMDEC.
- Raharjo, Y., 1995, Gender dan Pembangunan, Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI (PPT-LIPI).
- Sidabalok, H., Keyakinan Sosial Gender dan Ketidakadilan yang Ditimbulkannya, disampaikan dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Dosen Muda UNS, Surakarta, 23-24 Agustus 2006.
- Suharti, R., 1995, Gender dan Permasalahannya, Jakarta: Bul Psikologi.
- YBL Masta, 2007, Pemetaan Partisipatif di Wilayah Pegunungan Menoreh.



Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Desa di Jambi

Artikel 6

Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Desa di Jambi

U L F A H M

YMA (Yayasan Mitra Aksi)

KONDISI PEREMPUAN DESA

Ketidakmampuan perempuan mengatasi permasalahan diri karena stigma negatif yang terbangun di masyarakat, bahwa perempuan lemah dan tergantung terhadap laki-laki. Stigma ini terkait dengan peran-peran perempuan yang dibatasi pada urusan domestik, sehingga muncul anggapan “ *bini sekato laki* ” . Ungkapan ini menganggap seorang istri harus patuh dan taat pada perintah suami. Perempuan diuntut pasif, penurut, dan setia.

Seperti desa-desa di daerah lain, peran ganda dan kerja keras perempuan desa di Jambi terkadang dipandang sebelah mata dan kurang dihargai. Setiap hari pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke humo, berladang, ke kebun sawit atau menyadap karet. Untuk mencapai lokasi itu mereka berjalan cukup jauh melewati hutan dan semak belukar.

Ketidakseimbangan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan ketidakadilan gender berdampak terhadap perbedaan akses sumber daya dan informasi. Ketidakadilan ini menghambat upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

PEREMPUAN DESA YANG TERPINGGIRKAN

Persoalan kesehatan reproduksi perempuan merupakan masalah kompleks. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi menggambarkan tingkat kesadaran hidup sehat yang masih rendah, keterpurukan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai, dan rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada perempuan, termasuk ibu hamil dan bersalin. Pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu atau perempuan desa terbatas pada pemberian informasi dan pelayanan ketika melahirkan dan masa nifas, padahal kebutuhan kesehatan perempuan lebih luas.

Dengan latar belakang di atas, Yayasan Mitra Aksi (YMA) melakukan program pemberdayaan kesehatan dan penguatan hak otonomi perempuan desa dengan kegiatan belajar bersama dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Kegiatan diskusi dan belajar bersama memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti tergambar dalam permasalahan seputar alat kontrasepsi yang sering mereka tanyakan.

Selama ini, ketika mereka memutuskan untuk ber-KB (keluarga berencana) seringkali tidak mendasarkan pada informasi yang jelas. Bidan dan petugas kesehatan sering tidak memberikan informasi yang memadai tentang efek samping alat kontrasepsi. Tak heran, kalau angka kegagalan KB sangat tinggi.

Banyak masalah timbul akibat ketidaktahuan perempuan terhadap masalah diri mereka sendiri. Permasalahan ini dijembatani oleh YMA dengan melakukan kerja lapangan bersama masyarakat, mulai dari menggali persoalan sampai melakukan aksi penyuluhan dan proses-proses pembelajaran kelompok di desa-desa dampingan. Masalah kongkrit di lapangan diangkat menjadi topik diskusi kelompok. Dengan pendekatan ini para ibu mendapatkan penjelasan yang lebih memuaskan.

Pembelajaran di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan bidan desa merupakan kebutuhan dasar, terlebih lagi jika letak desa sangat

jauh dari rumah sakit. Bidan desa menjadi ujung tombak dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Namun sayangnya, bidan seringkali tidak berada di tempat, padahal sakit tidak mengenal waktu.

Bertolak dari kebutuhan itu pulalah, YMA bekerja sama dengan Ford Foundation memberikan beasiswa DIII kebidanan yang siswanya berasal dari desa-desa dampingan yang tidak memiliki bidan atau bidan ada tapi tidak tinggal di lokasi. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak desa dampingan dengan kriteria berasal dari keluarga kurang mampu serta mempunyai keterkaitan ibu sebagai dukun bayi.

Program beasiswa ini diberikan kepada 25 orang siswa terdiri dari 18 orang berasal dari Jambi, 5 orang dari Bengkulu dan 2 orang dari Riau. Mereka semua setelah selesai pendidikan diharuskan kembali untuk mengabdikan bekerja di desanya masing-masing. Saat ini semua yang mendapat beasiswa telah menyelesaikan pendidikan dan bekerja membantu masyarakat desa di tempat mereka berasal. Melalui program beasiswa ini diharapkan didapat bidan yang memahami persoalan kesehatan perempuan desa serta sekaligus memahami budaya dan dapat diterima masyarakat desa. Dengan keberadaan bidan desa, diharapkan kasus-kasus kematian ibu dan anak atau gangguan kesehatan lain dapat teratasi tepat waktu.

PENGUATAN OTONOMI PEREMPUAN DESA

YMA merupakan salah satu lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan, terutama yang menyangkut dengan masalah kesehatan reproduksi. Masalah ini menjadi fokus perhatian program pendampingan YMA di masyarakat pedesaan. Dalam menjalankan peran, YMA mengkhususkan diri pada pengembangan model-model pemberdayaan perempuan dan remaja dengan pengorganisasian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan ekonomi dan kesetaraan gender melalui pendekatan partisipatif dan integratif, dan berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama kaum perempuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan adalah lemahnya posisi tawar mereka dalam pengelolaan dan kontrol atas sumberdaya yang mereka miliki. Upaya meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengelolaan dan kontrol atas sumberdaya dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kaum perempuan melalui kerja-kerja pemberdayaan dan pengorganisasian. Pembelajaran dari program ini adalah tumbuhnya proses belajar bersama antar komunitas perempuan di berbagai wilayah dalam menumbuhkan kesadaran, kepercayaan diri dan sikap kritis dalam meningkatkan kualitas hidup dan posisi tawar terhadap pihak lain.

Selain itu, program pemberdayaan kesehatan reproduksi bagi perempuan pedesaan merupakan kegiatan aksi memberikan akses informasi kepada perempuan desa. Persoalan-persoalan sensitif perempuan yang jarang muncul ke permukaan diangkat menjadi bahan diskusi. Dari proses pembelajaran bersama tersebut, masyarakat, khususnya perempuan, mendapatkan pemahaman dan informasi penting bagi diri sendiri serta bagi keluarga. Aktifitas pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga kaum laki-laki atau suami pun dilibatkan. Dengan demikian, informasi kesehatan tidak hanya diketahui oleh perempuan saja.

PERUBAHAN PASCA “BERSENTUHAN” DENGAN G-HELP

Sebagai salah satu mitra Ford Foundation, YMA berterima kasih sekali kepada G-help atas kerjasamanya dengan mitra lain dalam mengembangkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam upaya pemberdayaan perempuan, pembangunan kesehatan, dan pelestarian lingkungan. YMA juga berterima kasih kepada G-help atas pelatihan analisis dan pengembangan program berperspektif gender, serta pelatihan pengembangan *database* kegiatan monitoring dan evaluasi program. Kami terutama terkesan dan banyak mendapat manfaat dari proses

lokakarya lapangan mengungkap keterkaitan masalah gender, kesehatan dan lingkungan di kampung Pending dan Gunung Kidul.

Kami semakin menyadari bahwa masalah kesehatan mempengaruhi dan dipengaruhi masalah lingkungan. Selama ini kami menempatkan program kesehatan reproduksi dan gender hanya sebagai perspektif, tetapi setelah saya mengikuti lokakarya lapangan kami mendapatkan pemahaman baru bahwa mengangkat satu masalah tidak cukup hanya ditimbang dari satu sisi saja.

Kesan lain yang tidak pernah kami lupakan ketika lokakarya lapangan di kampung Pending adalah ketika membahas akar dan pohon masalah. Ternyata, apa yang kita anggap masalah belum tentu menjadi masalah. Jadi, perlu ketajaman analisis untuk mengatakan suatu masalah benar-benar suatu masalah. Akhirnya, kami berharap dapat menerjemahkan pemahaman baru yang kami dapat dalam melaksanakan program mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, NH, Unmet Need dalam Keluarga Berencana, Desember 2007, Factsheet G-help, http://web.ghelp.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=33, accessed 10 Augst 2009.
- Dinas Kesehatan Propinsi Jambi, 2007, Profil Kesehatan Propinsi Jambi Tahun 2007.
- Hidayana, Irwan M., 2004, Seksualitas: Teori dan Realitas, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas Fisip UI.
- YMA (Yayasan Mitra Aksi), 2003, Laporan Proses Pembelajaran Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Pedesaan.



Perempuan Petani:
Entitas Terlupakan
dalam Program
Pemberdayaan
Masyarakat Petani
di Solo

Artikel 7

Perempuan Petani: Entitas Terlupakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Petani di Solo

HALELUYA GIRI RAHMASIH

YDA (Yayasan Duta Awam)

PENDAHULUAN

YDA (Yayasan Duta Awam) Solo telah melakukan kegiatan bersama petani di banyak tempat di Indonesia. Selain di 6 Kabupaten eks Karesidenan Surakarta dan Kabupaten Grobogan, juga di Propinsi Riau, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan. Berbagai wilayah ini memiliki kondisi dan budaya yang berbeda, sehingga menuntut pendekatan yang berbeda pula.

Di wilayah krisis air, petani menggantungkan diri pada air hujan, dan ketika musim kemarau petani harus berjalan jauh untuk mendapatkan air atau membeli air dengan harga mahal. Mereka selalu berhadapan dengan wabah muntaber, penyakit kulit, dan semacamnya. Di pihak lain, mereka tak memiliki banyak informasi tentang kesehatan,

dihadapkan pada biaya kesehatan yang mahal, tempat pelayanan kesehatan yang jauh, dan keterbatasan tenaga kesehatan.

Di bidang keterampilan kerja, pengetahuan dan keterampilan di luar budidaya pertanian sangat rendah. Ketiadaan penyuluh lapangan membuat penguasaan mereka tentang budidaya tanaman hanyalah pengetahuan turun temurun dan dari kebiasaan setempat. Keadaan ini memperburuk kehidupan masyarakat petani yang sudah memprihatinkan.

PEMINGGIRAN PEREMPUAN

Pihak yang paling terimbas dampak persoalan di atas adalah perempuan. Ibaratnya perempuan adalah warga negara kelas dua yang menerima pelayanan kelas dua pula. Pengambil kebijakan memandang masyarakat petani hanya sebagai kumpulan laki-laki ketimbang laki-laki dan perempuan. Peminggiran juga dilakukan melalui tidak diakuinya pekerjaan perempuan petani sebagai sebuah pekerjaan yang tercatat sah dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam KTP, pekerjaan perempuan petani ditulis sebagai ibu rumah tangga saja. Kebijakan pertanian negeri ini tidak banyak menyinggung perempuan petani sebagai sebuah entitas potensial yang perlu diberdayakan. Dampaknya, perempuan petani tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan peningkatan kapasitas produksi pertanian (informasi, teknologi dan pelatihan), kredit, dan lahan.

Dalam musyawarah pembangunan desa dan pertanian, perempuan tidak pernah dilibatkan. Hanya kepala keluarga – yang umumnya laki-laki – yang diundang musyawarah. Perempuan dilibatkan hanya dalam aktivitas domestik, termasuk peningkatan keterampilan pun hanya pada sektor-sektor yang sangat domestik melalui kegiatan dasa wisma ataupun PKK.

Dalam pola pengambilan keputusan keluarga, laki-laki juga lebih dominan daripada perempuan. Perempuan akan patuh dengan keputusan

yang diambil oleh suami ataupun ayah mereka. Tanpa disadari, peminggiran perempuan ini juga telah dilakukan oleh YDA Solo. Misalnya, ketika YDA mengundang mitra – dalam hal ini petani—untuk kegiatan bersama, diantara 30 peserta, petani perempuan tak lebih dari 2-3 orang saja, dan tidak diberikan perhatian khusus kepada para peserta perempuan.

FAKTA TENTANG PEREMPUAN PETANI

Peminggiran perempuan petani berlawanan dengan fakta tanggung jawab mereka. Menurut FAO (*Food and Agricultural Organization*), perempuan petani di negara berkembang bertanggung-jawab terhadap 60 - 80% produksi pangan. Di wilayah Asia Tenggara, 90 % perempuan petani ikut bertanam padi. Aktivitas perempuan petani dimulai saat laki-laki belum bangun dan diakhiri saat laki-laki sudah tidur. Dalam penelitian yang pernah dilakukan YDA pada petani dalam proyek ISDP (*Integrated Swamp Development Project*) di Riau, 1999, menunjukkan bahwa perempuan petani bekerja lebih banyak (jenis) dan lebih lama (kuantitas) daripada laki-laki, karena perempuan petani mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus pekerjaan di lahan.

PERUBAHAN PARADIGMA

Sebagai sebuah lembaga yang memimpikan terwujudnya masyarakat petani yang kritis dan mandiri dalam pemecahan masalah dan pemenuhan hak-hak petani, YDA Solo berupaya memberikan pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat petani melalui pelatihan, pendidikan kritis, advokasi dan edukasi, penelitian, pengorganisasian, dan pengembangan wacana publik. Hingga tahun 2006, isu gender belum secara sadar dimasukkan dalam spirit kerja tiap personil dan program yang dikembangkan. Dalam lokakarya pembuatan rencana strategik, YDA Solo memandang perlunya

memberikan perhatian kepada keluarga petani yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak petani. Petani tidak dianggap melulu sebagai petani laki-laki tetapi sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak, perempuan dan laki-laki.

Perubahan dikuatkan dengan kehadiran G-help yang memberikan pencerahan tentang banyak hal yang berhubungan dengan analisis gender. Paradigma gender mulai dipahami sebagai pendekatan mencapai keadilan bagi laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan perbedaan laki-laki dan perempuan, dan bukan sekedar mencapai kesetaraan. Kemudian pengenalan YDA Solo dengan analisis peran, akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan mempermudah dalam membedah suatu masalah yang berkaitan dengan gender.

Sekarang ini YDA Solo mulai memberi porsi lebih besar bagi keterlibatan perempuan dalam aktivitas proyek/program. Personil YDA Solo juga mulai memasukkan wacana gender dalam diskusi informal bersama petani. Sebagai wujud komitmen dalam pelibatan perempuan, YDA Solo juga melakukan perbedaan strategi dan pendekatan dalam pengorganisasian kegiatan.

INTERVENSI DALAM PROYEK *Village Capacity Building* (2005 – 2007)

Program ini didahului dengan pembuatan rencana strategis desa oleh perwakilan komponen masyarakat, yaitu pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, perempuan, kader kesehatan, guru, dan lainnya. Pelibatan perempuan dalam kegiatan dioptimalkan untuk bisa menyuarakan permasalahan mereka dan memberikan tawaran solusi.

Di salah satu desa, yaitu Desa Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, di kaki gunung Merapi, ada beberapa terobosan perbaikan kesehatan masyarakat, terutama perempuan, yaitu:

- ❖ **Penyediaan sumber daya air**

Posisi desa ini yang jauh diatas sumber air mengakibatkan kesulitan, terutama kaum perempuan, dalam mengakses air. Di musim hujan, penduduk desa menampung air hujan, dan di musim kemarau harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan air. Kesulitan ini diatasi dengan pembangunan pompa air dengan kekuatan tertentu agar mampu mengalirkan air dari sumber ke desa. Kegiatan yang difasilitasi YDA Solo ini berhasil menjawab kesulitan sumber daya air di desa tersebut.

- ❖ **Optimalisasi bidan desa**

Bidan desa yang tidak bersedia tinggal di desa tersebut, tapi tinggal di kota kecamatan, menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Permasalahan ini diatasi dengan melakukan pendekatan persuasif kepada bidan desa agar bersedia tinggal dan melayani di desa.

Program yang sama di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat mendapat dukungan dari banyak kader desa yang umumnya perempuan. Para kader ini pula yang kemudian memunculkan banyak gagasan yang kemudian difasilitasi oleh YDA Solo, diantaranya ialah pelatihan kader kesehatan, pembentukan Posyandu Lansia dan pengadaan Senam Lansia, serta pendirian Bank Obat di tiap dusun.

INTERVENSI DALAM PROYEK RAED (2004 – 2008)

Dalam program *Rural Agro Enterprises Development* (RAED) di Desa Bade, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, intervensi dalam bentuk peningkatan keterampilan masyarakat desa, terutama kaum ibu dalam

pengolahan pasca panen. Kegiatan ini menjawab murahnya harga panen *empon-empon* di desa tersebut. Dengan pelatihan membuat simplisia kencur dan kencur instant diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Di desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, misalnya, kaum perempuan dilatih meningkatkan nilai tambah wortel menjadi wortel *instant* dan *muffin* wortel. Pelatihan didasari fakta bahwa saat musim panen raya, wortel dihargai sangat rendah. Hingga saat ini, wortel *instant* telah menjadi salah satu produksi andalan kelompok tani disana dan telah didistribusikan ke banyak kota di Indonesia.

INTERVENSI DALAM PROYEK AVIAN INFLUENZA (2006 – 2009)

Dalam Proyek Peningkatan Kewaspadaan terhadap Serangan *Avian Influenza* (AI), YDA mampu menjangkau 30% keterlibatan perempuan dalam seluruh kegiatan. Kegiatan ini meliputi pelatihan kader kesehatan desa untuk kampanye dan sosialisasi kewaspadaan terhadap Avian Influenza, pelatihan vaksinasi, dan berbagai aktivitas membuat peringatan dini terhadap bahaya AI. Dalam proyek ini wacana perempuan, kesehatan dan lingkungan terlihat sangat nyata. Perempuan berperan dominan menjaga kesehatan, selaras dengan upaya mewujudkan lingkungan yang baik dan bersih.

GENDER, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

Keterkaitan antara gender, kesehatan dan lingkungan menjadi wacana penting dalam pengembangan program YDA Solo untuk pembangunan pertanian dan perdesaan. Para staf YDA Solo semakin memahami keterkaitan tersebut, dan menerapkan pemahaman ini dalam program.

PEMBELAJARAN BAGI YDA SOLO

Dari berbagai intervensi yang telah dilakukan, ada beberapa pembelajaran:

1. YDA Solo bukan lembaga yang khusus menangani perempuan, namun pemberdayaan perempuan petani merupakan keniscayaan untuk tujuan yang lebih besar.
2. Menempatkan paradigma berperspektif gender bukan hal yang mudah, keberhasilan penerapan membutuhkan komitmen tinggi, waktu, tenaga dan pikiran.
3. Melibatkan perempuan dalam setiap aktivitas proyek merupakan pilihan pragmatis yang bisa dilakukan ketimbang memberikan pendidikan gender secara khusus. Telah terbukti jika perempuan diberikan akses informasi dan keterampilan, mereka mampu berdaya guna dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A.B., Laporan Proyek Market Access/RAED 2004 – 2008, Solo: Yayasan Duta Awam.
- Factsheet G-help, Gender, Pertanian, dan Pembangunan, 24 July 2008, http://web.ghelp.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=33, accessed 18 May 2009
- Harjanto, P.S., Laporan Proyek Membangun Kesadaran akan Bahaya Avian Influenza, 2006 – 2009, Solo: Yayasan Duta Awam.
- Petani Perempuan: Pandangan dan Sikap Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) terhadap Perjuangan Keadilan Gender, 6 Oktober 2005, http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=37, accessed 18 May 2009
- Riza, M., 2006, Laporan Lokakarya Perencanaan Strategis Lembaga, Solo: Yayasan Duta Awam.
- Zainury, H., Laporan Proyek Village Capacity Building 2005-2007, Solo: Yayasan Duta Awam.



Penguatan
Ulama Perempuan untuk
Penguatan Hak-hak
Perempuan

Artikel 8

Penguatan Ulama Perempuan untuk Penguatan Hak-hak Perempuan

NUR ACHMAD

Yayasan Rahima

L A T A R B E L A K A N G

Ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih marak terjadi. Salah satu faktor pelestari masalah ini adalah pemahaman agama yang bias. Agama masih sering dipahami dengan menyampingkan prinsip dasar kehadiran agama, seperti prinsip kesederajatan manusia, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan pembelaan terhadap mereka yang dilemahkan. Tanpa prinsip-prinsip dasar ini, agama tidak bisa melakukan perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik.

Pada masa awal Islam, wahyu Allah banyak mengecam kehidupan masyarakat yang timpang, tidak adil, dan cenderung berlaku hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, dan sebagainya. Kaum perempuan kebanyakan menjadi korban ketidakadilan tersebut. Mereka dibunuh hidup-hidup sejak bayi, diperbudak, dipaksa menikah, dijadikan gundik tanpa nasib yang jelas,

dipaksa melacur, tidak berhak mendapat warisan dan bahkan diwariskan secara paksa oleh keluarga suaminya yang telah meninggal, dan masih banyak lagi fenomena pahit lainnya.

Islam hadir untuk memerdekakan manusia dari segala ketertindasan (kegelapan) menuju kehidupan merdeka lahir-batin di bawah naungan cahaya (nur) Ilahi. Inilah yang dilukiskan Al Quran sebagai misi *Li tukhrijan-nas minaz-zulumati ilan-nur*, pembebasan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya (QS. Ibrahim: 1). Jika Islam dan misi nabi adalah pembebasan manusia dari ketidakadilan dan diskriminasi, maka semua pemahaman dan perjuangan agama hendaknya mengarah pada penegakan keadilan dan pencegahan ketidakadilan.

Untuk dapat melakukan langkah mulia memperjuangkan keadilan sosial, dan tentunya keadilan relasi laki-laki dan perempuan, dibutuhkan tidak saja pemahaman agama yang benar dan selaras dengan visi *rahmatan lil 'alamin* (menebarkan kasih sayang bagi semua penghuni alam raya), tetapi juga ahli-ahli agama (baca: ulama) yang berpihak pada pembelaan dan penguatan nilai keadilan dan kesetaraan, serta anti kekerasan. Ahli-ahli agama (ulama) yang banyak mendominasi wacana keagamaan adalah dari kalangan laki-laki. Banyak diantara mereka yang tidak memiliki cara pandang pembelaan dan penguatan terhadap hak-hak perempuan sehingga dalam membuat keputusan hukum atau pemahaman keagamaan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Walaupun tidak semua ulama laki-laki demikian adanya. Artinya, ada sedikit yang masih peduli dengan melakukan pembelaan terhadap perempuan sebagaimana misi Nabi yang secara jelas menegaskan hal itu.

Pada masa awal Islam, tampak sekali peran ulama perempuan, seperti Aisyah binti Abi Bakar, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Hafshah binti 'Umar, dan Asma' binti Abi Bakar, Ramlah binti Abi Sufyan, dan Ramlah binti Qais. Mereka adalah sahabiyat Nabi dan

sebagian lagi istri Nabi yang menjadi rujukan dan guru bagi para sahabat laki-laki dan juga perempuan. Menurut al-Dzahabi, lebih dari 160 ulama laki-laki terkemuka berguru kepada Aisyah istri Nabi yang mahir dalam tafsir, hadis, dan juga fikih (Muhammad, Desember 2007:19).

Dalam bidang tasawuf, Abu ‘Abdirrahman al-Sulami (W. 412 H), mengungkapkan banyak sekali ulama sufi dan ahli ibadah. Menariknya, 104 di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 83 di antaranya adalah berjenis kelamin perempuan, salah satunya adalah Rabi’ah al-‘Adawiyyah yang dikenal dengan konsep Mahabbah (Cinta kepada Allah) (Al-Sulami, Abu ‘Abdirrahman, 2003:387).

Namun dalam perkembangan lanjut, jumlah ulama perempuan semakin hilang dalam pentas sejarah. Sebagai ilustrasi, Prof. Mani’ ‘Abdul Halim Mahmud menulis dalam buku *Manhajul-mufasssirin* yang mengetengahkan kajian metodologi yang digunakan oleh 52 ahli tafsir. Sayangnya, dari 52 ahli tafsir yang diungkap, tidak dijumpai satupun ahli tafsir (ulama tafsir) yang berjenis kelamin perempuan. Pemandangan yang sama terjadi dalam bidang kajian fikih (hukum) dan hadis Nabi yang hampir semuanya dipenuhi ulama laki-laki. Para imam (pendiri dan pemimpin) madzhab dalam hukum Islam adalah ulama laki-laki, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal (keempatnya dari kalangan muslim Sunni), serta Imam Ja’far (dari kalangan muslim Syi’i). Semuanya berjenis laki-laki. Belum ada imam madzhab yang perempuan. Karenanya dibutuhkan ulama yang berperspektif keadilan dan kesetaraan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya kebutuhan ini diisi oleh ulama perempuan dalam jumlah yang tidak terlalu jauh beda dengan jumlah ulama laki-laki.

MENGAPA ULAMA PEREMPUAN?

Tentu ini tidak berarti bahwa ulama laki-laki tidak dibutuhkan lagi. Keduanya sangat dibutuhkan dan diharapkan saling bekerjasama bahu-

membahu dalam penguatan hak-hak manusia dan khususnya hak perempuan yang sering terlupakan dan terpinggirkan. Kehadiran ulama perempuan dinilai penting dan mendesak guna meluruskan pemahaman atau tradisi yang tidak menghargai perempuan. Ada satu kejadian, ketika Abu Hurairah meriwayatkan secara tidak lengkap hadis yang menurutnya dari Nabi SAW.: “Kesialan itu karena rumah, perempuan, dan kuda.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi dari Abi Hurairah). Ketika riwayat ini terdengar oleh Aisyah RA, ia langsung menolaknya dan menyatakan bahwa Abu Hurairah tidak lengkap mendengar hadis tersebut dari Nabi karena datang ke majelis Nabi terlambat. Selengkapnyanya, Nabi bersabda bahwa penduduk Jahiliyah dan kaum Yahudi lah yang berpandangan negatif demikian terhadap perempuan. Jadi bukan pernyataan Nabi sendiri (Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 1983:122-123).

Aisyah RA. menyikapi secara kritis riwayat Abu Hurairah karena kecermatan dan kehebatan beliau dalam mengingat sesuatu serta memiliki sensitivitas terhadap masalah perempuan. Seandainya riwayat tersebut ditelan mentah-mentah, tidak ditolak oleh Aisyah, maka akan menimbulkan pandangan yang keliru terhadap perempuan bahwa perempuan merupakan sumber kesialan. Di sinilah letak pentingnya ulama perempuan.

Kelangkaan ulama perempuan terjadi di seluruh dunia muslim, tak terkecuali di Indonesia. Di jajaran ulama yang diakui dalam organisasi-organisasi Islam yang *mainstream* (Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan juga Majelis Ulama Indonesia), eksistensi dan peran ulama perempuan dapat dikatakan sangat sedikit, untuk tidak dikatakan tidak ada. Jika ada, peran mereka tidaklah signifikan sebagaimana ulama laki-laki. Karenanya, bisa dipahami jika muncul fatwa-fatwa keagamaan yang tidak memiliki sensitivitas terhadap masalah perempuan atau tidak memberi dukungan atas hak-hak perempuan yang sering terabaikan. Pandangan keagamaan tentang

hamil, keluarga berencana, aborsi, kerja di ranah publik dan sebagainya tidak menekankan pada perlindungan hak-hak perempuan. Ini terjadi karena para ulama kurang sensitif terhadap hak-hak perempuan.

Salah satu contoh riil, sekitar Bulan Nopember 2006, penulis pernah berdialog dengan seorang ustadz di suatu desa di kawasan Pegunungan Halimun Bogor. Dalam dialog tersebut, penulis bertanya tentang hukumnya Keluarga Berencana. Sang Ustadz yang sering berceramah di masjid-masjid di desanya ini menjawab bahwa hukum KB haram (terlarang, dosa jika dikerjakan), setidaknya makruh (tidak disukai, berpahala jika ditinggalkan). Pendapat tersebut muncul didasari oleh pemahaman tekstual terhadap dalil-dalil agama, tanpa menangkap pesan moral yang ada dan tanpa melihat kondisi riil suatu masyarakat (sosial-ekonomi) atau kondisi fisik dan psikis yang dialami perempuan yang merasakan langsung hamil, melahirkan, dan menyusui.

Contoh-contoh lain dapat dilihat dalam pandangan keagamaan yang dihasilkan oleh ulama laki-laki yang tidak sensitif ini dalam menetapkan hak dan kewajiban perempuan di rumah tangga atau perempuan di ranah publik. Hampir dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama model ini sangat membatasi hak-hak dan aktivitas perempuan, misalnya perempuan sebaiknya di rumah saja, perempuan harus ditutup rapat jika keluar rumah, perempuan harus mau diperintah oleh suaminya tanpa menolaknya, perempuan dapat dipaksa menikah, dan sebagainya. Ini semua muncul akibat ulama (laki-laki dan juga perempuan) tidak peka terhadap prinsip kesederajatan manusia di hadapan Tuhan atau memahami teks-teks agama secara tekstual dan parsial.

Atas dasar inilah, Yayasan Rahima yang lahir pada bulan Agustus 2000 di Jakarta bertekad melakukan kajian-kajian untuk penguatan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Banyak kegiatan dilakukan, di samping sejumlah media juga digunakan. Salah satunya adalah dengan melakukan Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) secara formal di

tahun 2005-2006. Dan kegiatan tersebut diadakan kembali untuk angkatan kedua pada tahun 2008-2009 ini. Melalui kegiatan PUP, Rahima berharap semakin banyak kader ulama perempuan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama dengan perspektif keadilan dan sekaligus mampu menganalisis problem sosial yang dihadapi perempuan di komunitasnya serta mampu melakukan advokasi untuk mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan.

UPAYA PENGUATAN PENGKADERAN ULAMA PEREMPUAN

Dalam PUP, para kader ulama perempuan yang berusia antara 20-45 tahun yang direkrut tersebar di kawasan Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Pada PUP angkatan pertama, 15 peserta dari Jawa Barat dan 15 peserta lain dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan pada PUP Angkatan Kedua semua peserta berjumlah 25 orang berasal dari kawasan Jawa Barat, termasuk Cirebon, Bandung, Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi dan Depok.

Mereka dilatih dalam serangkaian proses kelas-lapangan-kelas. Sedikitnya disediakan 5 pertemuan berseri dengan jarak sekitar 2-3 bulan. Di waktu jeda 2-3 bulan tersebut, peserta diberikan tugas lapangan dengan melakukan pengamatan dan analisis terhadap realitas sosial yang terjadi di komunitas masing-masing. Tugas lapangan ini untuk mengasah ketajaman peserta dalam melihat realitas perempuan dengan metodologi analisis sosial yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Hasil pengamatan lapangan dipresentasikan dalam pertemuan terjadwal selanjutnya.

Materi-materi yang dikaji bersama dalam 5 seri pertemuan tersebut adalah: (1). Penguatan Perspektif Kesetaraan Relasi Perempuan dan Laki-laki; (2). Penguatan wawasan tentang Perubahan Sosial; (3). Penguatan Analisis Sosial yang berusaha menguatkan keterampilan analisis sosial dan kajian kritis isu globalisasi; (4). Metodologi Kajian

Islam yang Berperspektif Keadilan dan Kajian Tematik Masalah-masalah Relasi Perempuan dan Laki-laki; dan (5). Pengorganisasian Komunitas dan Dakwah Transformatif yang menguatkan peserta dalam hal pendampingan komunitas.

Selain itu para peserta juga didorong untuk berlatih menuangkan gagasan yang diperoleh selama mengikuti PUP ke dalam tulisan-tulisan, baik populer dalam Majalah Swara Rahima maupun yang agak serius dalam Suplemen Swara Rahima. Sejumlah alumni PUP dengan fasilitasi Rahima telah membuktikan dirinya mampu menulis dengan baik di berbagai media. Beberapa di antara tulisan alumni PUP: Nyai Hj. Afwah Mumtazah dan Ustadzah Yulianti Muthmainnah berjudul 'Menimbang Kehamilan Tak Diinginkan Perspektif Islam dan Hukum Positif (Mumtazah dan Yulianti Muthmainnah, April 2007); Nur Qomariyah berjudul Kawin Kontrak, Dilarang tapi Marak (Qomariyah dan Nur Achmad, Agustus 2007); Ustadzah Pera Sopariyanti menulis Menilai Kawin Paksa, Perspektif Fikih dan Perlindungan Anak (Sopariyanti, Desember 2008); Ustadzah Lia Aliyah menulis Kesaksian Perempuan, Benarkah Separuh laki-laki (El-Himmah, Juli 2008). Selain itu, Nyai Hj. Afwah Mumtazah dan Nyai Hj. Luluk Farida telah menjadi kontributor naskah buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab (Achmad dan Lely Nurohmah, April 2008).

ULAMA PEREMPUAN PENDAMPING MASYARAKAT

Selain mengkader Ulama Perempuan yang aktivis dan bisa menulis, Rahima juga menguatkan peran pendampingan masyarakat. Salah satunya adalah Nyai Hj. Raihanah Faqih (Pengurus Muslimat Kabupaten Kediri Jawa Timur dan Pengasuh Pesantren) yang terus berceramah keliling untuk sosialisasi kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan perspektif Islam di berbagai forum. Nyai Hj. Afwah Mumtazah (Pengasuh Pesantren Kempek Buntet Cirebon) yang melakukan pengembangan kurikulum pesantren sehingga lebih sensitif pada hak-

hak perempuan, juga telah membuka akses santri-santri (siswi pesantren) untuk mempelajari kitab-kitab tertentu yang selama ini tidak boleh dibaca santri perempuan. Selain itu Nyai Ruqayyah Ma'shum (Bondowoso), Nyai Luluk Farida (Jombang), dan masih banyak alumni lainnya yang menjadi kader sosialisasi dan pembelaan hak-hak perempuan di masyarakatnya, misalnya melakukan pembelaan perempuan korban kekerasan, menjelaskan tentang praktik perdagangan perempuan (*trafficking*) ke luar negeri, dan konsultasi keluarga sakinah perspektif kesetaraan/keadilan. Begitupula yang dilakukan oleh Najmatul Millah (Jember) yang melakukan sosialisasi kesetaraan di lingkungan pesantren keluarganya dan bahkan memasukkan ke dalam kurikulum di sekolah formal yang dipimpinnya. Luar biasa, kader-kader ini walaupun berusia muda, bahkan telah berkeluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil, namun memiliki semangat yang hebat dalam membela hak-hak perempuan di komunitasnya.

Hal-hal di atas merupakan sekelumit kisah yang dialami oleh para alumni PUP di sejumlah daerah dan komunitas (pesantren, madrasah, majelis taklim, dan juga masyarakat umum). Rahima senantiasa berharap para alumni PUP yang telah belajar bersama dalam 5 seri pelatihan tersebut dapat mengembangkannya lebih lanjut di komunitas masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan kisah-kisah menarik tersebut, banyak pihak menyarankan kepada Rahima untuk mengembangkan Program PUP ini. Pada Tahun 2008 dibukalah pendaftaran PUP Angkatan kedua untuk kawasan Jawa Barat. Di bulan Desember 2008, sebanyak 30 an calon peserta diseleksi untuk dapat mengikuti PUP angkatan kedua, selain peserta khusus tanpa tes yang direkomendir oleh tim penguji. Berkumpullah sekitar 25 peserta yang kemudian menjadi peserta PUP angkatan kedua.

Sedikit yang membedakan antara PUP I dengan PUP II adalah penekanannya pada penguasaan dan pembahasan kitab-kitab keislaman (Fikih, Tafsir, dan Hadis). Dalam PUP II ini, peserta dilatih secara khusus

keterampilan melakukan Bahsul Masail (Kajian Pembahasan Masalah-masalah) keislaman terkait isu-isu perempuan. Bahsul Masail ini diadaptasi dari pengalaman organisasi keislaman mainstream, Nahdhatul Ulama. Dengan mendalami metodologi Bahsul Masail ini, peserta diharapkan tidak “gagap” ketika berdiskusi dan merumuskan jawaban atas masalah-masalah yang dialami perempuan di tanah air dengan perspektif kesetaraan dan Islam. Selain ini, kurikulum masih merupakan pengembangan kurikulum PUP angkatan pertama. Kegiatan PUP angkatan kedua ini berlangsung di jelang pertemuan keempat yang membahas Agama dan Perubahan Sosial di Cirebon akhir Juli 2009.

KONTRIBUSI KAJIAN-KAJIAN DALAM FORUM G-HELP DAN REFLEKSI PEMBELAJARAN

Rahima menyadari bahwa forum G-help (Gender Health Environmental Linkages Programme) pada pertengahan tahun 2007 telah ikut memperkaya staf-staf Rahima yang terlibat aktif di dalamnya. Salah satunya adalah penguatan jaringan dengan lembaga-lembaga yang memiliki misi dan gerak di isu gender, kesehatan dan lingkungan. Selama ini, sebagian masih menganggap bahwa ketiga tema tersebut kaitannya agak berjauhan. Namun setelah mengkaji mendalam di forum G-help, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan ketiga isu tersebut sangatlah dekat. Pemahaman gender yang keliru akan berdampak pada tingkat kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Kesehatan yang baik juga sulit diwujudkan dalam kondisi lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika melakukan Studi Halimun, khususnya di Kampung Nyuncung, Desa Malasari, tampak bahwa ketiga isu tersebut saling terkait. Karena lingkungan yang kurang baik dan sehat, ditambah pemahaman keagamaan yang tidak sensitif gender, maka kesehatan masyarakat, khususnya bayi, anak-anak, dan perempuan menjadi menurun. Pembangunan desa menjadi terhambat.

Akses layanan pendidikan formal, yakni Sekolah Dasar dan Menengah, dan akses layanan kesehatan (Puskesmas dan Klinik) dan tenaga medis (Bidan atau dokter) sulit dijangkau karena jarak yang sangat jauh, medan yang sulit, dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas. Hal-hal tersebut menghambat perkembangan masyarakat di kawasan Kampung Nyuncung Bogor. Pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi tertinggal. Mayoritas anak-anak hanya bersekolah dasar (SD). Sedangkan anak perempuan lebih banyak yang tidak lulus SD dan menjalani nikah dini, cerai dini, dan kemudian banyak yang terlantar secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini menjadi bahan diskusi internal di Rahima dan penulis semakin terdorong untuk memasukkan Materi Kesehatan Reproduksi dalam kegiatan PUP angkatan kedua dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Selain itu, diskusi-diskusi pemetaan masalah dalam Studi Halimun sangat membantu penulis dalam melihat secara mendalam suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Dari pendalaman atas suatu masalah dapat dirumuskan program yang jelas dan diharapkan berjalan efektif karena didasarkan pada analisis masalah yang mendalam. Ini tentu sangat berguna, khususnya bagi peserta Studi Halimun.

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DITEMUKAN DAN SOLUSINYA

Masalah ketimpangan gender bukanlah masalah sederhana. Ia banyak berkait dan terkait dengan masalah-masalah lainnya. Budaya yang cenderung patriarki, kehidupan ekonomi yang rendah atau pas-pasan, paham agama yang tidak ramah perempuan turut menjadi faktor penghambat tercapainya kehidupan yang adil dan sehat. Hal-hal demikian tidak jarang ditemukan dalam suatu masyarakat dampingan Rahima. Hambatan-hambatan tersebut seringkali diperberat dengan minimnya SDM yang menguasai disiplin kajian keislaman dan sekaligus

memahami masalah-masalah sosial seperti wacana gender, HAM, kesehatan reproduksi, dan sebagainya.

Melihat model masyarakat Indonesia yang masih cenderung paternalistik dan mengikuti pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh informal, seperti tokoh agama atau ulama, maka Rahima berupaya memperkuat kapasitas dan menambah ketersediaan ulama perempuan yang menguasai ilmu-ilmu agama dengan baik sekaligus mampu menjadi kader perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan serta lebih memperhatikan hak dan kesehatan reproduksi. Ini adalah proses panjang yang tidak bisa dilakukan secara sambilan dan dengan hanya menunggu berubahnya nasib. Diperlukan sejumlah langkah untuk mengatasinya. Di antaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh Rahima sebagai berikut.

Selain kegiatan Pengkaderan Ulama Perempuan yang telah diungkapkan di atas, Rahima dengan segenap kelebihan dan kekurangannya juga telah berupaya maksimal untuk mendampingi mitra-mitranya dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh perempuan, anak-anak, dan juga tanpa mengabaikan hak-hak laki-laki. Rahima telah melakukan sejumlah kegiatan seperti workshop untuk Tokoh-tokoh Islam di tingkat lokal (di kawasan Garut-Tasikmalaya-Cianjur tahun 2008, kawasan Serang-Pandeglang-Tangerang tahun 2008, kawasan Sumenep-Pamekasan-Sampang (2008-2009), dan kawasan Jombang-Lamonga-Kediri tahun 2009); Penguatan Guru-guru Agama Islam di sekolah negeri di Jember tahun 2006-2007 dan di Bondowoso tahun 2008-2009; Penguatan aktivis mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan berbasis Islam (HMI-IMM-PMII di Jakarta-Bogor-Depok) tahun 2006-2007, dan sebagainya.

Rahima juga terus menyebarkan media-media cetak, baik majalah Swara Rahima berbagai tema yang kini telah sampai di edisi 27 (April 2009) berikut Suplemen atau buku sakunya; buku-buku seputar kajian Islam dan hak-hak perempuan seperti: buku Bergerak Membela

Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan karya Ustadz Faqihuddin Abdulkodir, MA. (Rahima: 2006); Buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA/SMK bekerjasama dengan Pesantren Nurul Islam Jember (Rahima: 2007 dan 2009); Umat Bertanya Ulama Menjawab (Rahima: 2008); Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri (Rahima: 2008); dan buku kumpulan cerpen di Suara Rahima berjudul Perawan (Rahima: 2009) serta kumpulan tulisan tafsir tematik tentang hak-hak perempuan dalam Al Quran di Majalah Suara Rahima oleh KH. Husein Muhammad (Rahima: 2009). Selain itu Rahima juga menerbitkan lembaran-lembaran (buletin) Jumat yang terbit bulanan. Tambahan lagi, terbitan-terbitan Rahima, yang sebagiannya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, dapat juga diakses melalui website: www.rahima.or.id.

Tidak puas dengan satu pendekatan kajian yang bersifat ilmiah, Rahima juga menggunakan pendekatan kebudayaan, yakni menggunakan media Shalawat Kesetaraan untuk menyebarkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia dan sederajat. Kedua jenis kelamin tersebut tercipta untuk bekerjasama membangun kehidupan yang adil dan ramah. Demikian inti pesan dalam senandung Shalawat Kesetaraan versi Rahima. Shalawat ini disosialisasikan di komunitas pesantren, majelis taklim, sekolah, dan sebagainya. Pernah juga diselenggarakan Festival Shalawat Kesetaraan di Jember (2005 dan 2007), di Garut 2007, dan ke depan gerakan kebudayaan ini masih terus akan dilakukan Rahima.

P E N U T U P

Rahima telah berijtihad untuk menguatkan hak-hak perempuan dan berupaya membangun kehidupan yang adil dan ramah bagi laki-laki dan perempuan melalui berbagai langkah dan media. Apa yang telah dan akan terus dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat yang

memiliki visi pemberdayaan perempuan ini diharapkan dapat bersama mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, lebih menghargai kemajemukan yang ada, dan tentunya lebih menjunjung tinggi nilai moral agama yang pada dasarnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkodir, F., 2006, Bergerak Membela Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan, Rahima.
- Achmad, N. dan Lely Nurohmah (ed.), 2008, Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan, dan Keluarga, Rahima.
- Al-Sulami, Abu 'Abdirrahman, 2003, *Tabaqat al-Sufiyyah wa Dzkrun-Niswah al-Muta'abbidat al-Sufiyyat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- El-Himamah, Lia Aliyah, Kesaksian Perempuan, Benarkah Separuh laki-laki, Juli 2008, Rahima.
- Eridani, AD., dan AD Kusumaningtyas (ed.), 2008, Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri, Rahima.
- Mani' 'Abdul Halim Mahmud, 2003, *Manhajul-Mufasssirin (Metode Tafsir)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, H., Ulama Perempuan, Rubrik Tafsir, Swara Rahima no. 23, Desember 2007.
- Mumtazah, A., Nyai Hj. dan Yulianti Muthmainnah, Menimbang Kehamilan Tak Diinginkan Perspektif Islam dan Hukum Positif, April 2007, Rahima.
- Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 1983, *Manhaj Naqdil-Matan 'inda 'Ulama al-Hadis al-Nabawi (Metode Kritik Matan Hadis di Kalangan Ulama Hadis)*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Sopariyanti, P., Menilai Kawin Paksa, Perspektif Fikih dan Perlindungan Anak, Desember 2008, Rahima.
- Suparman dkk, 2007 dan 2009, Pendidikan Agama Islam untuk SMA/SMK bekerjasama dengan Pesantren Nurul Islam Jember, Rahima.
- Qomariyah, N. dan Nur Achmad, Kawin Kontrak, Dilarang tapi Marak, Agustus 2007, Rahima.



Peran Perempuan Petani
dalam Pemanfaatan
Energi Alternatif (Biogas)
sebagai Bagian Rehabilitasi
Kawasan Hyang Argopuro

Artikel 9

Peran Perempuan Petani dalam Pemanfaatan Energi Alternatif (Biogas) sebagai Bagian Rehabilitasi Kawasan Hyang Argopuro

BAMBANG TEGUH KARYANTO

LSDP SD INPERS (Lembaga Studi Desa untuk Petani)

ANCAMAN BAGI LINGKUNGAN HYANG ARGOPURO

Kawasan Hyang Argopuro merupakan daerah subur yang cukup luas berada di empat kabupaten: Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo dan mencakup enam cagar alam, empat taman nasional, satu taman wisata, dan menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar Tapal Kuda Jawa Timur. Kawasan ini menjadi konservasi hutan dan suaka margasatwa berdasarkan ketetapan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK/12/PA/1962. Namun ketetapan tersebut tidak mampu mempertahankan habitat yang ada karena tindakan eksploitatif yang justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian.

Salah urus pembangunan sebagai akar penyebab salah kelola ekosistem. Kini, sebagian besar kawasan Hyang Argopuro menjadi milik

perusahaan perkebunan swasta dan pemerintah dengan komoditas monokultur seperti tembakau, kopi, karet, kakao, teh, tebu, dan lain sebagainya. Tindakan eksploitatif pengusaha dan masyarakat semakin nyata dengan perluasan kawasan eksploitasi. Kini, sekitar 83% dari desa merupakan perkebunan milik perusahaan (BPN, 2006), sedangkan jumlah rumah tangga petani gurem (penguasaan tanah kurang dari 0.5 ha) semakin meningkat dari tahun ke tahun (Berita BPS, 2004). Ketimpangan eksploitasi ini berdampak buruk terhadap kawasan konservasi berupa krisis ekologi dengan muara pada bencana.

Perusahaan perkebunan menjadi penyumbang ketidakstabilan kondisi tanah karena mereka menanam tanpa memperhatikan kemiringan lereng dan menanam pada lereng curam tanpa penahan (LSDP SD INPERS, 2006). Padahal, di Jember misalnya, 9 dari 31 kecamatan termasuk daerah rawan longsor. Tidak mengherankan kumulatif keadaan ini di Jember berujung pada banjir bandang besar tahun 2006 yang menelan korban jiwa cukup banyak.

ANCAMAN BAGI MASYARAKAT DAN PEREMPUAN HYANG ARGOPURO

Disadari atau tidak kecenderungan eksploitasi menguntungkan pihak perusahaan, sementara kerugian yang tidak kecil bagi masyarakat di sekitar kawasan. Potret ketimpangan tergambar dari perubahan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan, seperti terlihat dari meningkatnya angka migrasi masuk tenaga kerja rendahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh kebun. Umumnya buruh ini membawa anak dan keluarga dan hidup dengan fasilitas fisik dan infrastruktur seadanya. Perusahaan ‘mengarahkan’ mereka tetap berada di sekitar perkebunan untuk mengelola perkebunan (LSDP SD INPERS, 1996).

Perempuan di sekitar kawasan memiliki beragam kegiatan. Bagi perempuan dari keluarga yang memiliki lahan tapi minim keterampilan

dan pengetahuan, mereka lebih memilih bekerja mengolah hasil perkebunan dengan alasan cepat mendapatkan hasil (upah). Mereka bekerja dengan upah rendah, tanpa alat perlindungan yang memadai, dan rawan mendapat pelecehan seksual. Perempuan yang lain memilih mencari bahan baku dari hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan perempuan dari rumah tangga yang memiliki lahan tapi terbatas (gurem) lebih memilih berpindah ke kota menjadi buruh atau menjadi TKI informal di luar negeri. Demikian potret kehidupan penduduk perempuan miskin yang terpinggirkan yang sangat ironis bila disandingkan dengan hasil perkebunan Jember yang mendunia (BPS, 2001).

Bagi sebagian warga keberadaan perkebunan dianggap negatif. Mereka terutama perempuan dan anak-anak merasakan trauma pengusiran paksa melalui kekerasan dan tembakan senjata saat perebutan hak tanah dengan pihak perkebunan (PTPN). Situasi ini menggambarkan dampak buruk pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam, manusia, dan keadaan sosial di sekitar kawasan. Lingkungan yang rusak mengancam kelangsungan kehidupan warga di kawasan ini. Sebaliknya, kemiskinan warga sekitar Hyang Argopuro menjadi ancaman tersendiri bagi kawasan karena mereka akan cenderung merusak hutan dan mudah diperalat oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk eksploitasi hutan.

SUMBER ENERGI YANG TERBARUKAN

Setelah banjir bandang tahun 2006, warga Jember semakin sadar terhadap ancaman bahaya lingkungan. Situasi ini mendorong Lembaga Studi Desa untuk Petani SD INPERS (LSDP SD INPERS) bersama kelembagaan dan pemerintah lokal melakukan berbagai program strategis menguatkan penyadaran dan kemandirian masyarakat desa kawasan Hyang Argopuro. Fokus program pada pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat, melalui proses yang mampu memberdayakan, dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan Hyang Argopuro. Salah satu kegiatan program adalah pengembangan energi alternatif sebagai pengganti kayu bakar. Saat itu sekitar 62% desa di Jember memakai kayu bakar sebagai energi utama untuk memasak, sehingga bisa dibayangkan tekanan yang tinggi terhadap tata ekologi di kawasan hutan (lihat lampiran 1).

Situasi mendorong upaya pencarian energi alternatif untuk menggantikan atau mengurangi ketergantungan terhadap kayu bakar yang merupakan salah satu sumber energi konvensional. Selanjutnya berdasarkan pada kenyataan sosial-budaya penduduk yang memiliki kebiasaan menyimpan kekayaan dalam bentuk hewan ternak, pilihan sumber energi alternatif jatuh pada pengembangan biogas. Secara khusus program pengembangan biogas bertujuan untuk:

- ❖ Meningkatkan kesadaran keluarga tani khususnya perempuan.
- ❖ Mengenalkan, menumbuhkan dan membangun kemandirian berbagai potensi desa terutama potensi serta penyediaan energi.
- ❖ Mengembangkan cara-cara pengelolaan lingkungan dan kawasan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
- ❖ Penghematan biaya dari pengadaan energi konvensional (pembelian kayu bakar dan minyak tanah)
- ❖ Dengan penggunaan biogas maka dapat dipakai bagi peningkatan nilai tambah produk unggulan masyarakat yaitu kopi.
- ❖ Membaiknya kawasan hutan/lingkungan akan sangat membantu kaum perempuan tani dalam peningkatan ekonomi keluarga.

Penerapan energi alternatif biogas dengan kotoran ternak dianggap memberikan nilai tambah bagi masyarakat banyak, khususnya keluarga tani. Di samping itu, biogas mempunyai banyak manfaat lain, yaitu: mengurangi pencemaran kotoran ternak, mengurangi penebangan pohon untuk kayu bakar, mengurangi efek rumah kaca dengan menghambat penguapan gas metana ke udara, hasil akhir/sisa produksi biogas adalah

pupuk organik, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan energi konvensional lainnya, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, memberi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan tani dalam mengurus kegiatan sosial kemasyarakatan karena sebagai pengguna serta pengurus reaktor nanti adalah perempuan tani, serta memberi nilai tambah bagi produk andalan kawasan ini yaitu kopi dengan peningkatan teknik pasca panen.

PERAN STRATEGIS PEREMPUAN DALAM ENERGI BIOGAS

Program pengembangan biogas mengutamakan peran perempuan, karena operator, pemanfaatan sekaligus yang merawat reaktor adalah perempuan. Keberadaan energi biogas memberikan peran strategis bagi perempuan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, energi biogas juga dapat dimanfaatkan oleh perempuan sebagai bahan bakar produk kopi bubuk. Bahkan sisa biogas yang cair dan yang padat sudah dipikirkan pemanfaatannya oleh perempuan tani sebagai pupuk bagi tanaman kopi mereka. Melalui pengembangan energi biogas, perempuan diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan sosial di masyarakat.

Pemanfaatan limbah peternakan menjadi biogas dapat menjadi awalan terwujudnya kemandirian bidang energi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di seputar desa. Di samping sebagai jalan keluar penyediaan energi, pengembangan biogas juga diharapkan dapat mengembalikan fungsi sosial-ekonomi-politik petani desa. Bagi lingkungan, berkurangnya asap dari kegiatan memasak dan juga mengurangi pencemaran kotoran ternak terhadap sumber dan saluran air. Bagi keluarga tani, penghematan belanja energi dapat dialihkan untuk tambahan biaya kesehatan dan pendidikan, peningkatan pendapatan keluarga lewat pemanfaatan biogas dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian mereka, termasuk pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi, pisang dapat diolah menjadi sale pisang, kripik

pisang, tepung pisang, dan durian diolah menjadi bermacam makanan olahan.

PEMBELAJARAN

Melibatkan peran perempuan dalam melestarikan lingkungan membutuhkan kreativitas, apalagi melakukan perubahan sosial budaya yang masih kental dengan suasana patriarki. Pendamping masyarakat perlu waktu, energi, kreativitas, dan pikiran yang tak sedikit. Mulai dari meyakinkan laki-laki agar mau mempertimbangkan kontribusi perempuan, sampai membangkitkan percaya diri perempuan itu sendiri. Memasukkan dimensi gender dalam tahapan awal kegiatan rehabilitasi kawasan Hyang Argopuro menjadi hal penting agar kegiatan menjadi bermakna dan memberi manfaat yang seluas-luasnya penduduk di sekitar kawasan.

LAMPIRAN 1.

Perhitungan pemakaian kayu bakar dan minyak tanah

Jumlah Tanaman X Luas lahan (m²)

100 (konstanta)

Pemakaian mahoni sebagai kayu bakar adalah sebanyak + 9000 pohon/50 KK/tahun. Jadi luas lahan yang terkonversi sebanyak:

9000 pohon mahoni X 10000 m²

100

= 90 X 10000 m²

= 900.000 m²

= 90 ha

Jadi dari perhitungan diatas, per-tahun luas kerusakan hutan akibat penebangan pada lereng Selatan Hyang Argopuro + **90 ha**. Sementara, biaya pembelian per pikul kayu bakar **Rp 10.000,-**. Dimana pembelian biasanya **15 pikul kayu bakar/kk/bulan**. Sehingga dalam satu bulan akan menghabiskan **Rp 150.000/kk** guna membeli kayu bakar. Dalam setahun biayanya menjadi **Rp 1.800.000/tahun/kk**. Sehingga biaya yang dikeluarkan **50 kk/thn** hanya untuk kayu bakar sebanyak : **Rp 1.800.000 X 50 KK = 90.000.000/tahun**. Kebutuhan minyak tanah tidak terlalu banyak karena hanya dipakai saat mendesak, semisal ada tamu atau ketika listrik padam, jumlahnya sekitar + **10 liter/kk/bulan**. Sehingga konsumsi untuk **50 kk adalah 500 liter/50 kk/bulan atau 6000 liter/50kk/tahun**. Dengan harga sekitar **5000/liter (setelah ditambah biaya-biaya)** maka uang yang dibutuhkan untuk membeli minyak tanah **Rp 30.000.000/50 kk/tahun**. Kemudian, jumlah keseluruhan biaya bagi kebutuhan energi bagi 50 KK adalah: **Rp 90.000.000 + Rp 30.000.000 = Rp 120.000.000/50 KK/tahun atau Rp 2.400.000/KK/tahun**. Semua perhitungan ini dihitung dalam waktu serta kegiatan normal, dalam arti hanya kegiatan sehari-hari rumah tangga dengan 4-5 orang anggota keluarga.

Asumsi:

1. Perhitungan diatas menggunakan kayu mahoni sebagai patokan
2. Perhitungan ini diandaikan bila tidak ada penanaman kembali maupun tindakan pencegahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2006, Inventarisasi HGU di Jember.
Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, 2000, Jember dalam Angka.
Berita Badan Pusat Statistik Pusat, 2004, Rumah Tangga Pertanian.
HuMa, 2007, Mengelola HUTAN dengan Memenjarakan Manusia, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
Kartodiharjo, H. dan Jhamtani, H., 2006, Krisis Ekologi dan Bencana Pembangunan dalam Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, Ford Foundation.
Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) SD INPERS Jember, 2006, Hasil Investigasi Banjir Bandang, Jember 2005-2006.
Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) SD INPERS Jember, 1996.
Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) SD INPERS,1999.
Shiva, V. dan Maria M., 2005, Ecofeminism Vs Bidang Baru Investasi Lewat Bioteknologi dalam ECOFEMINISM : Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan, Yogyakarta: IRE Press.



Dampak Pelatihan Analisis Masalah dan Pengembangan Program di YMTR, Batam

Artikel 10

Dampak Pelatihan Analisis Masalah dan Pengembangan Program di YMTR, Batam

SRI RUPIATI

YMTR (Yayasan Masyarakat Tertinggal Riau)

SEKILAS YMTR

Yayasan Masyarakat Tertinggal Riau (YMTR) didirikan tahun 2003. Visi yayasan ini adalah masyarakat Batam yang hidup sehat dan mandiri berwawasan kesehatan reproduksi. Untuk itu, ada 4 misi yayasan, yaitu:

- ❖ Meningkatkan dan memelihara manajemen organisasi melalui kesehatan reproduksi individu, keluarga dan lingkungan.
- ❖ Menggerakan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan reproduksi.
- ❖ Mendorong kemandirian untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta lingkungan sehat.
- ❖ Mewujudkan pelayanan kesehatan reproduksi, konseling dan ketersediaan alat kontrasepsi.

Sumberdaya YMTR terdiri atas seorang pimpinan, dua orang staf, dan 64 orang relawan yang tersebar di 34 kelurahan di 10 kecamatan di Batam. Dalam pelaksanaan program, YMTR mendapatkan dukungan bantuan teknis dari ICOMP Kuala Lumpur (Malaysia) sejak tahun 2003 dan bantuan dana dari Ford Foundation. Selain itu, YMTR juga mendapatkan bantuan dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah di Batam, seperti Dinas Kesehatan, UKM (Usaha Kecil Menengah), KP2 (Kementrian Pemberdayaan Perempuan), dan Dinas Sosial.

PROGRAM DAN KEGIATAN YMTR

Program dan kegiatan YMTR fokus kepada kelompok masyarakat tempatan di wilayah Batam dan sekitarnya. Kegiatan program mencakup pengentasan kemiskinan, keluarga berencana (KB) dan program kesehatan remaja, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perekonomian keluarga, peningkatan derajat kesehatan, terutama kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan peningkatan pendidikan dan kehidupan sosial.

Berikut uraian aktivitas yang dilakukan oleh YMTR:

1. Pengentasan Kemiskinan: YMTR memberikan bantuan teknis dan modal berupa barang-barang yang dibutuhkan masyarakat daerah binaan untuk membentuk kelompok usaha demi meningkatkan pendapatan keluarga terutama para istri/perempuan. Jumlah kelompok usaha yang telah dibentuk saat ini sebanyak 70 kelompok usaha. Dari sejumlah ini, 62 di antaranya ditindaklanjuti dengan bantuan modal usaha. Sampai per Agustus 2009, kelompok usaha yang berjalan ada sebanyak 44 kelompok, 13 kelompok usaha jalan ditempat, 3 kelompok berganti usaha baru, dan 2 kelompok baru mulai berjalan.

2. Program KB dan Program KR: YMTR memberikan pelatihan-pelatihan pada kader untuk pengembangan masyarakat sekitar demi peningkatan pengetahuan dan praktek KB, sehingga pengetahuan kesehatan reproduksi terutama para perempuan/istri meningkat, sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan anak. Dan menjamin tersedianya pil KB di daerah binaan.
3. Peningkatan Kesetaraan Gender: YMTR melibatkan banyak kader perempuan dalam setiap kegiatan program, baik kegiatan ekonomi ataupun peningkatan pengetahuan. Memberikan bantuan modal kepada 62 kelompok usaha, dengan jumlah anggota 310 orang yang mayoritas adalah perempuan. Total bantuan modal usaha yang diberikan sekitar Rp.354,6 juta.
4. Pemberdayaan Perekonomian Keluarga: YMTR memberikan sarana dan prasarana serta dukungan baik material/moril kepada masyarakat daerah binaan terutama para perempuan/istri agar mampu berproduksi sendiri/ mandiri ekonomi sehingga tidak melulu bergantung pada kepala keluarga/ suami. Jumlah laba yang dihasilkan dari semua kelompok usaha tercatat sekitar Rp.214,3 juta, yang terdistribusi 75% untuk anggota kelompok; 20% untuk kas desa; 5% untuk pos obat desa.
5. Peningkatan Derajat Kesehatan: Menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan masyarakat binaan agar mampu ke tempat pelayanan kesehatan. Salah satu yang diupayakan adalah mengembangkan pos obat desa. Jumlah pos obat desa yang telah dibentuk ada sebanyak 38 buah dan menyediakan pelayanan kesehatan untuk suku asli (*indigeneus people*) contoh : Air Mas Kelurahan Ngenang.
6. Peningkatan Pendidikan dan Kehidupan Sosial: Pengentasan buta huruf dan peningkatan kehidupan sosial yang layak bagi masyarakat asli, agar mereka dapat hidup layak sama seperti daerah perkotaan.

DUKUNGAN PROGRAM G-HELP

G-help pertama kali menjalin kerjasama dengan YMTR sekitar pertengahan tahun 2006. YMTR mendapatkan bantuan teknis dari G-help untuk beberapa kegiatan sesuai kebutuhan YMTR. Pertama, YMTR dilibatkan dalam lokakarya dan studi Halimun yang mengembangkan intervensi program sesuai kebutuhan masyarakat desa kawasan Halimun di Bogor dan Lebak. Kedua, G-help memberikan pelatihan analisis dan pengembangan program berwawasan gender kepada para relawan YMTR di Batam. Ketiga, G-help membantu menyelesaikan draft usulan penanggulangan sampah di kota Batam. Ke empat, YMTR meminta pihak G-help membantu mengembangkan rancangan program monitoring dan evaluasi untuk proyeknya. Semua kegiatan diatas, dilakukan G-help bersama YMTR berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama.

HASIL DARI PELATIHAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PROGRAM

Selama 3 hari, 16-18 Juli 2008, G-help bersama YMTR menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya analisis dan komunikasi kesehatan dan lingkungan perspektif gender dengan peserta 22 kader binaan YMTR, 6 laki-laki dan 16 perempuan dan 3 personil YMTR.

Pelatihan dan lokakarya ini memberikan manfaat bagi kader dan personil YMTR. Seperti yang diungkapkan salah satu peserta lokakarya, Bpk. Rozikan-Ketua Kelompok Usaha Nila Berseri, bahwa lokakarya ini menumbuhkan tumbuhnya kesadaran pada dirinya bahwa sebagai laki-laki tidak boleh egois dan harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk maju bersama. Sementara bagi Bpk. Slamet-Ketua Kader Kecamatan Sekupang bidang pariwisata, pelatihan ini memberikan ilmu dan pemahaman akan gender, kesehatan dan lingkungan.

Pelatihan dan lokakarya analisis gender memberikan bekal ilmu kepada para kader dalam bekerja bersama masyarakat dampingan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Suhana, kader Kelurahan Ngenang, telah membimbing anak-anak dibawah usia 19 tahun terkait isu pernikahan dini. Isu yang diusung adalah apa saja konsekuensi dari pernikahan dini, kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang tua, dan kehilangan masa muda, menjadi bahan diskusi dengan remaja-remaja tersebut. Banyaknya kejadian nikah usia dini, mendorong Ibu Suhana melakukan penyuluhan kepada para remaja.

Lain lagi yang dilakukan Bpk. Slamet, yang melakukan penyuluhan kesadaran gender dengan mengangkat isu peningkatan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Penyuluhan dilakukan pada pertemuan-pertemuan formal maupun informal, misal pertemuan PKK, ngobrol santai di warung kopi, pangkalan ojek, maupun saat panen ikan. Selain ilmu dan pengetahuan yang mumpuni dari Bpk. Slamet, status sebagai sesepuh sekaligus tokoh masyarakat di wilayahnya, membuat penyuluhan yang dilakukan olehnya diterima dengan baik oleh warga. Dalam setiap penyuluhan, Bpk. Slamet memotivasi warga dengan kalimat bahwa bukan laki-laki saja yang dapat menyejahterakan keluarga, perempuan juga bisa. Hasil dari penyuluhan, kini terbentuk usaha air minum isi ulang yang dikelola oleh kelompok perempuan. Usaha ini sudah berjalan selama 2.5 bulan dengan bantuan modal awal dari YMTR dan kontribusi warga dari pinjaman lunak donatur. Hingga kini, usaha tersebut berjalan lancar dan sudah hampir dapat mengembalikan pinjaman modal kepada donatur.

Kegiatan-kegiatan diatas hanya sekadar gambaran yang memperlihatkan dampak pelatihan yang mampu mendorong kader-kader melakukan hal-hal besar di wilayah masing-masing. Namun demikian, pelatihan tersebut masih dirasa kurang, karena masih banyak kebutuhan akan peningkatan kapasitas bagi para kader. Bpk. Rozikan mengatakan

pelatihan akan manajemen keuangan, kewirausahaan, maupun berupa pinjaman modal menjadi kebutuhan warga di wilayah Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang. Lain halnya dengan Bpk. Slamet danarganya, yang menganggap kebutuhan informasi seputar perkembangan usaha di kota besar seperti Jakarta dan penyadaran persoalan kebersihan dengan wawasan kesehatan.

Selain itu, pelatihan bermanfaat bagi YMTR dengan tersusunnya usulan upaya penanggulangan sampah di kota Batam. Usulan ini menggunakan pendekatan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang memasukan isu gender, kesehatan dan lingkungan. Usulan disusun bersama-sama melibatkan peserta pelatihan yang difasilitasi oleh tim G-help. Proses yang terjadi sangat intens dan memberikan pengalaman yang berharga bagi mereka yang terlibat di dalamnya.

P E N U T U P

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan YMTR untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yayasan. Masyarakat, khususnya kelompok usaha masih perlu diberikan penguatan, terutama yang sifatnya manajemen usaha, pemasaran, dan permodalan. Apa yang telah dilakukan G-help sangat membantu pihak YMTR dalam membina dan meningkatkan kemajuan kelompok. Selain juga memberikan wawasan, pengetahuan, semangat, dan pandangan baru terhadap isu yang terkait dengan gender, kesehatan dan lingkungan.

Kami juga sangat terbuka pada pihak manapun yang mau menjalin kerjasama dengan pihak YMTR. Diharapkan kemitraan dan kerjasama yang dijalin harus bisa memberikan dampak positif kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Seperti yang dikembangkan antara YMTR, G-help, dan kader-kader YMTR. Kemitraan yang terjalin dapat berdampak positif bagi semuanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Purwa Kurnia Sucahya dan Dwiastuti Yunita Saputri dari G-help yang telah banyak membantu menyiapkan tulisan ini, Minarika dan Yoerika Prima (YMTR), Bpk. Rozikan, Bpk. Slamet, dan Ibu Suhana (Kader YMTR) yang telah banyak membantu memberikan dukungan data, serta pihak-pihak lain para sukarelawan YMTR yang telah memberikan informasi.



Laporan Kegiatan
Lokakarya Lapangan
Desa Genggeling,
Lombok Utara, NTB
(22-27 Februari 2009)
dan Desa Ngawu,
Gunung Kidul,
DI Yogyakarta
(12-17 April 2009)

Laporan Kegiatan Lokakarya Lapangan Desa Genggeling, Lombok Utara, NTB (22-27 Februari 2009) dan Desa Ngawu, Gunung Kidul, DI Yogyakarta (12-17 April 2009)

PENGANTAR

Penanggung-jawab dan pengelola program pembangunan baik skala besar maupun kecil, termasuk mereka yang berkecimpung dalam kegiatan kemasyarakatan, perlu mempunyai kemampuan mengenali masalah prioritas dan mengembangkan serta melaksanakan pemecahan masalah dengan cara yang strategik, dalam arti efektif dan sekaligus mampu-laksana sesuai konteks keterbatasan setempat. Sudah banyak pelatihan dilakukan, namun sebagian besar menekankan pada pemahaman konsep dengan kebanyakan contoh diberikan melalui simulasi kelas. Pelatihan dengan contoh kongkrit situasi lapangan belum banyak dilakukan. Sementara pemahaman konsep tetap penting,

pengalaman langsung praktek lapangan tidak kalah pentingnya. Optimasi efektivitas suatu program penguatan kapasitas perlu menyeimbangkan pembekalan konsep dan praktek lapangan.

Dengan latar-belakang di atas, G-help (*Gender, Health and Environmental Linkages Program*) mengembangkan dan melaksanakan suatu lokakarya lapangan pengembangan program pembangunan masyarakat. Lokakarya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menentukan prioritas masalah yang terkait dengan isu gender, kesehatan dan lingkungan, dan mengembangkan strategi yang cocok, dalam arti akan efektif dan mampu-laksana, dalam pemecahan masalah. Berbeda dengan lokakarya pada umumnya, lokakarya ini dilakukan dengan peserta belajar dan tinggal di lapangan, dengan kurikulum menekankan keseimbangan antara konsep dan praktek nyata di masyarakat. Di akhir lokakarya peserta diharapkan mampu:

1. Menentukan masalah prioritas melalui analisis situasi masalah.
2. Menyusun kerangka logis program yang mencakup strategi pemecahan masalah, monitoring dan evaluasi

Dalam lokakarya ini, peserta mengamati langsung di lapangan dan masyarakat tentang masalah gender, kesehatan dan lingkungan, melakukan analisis situasi masalah, dan kemudian mengembangkan strategi yang sesuai untuk pemecahan masalah. Lokakarya dilakukan di dua tempat dengan waktu yang berbeda, masing-masing selama 7 hari: Desa Genggeling, Lombok Utara, NTB tanggal 22-27 Februari 2009, dan Desa Ngawu, Gunung Kidul, DI Yogyakarta tanggal 12-17 April 2009. Kegiatan peserta lokakarya mencakup hal berikut:

1. Menentukan minat dan validasi masalah.
Sebelum ke lapangan setiap peserta diminta menentukan minat masalah, kemudian dengan menggunakan instrumen pengamatan lapangan melakukan validasi masalah melalui pengamatan lapangan

- dan wawancara dengan nara sumber terkait (warga masyarakat, pamong praja, toma/toga).
2. Mengenali masalah prioritas.
Menggunakan data lapangan, peserta melatih kemampuan mengenali masalah prioritas melalui analisis situasi masalah, termasuk pengembangan pohon masalah dan tujuan.
 3. Menyusun kerangka logis program
Menggunakan data lapangan, peserta melakukan analisis kelembagaan, *stakeholders* dan kondisi kontekstual masyarakat (sosial, budaya, dan ekonomi) guna mengembangkan strategi penanganan yang sesuai dan kemudian menyusun kerangka logis program yang mencakup tujuan, strategi, hasil, kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.
 4. Menyajikan konsep rancangan program.
Peserta menyiapkan dan menyajikan konsep rancangan program sebagai tukar pikir dan pembelajaran dengan peserta yang lain.

Peserta lokakarya lapangan ini adalah aktivis LSM MKFF yang terlibat dalam G-help, beberapa kepala dusun (Kadus), pengurus kelompok-kelompok masyarakat, dan perwakilan instansi pemerintah yang terkait, seperti Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dan KB. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat lokal dan instansi pemerintah terkait ini sangat penting supaya mereka dapat mengenali permasalahan di wilayahnya, menentukan prioritas masalah, merancang dan mengembangkan program pembangunan yang sesuai di wilayahnya. Selain itu, keterlibatan instansi pemerintah terkait juga diharapkan nantinya mereka dapat menerapkan metode penentuan masalah prioritas, pengembangan program, hingga monitoring dan evaluasi dalam program kerja instansinya. Sedangkan bagi peserta yang mewakili LSM MKFF yang sebagian besar manajer program di institusi masing-masing, lokakarya sebagai wahana mengasah kemampuan mereka dalam merancang program berdasar realitas permasalahan di masyarakat.

Kehadiran peserta dengan keragaman latar-belakang dan pengalaman (gender, kesehatan dan lingkungan) membuat lokakarya ini juga wadah saling tukar pengetahuan dan pengalaman.

PELAKSANAAN

1. Pembukaan

Desa Genggeling, Lombok Utara, dipilih sebagai lokasi lokakarya lapangan yang pertama karena desa ini sebagai desa binaan Konsepsi, sebuah LSM MKFF yang terlibat dalam proyek G-help. Di Desa Genggeling ini, Konsepsi telah menempatkan satu orang stafnya mendampingi masyarakat desa. Hasil lokakarya diharapkan dapat digunakan pula oleh Konsepsi untuk mengembangkan program-program mereka. Begitu pula dengan Desa Ngawu, Gunung Kidul, dipilih sebagai tempat lokakarya lapangan yang kedua karena desa ini telah lama menjadi desa binaan Rifka Annisa, salah satu MKFF yang bekerja menangani masalah gender dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lokakarya lapangan di Desa Genggeling diawali dengan pembukaan di Kantor Desa oleh Bupati Lombok Utara, Drs. H. Lalu Bakri, disaksikan oleh Lurah Desa Genggeling, Syaiful Ihsan. Sedangkan di Desa Ngawu, pembukaan dilakukan di Kantor Desa oleh wakil Bupati, ibu Badingah dan disaksikan Lurah Desa Ngawu, bapak Heryanto. Dalam sambutannya para perangkat desa sangat berharap bahwa kegiatan lokakarya dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan pembangunan desa. Dalam kesempatan itu pula, Direktur program G-help, Prof. Budi Utomo memberikan gambaran tentang proyek G-help dan lokakarya lapangan. Dalam acara pembukaan ini, selain peserta, panitia lokal, dan tim G-help dari Jakarta, hadir pula tokoh masyarakat dan *stakeholders* terkait, seperti staf puskesmas, staf pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, ibu-ibu PKK dan kader posyandu. Kehadiran para perangkat pemerintah

dan tokoh-tokoh tersebut mengindikasikan dukungan dan sekaligus harapan mereka terhadap manfaat lokakarya bagi kemajuan desa mereka.

Presentasi profil desa tempat lokakarya lapangan disampaikan setelah acara pembukaan, di Desa Genggeling oleh pengurus koperasi Rimba dan staf LSM Konsepsi, sedangkan di Desa Ngawu oleh staf Yayasan Rifka Annisa. Data gambaran situasi desa ini dibutuhkan peserta sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat guna mengidentifikasi masalah prioritas dan mengembangkan program pembangunan masyarakat yang terkait dengan isu gender, kesehatan dan lingkungan.

2a. Profil Desa Genggeling

Desa Genggeling, terdiri dari 14 dusun dengan 2500 Kepala Keluarga. Desa Genggeling adalah desa terpadat di Kecamatan Gangga dengan 90% penduduk sebagai petani kebun dan petani sawah. Untuk perkebunan, *cacao* (coklat) adalah komoditi utama. Saat ini, masyarakat sudah mulai banyak menanam tanaman kayu-kayuan (seperti tanaman hutan Rajumas) karena nilai ekonomis. Satu pohon Rajumas dewasa berharga satu sampai tiga juta rupiah. Selain manfaat ekonomi, tanaman hutan Rajumas juga bermanfaat untuk lingkungan, karena ramah terhadap tanaman di bawahnya dan menyimpan air.

Ketersediaan dan distribusi air di Desa Genggeling belum merata. Masyarakat hulu mendapatkan air sangat sedikit, dan air untuk sawah dikuasai konglomerat. Salah satu sumber air andalan masyarakat adalah PDAM dengan kapasitas air hingga 75 m³ per detik. Kualitas airnya lebih bagus daripada air kemasan. Sebagian iuran yang dipungut dari yang mendapatkan aliran air PDAM ini dikembalikan untuk pengelolaan hutan.

Kehidupan masyarakat Desa Genggeling dekat dengan hutan produksi. Pohon-pohonan di hutan kebanyakan tanaman kayu-kayuan.

Dalam hal menjaga lingkungan hutan, masyarakat melakukan rehabilitasi hutan, baik swadaya maupun bekerjasama dengan pemerintah. Tokoh masyarakat bekerja-sama dengan LSM telah berhasil mengeluarkan warga masyarakat yang tinggal di hutan dan cenderung merusak hutan tanpa perselisihan. Karakter masyarakat Desa Genggelang adalah pendiam, tetapi pekerja keras. Isu yang menarik mereka adalah bidang pertanian dan kehutanan. Mereka bekerja bermasyarakat melalui kelompok-kelompok tani dan kehutanan.

Terkait dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, umumnya perempuan dan laki-laki (istri-suami) melakukan pekerjaan domestik dan produktif secara bersama-sama. Perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja di pertanian atau hutan. Perempuan dan laki-laki pun saling membantu urusan rumah tangga. Kesempatan anak-anak perempuan dalam mendapat pendidikan pun setara dengan laki-laki. Namun demikian, isu gender tetap ada, yang paling mencolok adalah isu poligami. Sejauh ini, masalah rumah tangga dengan praktek poligami lebih banyak kecemburuan istri pada suami.

Penyakit utama yang sering dikeluhkan masyarakat Desa Genggelang adalah Chikungunya dan Malaria dengan penularan melalui nyamuk. Rata-rata, semua masyarakat sudah pernah terinfeksi penyakit tersebut. Endemisnya kedua penyakit terkait dengan banyaknya tempat perindukan nyamuk, termasuk limpahan air hujan yang menggenang di cekungan kulit *cacao* yang ditinggalkan begitu saja saat panen *cacao*.

Koperasi Rimba yang berdiri sejak 2 tahun lalu memberikan dampak ekonomi cukup baik. Dalam hal bantuan langsung tunai (BLT), pemerintah setempat mengambil kebijakan memberikan secara merata. Sebagian masyarakat belum dapat melakukan skala prioritas dalam kehidupannya, misal mereka memilih melakukan ibadah haji dengan biaya cukup mahal dibandingkan membangun rumah dan MCK sehat untuk keluarga.

2b. Profil Desa Ngawu

Desa Ngawu terdiri dari 4 dusun, yaitu Ngawu, Tumpak, Ngasemrejo, dan Sumberejo, dengan luas lahan 314,3843 ha. Lahan digunakan untuk pemukiman, pekarangan, sawah, dan prasarana umum. Lahan perkebunan dan pekarangan banyak ditanami buah-buahan seperti mangga, sawo, dan duku. Hasil tanaman buah dijual di pasar, sebagian dijual melalui pengecer, dan sisanya dikonsumsi sendiri. Jenis tanaman utama terdiri dari padi, ubi kayu, kacang tanah, dan kacang kedelai. Padi yang ditanam masyarakat ada dua jenis, yaitu padi sawah dan padi ladang. Sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan, sehingga ketergantungan petani akan faktor alam cukup besar. Selain tanaman pangan, masyarakat juga menanam tanaman apotik hidup seperti jahe dan kunyit.

Jumlah penduduk di Desa Ngawu 4.164 jiwa (1.990 laki-laki dan 2.124 perempuan) dengan 847 KK. Jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan cukup dekat, hanya 0.2 km, Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Propinsi masing-masing adalah 7 km dan 35 km.

Masyarakat Desa Ngawu berorganisasi, seperti terlihat dari keberadaan banyak organisasi: Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), PKK, RW, RT, Karang Taruna, Kelompok Tani, Lembaga Adat, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perempuan, Organisasi Pemuda, Kelompok Ngudi Luhur (untuk penanganan kasus KDRT), Kelompok Gotong royong, dan Organisasi Bapak. Selain itu, terdapat 37 kelompok simpan pinjam, lembaga keuangan non bank, dan Bank Perkreditan Daerah (BPR).

Sebagian besar masyarakat hidup dari hasil pertanian, sebagai petani atau buruh. Jumlah laki-laki petani lebih banyak dari perempuan petani dengan perbandingan 762 dan 384. Namun untuk pekerjaan buruh tani, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, 152 banding 76. Sebagai buruh tani, laki-laki bekerja dari pukul 08.00 hingga 16.00, sedangkan perempuan hanya bekerja dari pukul 08.00 hingga 11.00.

Perbedaan lama jam kerja terkait dengan perbedaan upah, laki-laki menerima upah 30 - 40 ribu rupiah per hari, dan perempuan 15 - 20 ribu rupiah per hari. Selain bekerja di sektor pertanian, sebagian warga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, peternak, pedagang, profesional, swasta dan pensiunan.

Sebagai petani, pendapatan penduduk tidak pasti. Rata-rata pengeluaran rutin per orang per hari 10 ribu rupiah atau 300 ribu rupiah per bulan per orang. Pengeluaran ini selalu lebih besar dari pendapatan. Untuk menutupi kekurangan pendapatan, masyarakat biasa menjual ternak, seperti sapi, ayam kampung, bebek, kambing, dan walet. Untuk tingkat pendidikan, rata-rata penduduk Desa Ngawu mengenyam pendidikan hingga tamat SMU.

Sumur pompa sebagai sumber air bersih utama masyarakat. Sungai tidak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih karena tercemar, mengalami pendangkalan, keruh, dan berkurangnya biota. Sumber air bersih lainnya: sumur gali, mata air dan PAM. Keberadaan PAM yang menggunakan sumur bor membuat sumber air tanah berkurang.

Masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi adalah kurangnya sarana buang air besar. Dari 847 KK, sebanyak 158 belum memiliki jamban dengan distribusi 68 di Dusun Ngawu, 44 di Dusun Tumpak, dan 46 di Dusun Ngasemrejo. Alasan belum mempunyai jamban karena belum menjadi kebutuhan prioritas dan kesulitan memperoleh air bersih.

3. Kombinasi Belajar di Kelas dan Lapangan

Salah satu keunikan lokakarya lapangan ini adalah penggunaan kombinasi metode pembelajaran di kelas dan lapangan. Pendekatan ini membuat lokakarya ini terkesan santai tapi tetap serius memahami konsep-konsep yang disampaikan narasumber. Setelah konsep disampaikan, peserta kemudian turun ke lapangan melakukan pengamatan langsung, mencari data sekunder di instansi terkait dan wawancara dengan penduduk maupun pihak yang berkepentingan,

hingga memotret dengan kamera situasi yang terkait masalah. Setelah data terkumpul, peserta kembali ke *basecamp* menyusun data secara tematik dan melakukan diskusi dan analisis dalam kelompok, termasuk mengembangkan pohon masalah, pohon tujuan, analisis *stakeholders*, dan *logical framework* (kerangka logis program). Selama diskusi berlangsung, narasumber memberikan arahan dan bimbingan. Pendekatan ini menimbulkan keakraban antar peserta, narasumber, dan panitia.

Dalam bekerja, peserta dibagi menjadi dua kelompok dengan sasaran daerah lapangan dan prioritas masalah yang berbeda. Peserta banyak belajar melalui diskusi dalam proses pengembangan produk-produk analisis. Ada diskusi yang cukup “alot” ketika menetapkan sebuah masalah prioritas, tetapi ada pula yang mudah menentukan karena masalah terlihat nyata di lapangan.

Kelompok Dusun Kerakas di Desa Genggelang, Lombok Utara, tak perlu berlama-lama untuk sepakat menjadikan masalah tingginya prevalensi penyakit chikungunya dan malaria sebagai prioritas masalah. Hal ini bukan saja karena data kuantitatif tingginya prevalensi penyakit, tetapi juga kenyataan genangan-genangan air dengan jentik-jentik nyamuk yang menyebar di lingkungan pemukiman, disamping perilaku masyarakat yang menggantung pakaian di dalam rumah yang menarik nyamuk dewasa “bersarang”. Kelompok Dusun Sumberejo di Desa Ngawu, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, dengan cepat memilih polusi dan gangguan akibat sampah sebagai prioritas masalah. Sewaktu penjelasan profil desa, informasi masalah sampah di dusun Sumberejo sudah sampai “di telinga” peserta. Oleh karena itu, kelompok dusun Sumberejo sepakat melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan dengan warga dan pihak terkait lain dengan fokus persoalan sampah.

Di pihak lain, kelompok Dusun Gangga, Lombok Utara, agak “alot” menetapkan masalah air bersih sebagai prioritas masalah. Penetapan masalah ini berdasarkan pengamatan bahwa penduduk lebih

sering meminum air mentah dan aliran air dari sumber air ke rumah-rumah penduduk terbuka dan rentan terkontaminasi, masalah air bersih diangkat sebagai masalah prioritas. Kurangnya data kuantitatif angka diare yang tinggi membuat diskusi berkepanjangan.

Suasana lapangan membuat diskusi menjadi hidup, nyaman, tidak tegang, dan penuh keakraban. Namun demikian, peserta di kedua lokakarya termotivasi melakukan diskusi membahas topik-topik serius, termasuk pohon masalah, pohon tujuan, analisis *stakeholders*, dan *logical framework*.

4. Presentasi Akhir

Lokakarya lapangan di kedua desa diakhiri dengan presentasi akhir di hadapan Lurah dan *stakeholders* lain. Presentasi akhir oleh peserta lokakarya menampilkan hasil kerja lokakarya berikut rekomendasi. Kehadiran *stakeholders* ini menjadi penting karena mereka bukan saja melihat masalah di wilayahnya, tetapi juga dapat menilai masalah tersebut dari “kacamata” lain.

Seperti di Desa Ngawu, masalah sampah yang diangkat peserta bukanlah masalah baru. Lokasi TPS memakan sebagian badan jalan di depan pasar; sampah sering terlambat diangkut sehingga menumpuk dengan bau menyengat yang mengganggu lalu lintas, dan mengganggu kenyamanan penduduk yang berlalu-lalang. Di samping itu, banyak sampah juga berserakan di saluran air dan kali sekitar pasar dan pemukiman penduduk. Pihak yang terkait menyadari perlu mencari lokasi alternatif TPS yang lebih sesuai, dan satu-satunya lokasi yang dianggap cocok adalah halaman Kantor Bagian Daerah Hutan (KBDH). Halaman tersebut cukup luas dan tidak jauh dari pasar. Namun demikian, tidak mudah mendapatkan ijin menggunakan sebagian kecil halaman tersebut, bahkan campur tangan bupati Kabupaten Gunung Kidul sekalipun belum ada perubahan, karena ijin penggunaan harus datang dari Menteri Kehutanan.

Peserta mengusulkan agar pemecahan masalah sampah itu tidak hanya melakukan lobi pada KBDH, tetapi juga melakukan upaya pemilahan dan pemanfaatan sampah di tingkat pedagang pasar, melatih kelompok perempuan mengolah sampah, optimasi armada sampah, hingga rekomendasi membuat peraturan lokal larangan membuang sampah sembarangan. Dengan semua itu, penumpukan sampah di TPS diharapkan bisa berkurang, sehingga bau, ketidaknyamanan dan risiko penyakit saluran pencernaan bisa berkurang. Rekomendasi yang disampaikan oleh peserta lokakarya sebagian memang sudah terpikirkan oleh pihak-pihak terkait. Dengan alternatif pemecahan masalah yang disampaikan peserta, pihak-pihak terkait semakin sadar bahwa permasalahan sampah di Dusun Sumberejo memang perlu ditangani dengan lebih serius.

Dalam diskusi usai presentasi akhir itu, Prof. Budi Utomo menegaskan bahwa dalam pengembangan solusi, inti permasalahan memang sangat banyak. Namun, masalah yang diangkat adalah masalah yang mendesak yang dianggap prioritas. Jika, prioritas masalah telah disepakati, solusi dicari yang dianggap akan efektif tetapi mampu laksana sesuai dengan keterbatasan sumber-daya yang ada. Dalam pengembangan solusi memang memerlukan dana dan tenaga, tetapi bukan berarti masalah disederhanakan pada dua hal itu saja. Melakukan tinjauan ulang terhadap sumber daya yang kita miliki sangat penting. Contohnya, kurangnya frekuensi pengangkutan sampah oleh armada sampah tidak serta merta dipecahkan dengan menambah jumlah armada pengangkutan sampah. Akan tetapi bisa dilakukan dengan meninjau mana yang lebih efektif menambah armada sampah atau menambah jatah solar setiap hari dan jam kerja petugas.

Lokakarya ditutup oleh Lurah Desa. Dalam sambutan penutupan, dua lurah desa, yaitu Desa Genggeling dan Desa Ngawu, terkesan puas dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh tim G-help, panitia lokal, dan peserta lokakarya lapangan.

PEMBELAJARAN

- ❖ Lokakarya lapangan menggunakan kombinasi metode belajar di kelas dan lapangan, memahami konsep dan praktek langsung di lapangan menguatkan motivasi peserta untuk bekerja bersama. Bagi peserta, pendekatan yang dipakai membuat lokakarya terkesan santai tapi serius.
- ❖ Metode belajar di lapangan dengan menggunakan permasalahan nyata yang ditemui di lapangan membuat konsep yang dipahami menjadi aplikatif. Hal ini memungkinkan hasil lokakarya ditindaklanjuti dan bukan sekedar tertuang dalam dokumen.
- ❖ Metode lokakarya lapangan membuat seluruh peserta berperan dan berpartisipasi aktif. Narasumber dan fasilitator juga berperan sebagai peserta sehingga suasana menjadi akrab dan menjadikan tidak adanya dinding pemisah antara peserta dan narasumber.
- ❖ Pembagian peran dalam suatu masyarakat meningkatkan rasa kebersamaan (*sense of belonging*).
- ❖ Kurangnya keterbukaan sebagian warga desa terhadap adanya masalah membuat peserta lokakarya kurang mendalami masalah yang ada. Peserta perlu meyakinkan kepada warga desa bahwa lokakarya bukan bertujuan mengangkat keburukan desa mereka, melainkan mencari solusi nyata dari masalah yang ada di desa.
- ❖ Pelibatan pemangku kunci terkait seperti Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dan KB membuka jalan untuk dapat akses kepada instansi tersebut. Selain itu, metode lokakarya lapangan dapat menjadi rujukan baru dalam penentuan masalah prioritas, pengembangan program, hingga monitoring dan evaluasi program.
- ❖ Penggunaan bahasa ilmiah terkadang tidak dimengerti oleh peserta lokakarya, tetapi terkadang tidak bisa dihindari karena mengacu pada suatu istilah spesifik yang tidak ada padanannya dalam bahasa

Indonesia, atau kata tersebut memiliki makna yang berbeda apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia.

- ❖ Poin lain yang dipelajari dari lokakarya lapangan ini adalah peserta dapat lebih memahami dan membedakan antara masalah yang perlu diubah (diintervensi) dengan masalah yang hanya dijadikan konteks (tidak dilakukan intervensi). Pembedaan ini membuat program jadi realistis.

PENUTUP

Ide lokakarya lapangan muncul setelah evaluasi hasil lokakarya “konvensional”. Peserta merasakan bahwa kombinasi belajar di kelas dan praktek langsung di lapangan lebih memberikan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan hanya belajar di kelas. “Kelebihannya ada pada praktek materi di lapangan sehingga mampu menyerap dan (memberikan) pengalaman materi yang lebih dalam”, demikian komentar salah seorang peserta. Peserta-peserta yang lain juga menyatakan, “(Lokakarya ini) diadakan di kampung, sehingga lebih “mengena” dan aplikatif”, “Kalau lokakarya lapangan (ini) langsung tahu permasalahannya, (kalau lokakarya) yang lainnya sebatas teori”. Atau ada juga yang menyatakan, “(merupakan) implementasi belajar langsung dan praktek pada komunitas”.

Selain memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep analisis pengembangan program, lokakarya lapangan ini pun memberikan nilai tambah lain. Di antaranya adalah keakraban yang terjalin baik di antara seluruh peserta, panitia, dan narasumber dan menyatunya unsur LSM, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam lokakarya. Dalam komentar terkait hal itu peserta menyatakan, “Suasana pelatihan penuh keakraban”. “Keterlibatan masyarakat dan instansi pemerintah mewarnai lokakarya” dan “Peserta menyatu dengan masyarakat sehingga bisa meningkatkan empati peserta”.

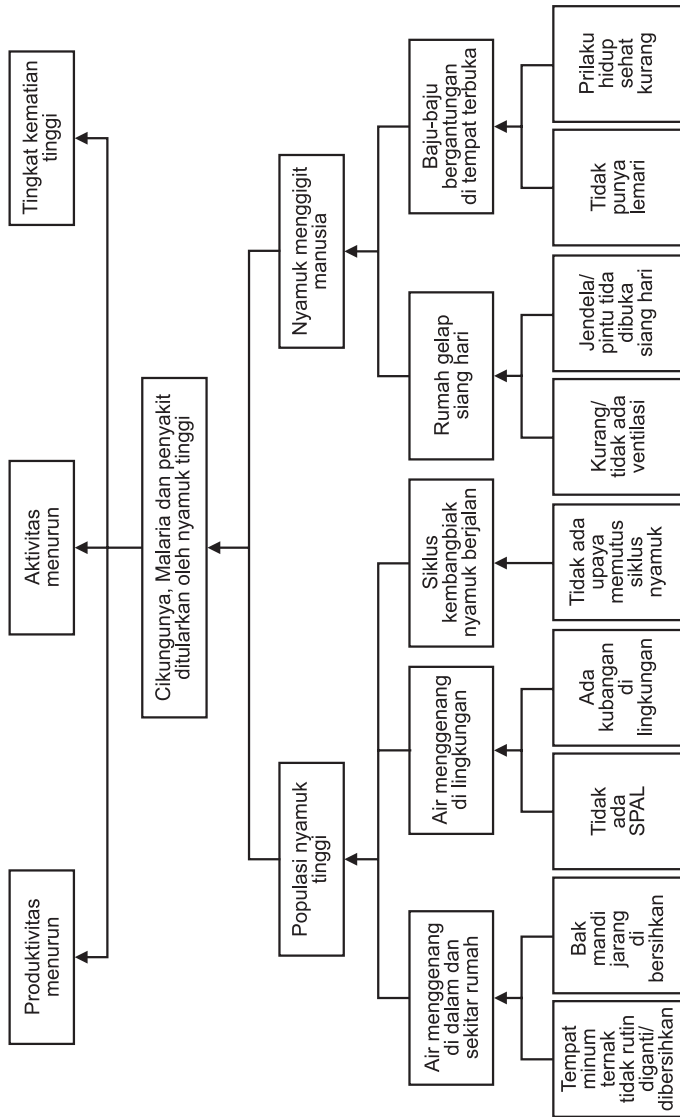
Namun demikian, tak dipungkiri, tak ada gading yang tak retak. Lokakarya lapangan ini pun juga tak luput dari kekurangan. Dalam evaluasinya peserta menyatakan bahwa porsi menggali data yang cukup panjang di lapangan kurang diimbangi dengan waktu pemaparan, berbagi, dan diskusi hasil-hasil temuan di lapangan. Hal yang lain adalah terkait efektivitas waktu. Tak dipungkiri, lokakarya ini tidak terlalu “ketat” dengan waktu. Namun demikian, peserta mengeritik, “Meskipun agenda pelatihan fleksibel, (namun) akan lebih fokus apabila ada agenda waktu yang lebih pasti sehingga jadwal kegiatan bisa lebih efektif”. Terkait hal itu pula, peserta lain menyatakan, “(lokakarya ini) terlalu mengakomodir kepentingan peserta”.

Kritik dan masukan dari peserta ini diterima dengan positif oleh tim G-help. Bagaimanapun, setiap kritik yang membangun itu dapat memberikan perbaikan yang lebih baik.

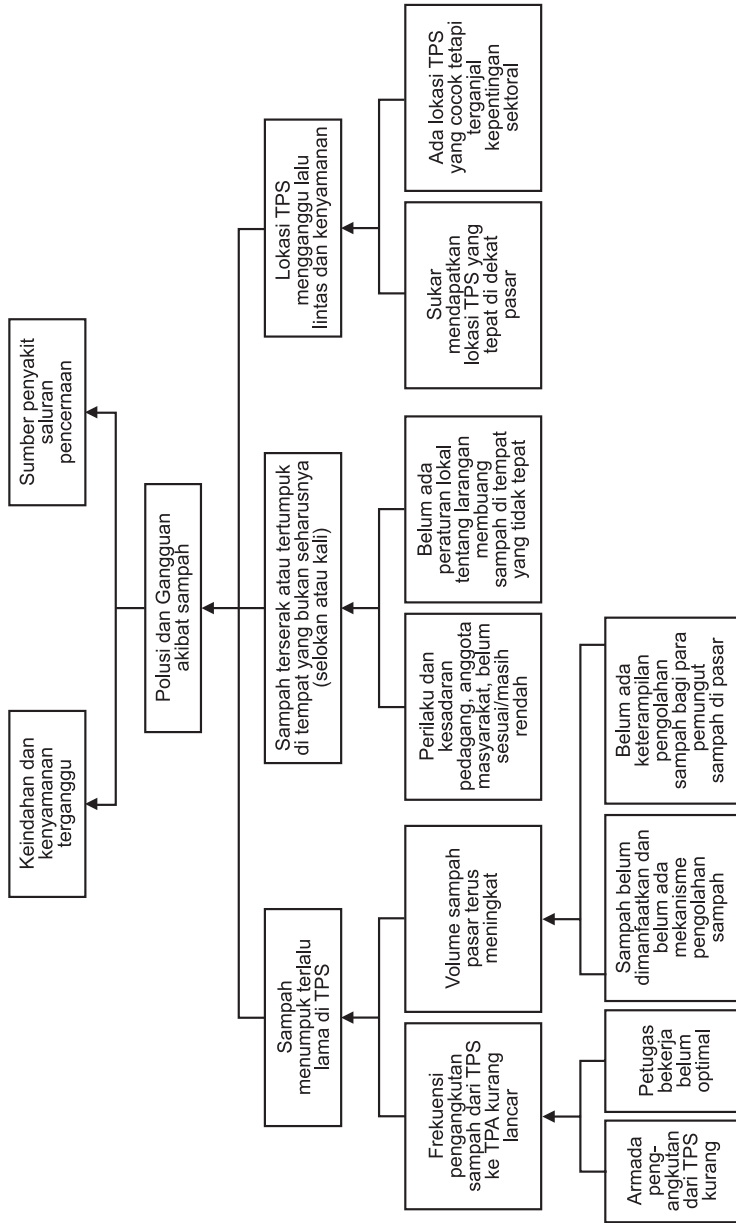


LAMPIRAN-LAMPIRAN

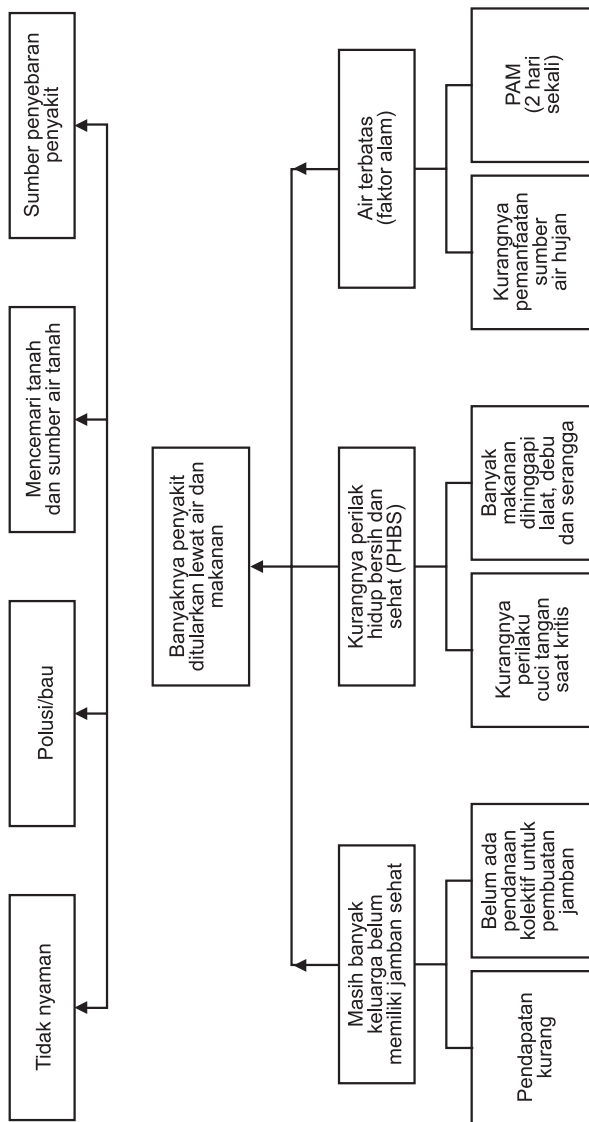
1. Pohon masalah Dusun Kerakas



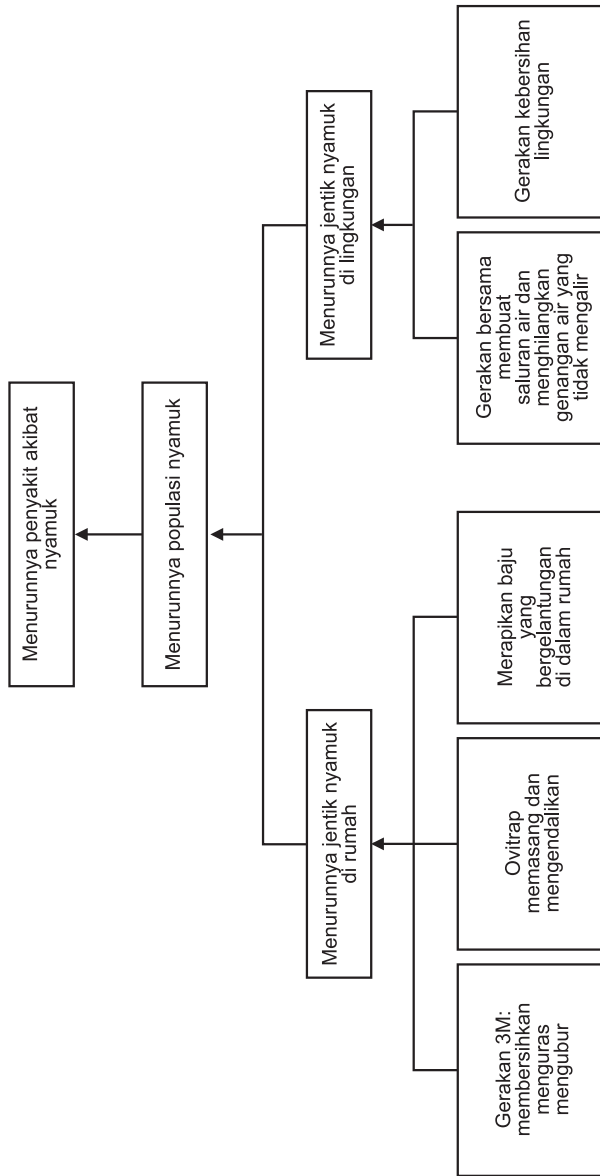
2. Pohon masalah Dusun Sumberejo



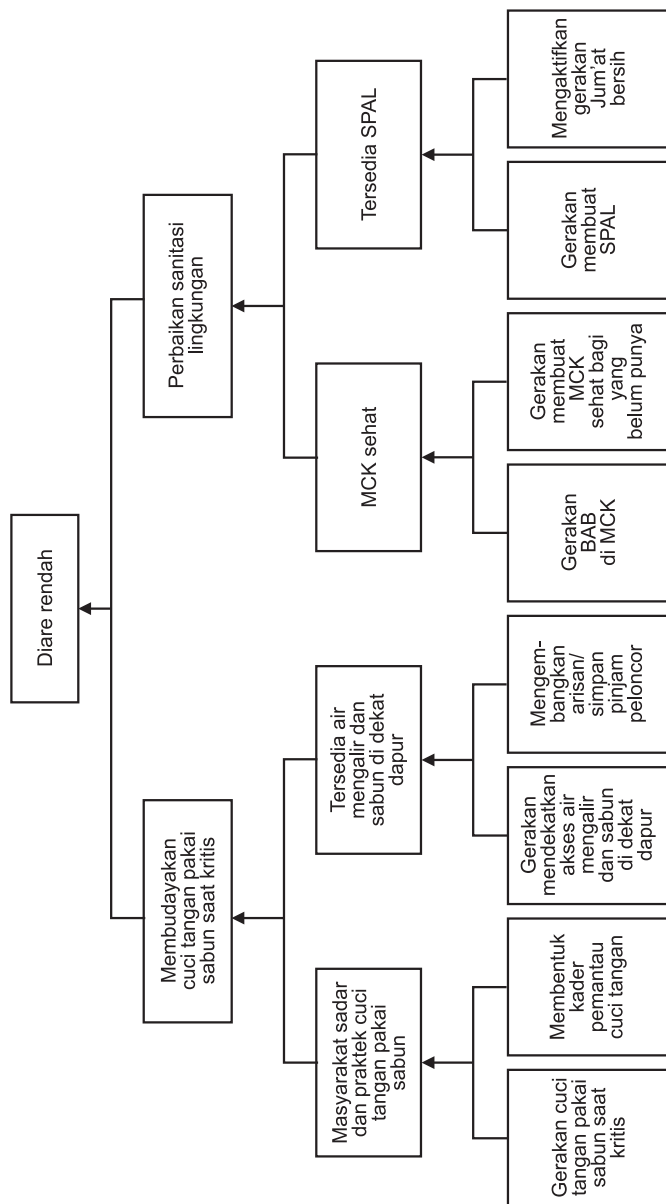
3. Pohon masalah Dusun Ngasemrejo



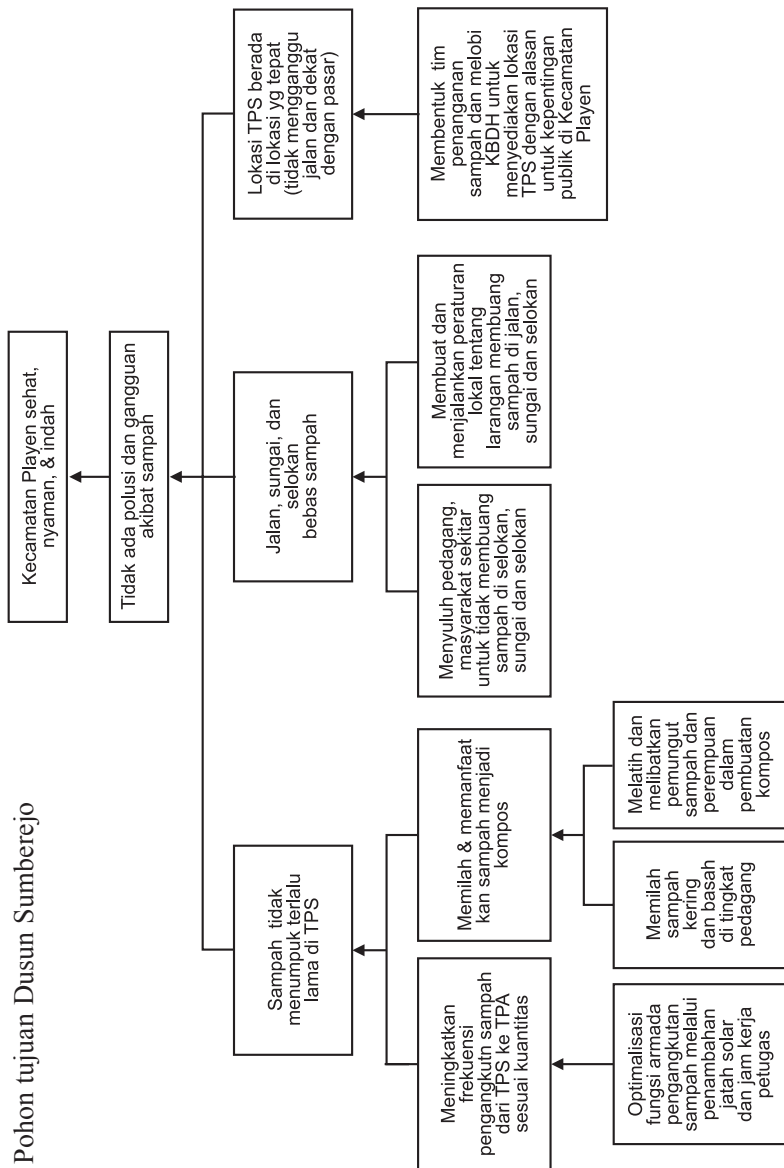
4. Pohon tujuan Dusun Kerakas



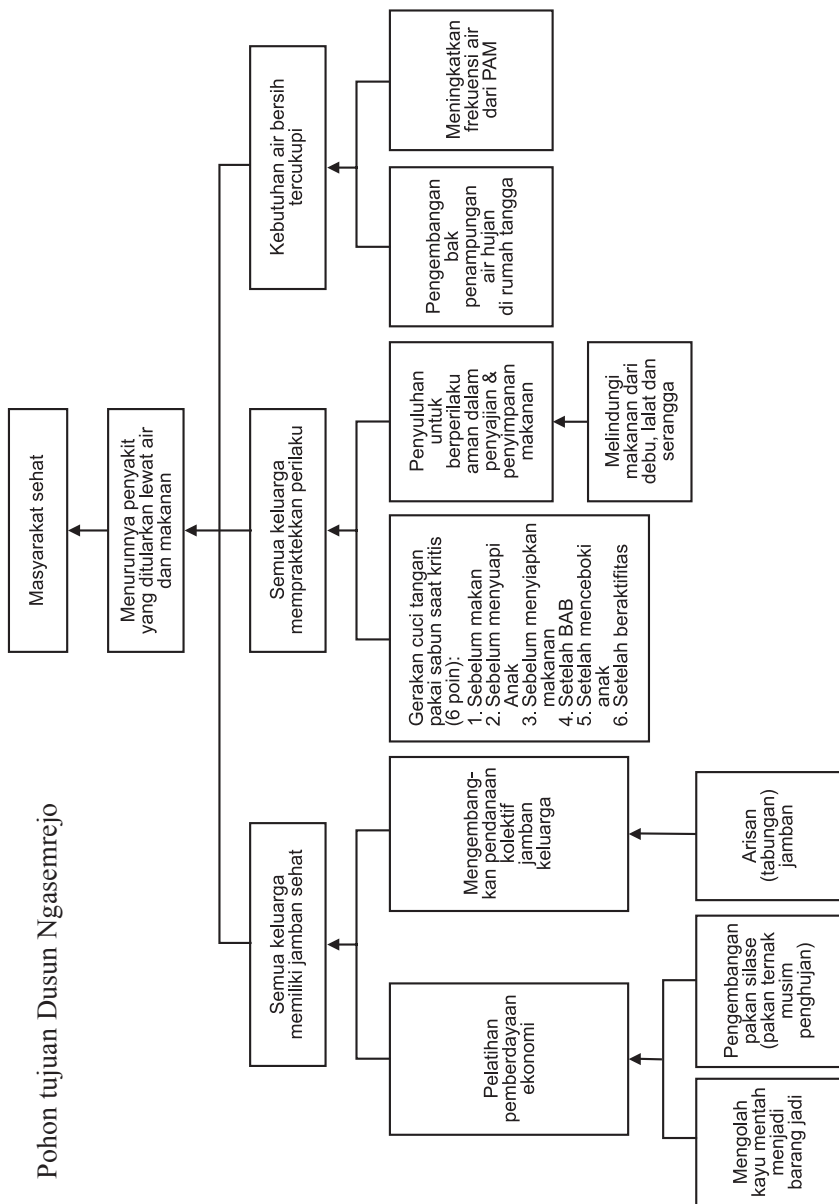
5. Pohon tujuan Dusun Gangga



6. Pohon tujuan Dusun Sumberejo



7. Pohon tujuan Dusun Ngasemrejo



8. Analisis Stakeholders Dusun Kerakas
- ❖ Masyarakat à Berperan dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program
 - ❖ Pustu, Polindes, Kader Kesehatan à Membantu sosialisasi, pelatihan, dan penyadaran terkait program
 - ❖ Pemerintahan desa, Kepala Dusun, BPD, Bamudus à membuat legalitas yang mendukung program

9. Analisis Stakeholders Dusun Sumberejo

No	Pemangku kunci	Minat/kepentingan	Manfaat	Praktek minat
1.	Primer PU armada sampah	Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	TPS bersih	2
	Pemungut sampah/ PU kebersihan	Memilah dan mengangkut sampah	Lokasi sampah bersih	3
	Lurah pasar	Membina pedagang untuk memilah sampah	Sampah dipilah	1
	Pedagang	Memilah dan mengumpulkan sampah di tempat yang tersedia	Sampah dipilah	1
	Dinas kesehatan	Penyuluhan kepada pedagang pasar	Perilaku bersih meningkat	1
	Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan KB	Membina masyarakat dalam pengolahan/pemanfaatan sampah	Sampah termanfaatkan	2
	KBDH (Kantor Bagian Daerah Hutan)	Minat kurang/tidak ada	Menyediakan lokasi TPS	1
2.	Sekunder			
	Warga masyarakat sekitar	Lingkungn bersih dan sehat	Sebagai kelompok penekan	3
	Pengguna jalan	Merasakan kenyamanan	Sebagai kelompok penekan	2
	PKL makanan	Sampah tidak mengganggu	Sebagai kelompok penekan	1
	Sekolah	Pendidikan sadar lingkungan sejak dini	Perubahan perilaku sejak dini	2

10. Analisis Stakeholders Dusun Ngasemrejo

No	Pemangku kunci	Minat/kepentingan	Manfaat	Praktek minat
1.	Primer PUSKESMAS	❖ Bertanggungjawab mensosialisasikan perilaku hidup sehat ❖ Punya program sanitasi lingkungan sehat	Masyarakat mendapatkan informasi tentang perilaku hidup sehat	3
	POSYANDU	❖ Memberikan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat ❖ Melakukan pendataan tentang kondisi kesehatan lingkungan	❖ Posyandu sebagai pelaksana program PHBS ❖ Data tentang status kesehatan masyarakat tersedia	2
	BPMP&KB	❖ Punya program bantuan material untuk pembangunan desa	❖ Ada dana yang bisa diakses masyarakat untuk pembangunan jamban	3
	Masyarakat	❖ Menjalankan perilaku hidup sehat ❖ Mempunyai komitmen tinggi	❖ Dapat mendukung & melaksanakan program PHBS	1
	Pemdes	❖ Mempunyai otoritas untuk membuat kebijakan pembangunan kesehatan lingkungan ❖ Mempunyai kewenangan pengajuan ADD	❖ Adanya kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan lingkungan ❖ Program perilaku hidup sehat dapat dianggarkan dlm ADD	3

No	Pemangku kunci	Minat/kepentingan	Manfaat	Praktek minat
2.	Sekunder PDAM	❖ Mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan air kepada pelanggan ❖ Meningkatkan frekuensi distribusi air kepada pelanggan	❖ Dapat mengatur distribusi air kepada pelanggan sehingga memenuhi kebutuhan	2
	DISPERINDAG	❖ Memfasilitasi pelatihan pengolahan kayu	❖ Dapat menyelenggarakan pengolahan hasil kayu	2
	Dinas Peternakan	❖ Mengembangkan program 'silase' bagi masyarakat	❖ Terselenggaranya program 'silase' di masyarakat	2
	Rifka Annisa/LSM	❖ Mempunyai jaringan kerja terkait dg program kesehatan lingkungan	❖ Adanya keterlibatan LSM dalam program kesehatan lingkungan	2

11. Kerangka Berfikir Logis (*Logical Framework*) Dusun Kerakas

	Intervensi	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Goal:				
Menurunnya penyakit akibat nyamuk	Memberantas sarang perindukan nyamuk	angka penyakit akibat nyamuk menurun		

		Intervensi	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Objective 1					
	Mengurangi populasi nyamuk	Gerakan 3 M dan ovitrap	50% rumah bebas nyamuk	Survei/pengamatan lapangan dan data puskesmas	Dukungan masyarakat dan stakeholder terkait
Output 1.1.					
	Menurunnya jentik nyamuk di rumah	Sosialisasi, pelatihan, dan perubahan perilaku	Angka jentik dalam/ sekitar rumah	Survei/pengamatan lapangan	
Aktivitas 1.1.1.					
	Gerakan 3 M ♣ membersihkan ♣ menguras ♣ menimbun	Sosialisasi dan pelatihan 3M	70% rumah bebas wadah genangan air		Adanya pendamping masyarakat
Aktivitas 1.1.2.					
	Ovitrap (memasang dan mengendalikan)	Sosialisasi, pelatihan, dan penyadaran ovitrap	70% rumah memasang dan mengontrol ovitrap dalam setahun		Adanya kader
Aktivitas 1.1.3.					
	Merapikan baju yg bergelantungan di dlm rumah	Penyadaran rumah sehat	90% rumah rapi dan bebas baju bergelantungan dalam 6 bln		

		Intervensi	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Output 1.2.					
	Menurunnya jentik nyamuk di luar rumah/lingkungan	Gotong royong membersihkan lingkungan setiap Jumat	Angka jentik di luar rumah/lingkungan	Survei genangan air/jentik	Terbentuknya awig-awig tentang sanitasi lingkungan
Aktivitas 1.2.1					
	Gerakan bersama membuat saluran air & menghilangkan genangan-genangan air yang mengalir	Membuat SPAL/saluran air	Adanya saluran air/SPAL di sekitar MCK dan di lingkungan	Pengamatan lapangan/survei	
Aktivitas 1.2.2.					
	Gerakan kebersihan lingkungan	Membersihkan genangan air dan sampah di jalan dan sungai	Lingkungan bebas genangan		
		Lomba kebersihan lingkungan antar dusun	Sampah tidak berserakan di jalan, sekitar lingkungan dan sungai		

12. Kerangka Berfikir Logis (*Logical Framework*) Dusun Gangga

	Program	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Tujuan Umum:				
	Menurunkan diare			
Tujuan Khusus 1:				
	Budaya cuci tangan pakai sabun saat kritis			
Hasil 1.1				
	Adanya kesadaran masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun saat kritis	Pertemuan-pertemuan	Survei RT	Dukungan pemangku kepentingan terkait
Aktivitas 1.1.1.				
	Menggerakkan masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun saat kritis	Penyuluhan, fasilitasi, penggugahan emosi		
Aktivitas 1.1.2.				
	Membentuk kader pemantau cuci tangan	Perekrutan kader pemantau cuci tangan	Survei RT	Adanya pendamping masyarakat
		Peningkatan kapasitas kader pemantau cuci tangan	Laporan kader, LPJ	

	Program	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Hasil 1.2				
Tersedianya air mengalir dan sabun di dekat dapur	Penyuluhan, fasilitasi, penggugahan emosi	60% rumah tangga memiliki akses air mengalir dan sabun di dekat dapur	Survei RT	Adanya pengurus simpan pinjam
Aktivitas 1.2.1				
Menggerakkan masyarakat utk mendekatkan akses air mengalir & sabun di dekat dapur				
Aktivitas 1.2.2.				
Membuat arisan/ simpan pinjam peloncor	Peningkatan kapasitas pengurus simpan pinjam	Adanya 20 kelompok simpan pinjam	Observasi, Laporan simpan pinjam	
Tujuan Khusus 2:				
Sanitasi sehat	Penyuluhan, fasilitasi, penggugahan emosi	< 10% masyarakat BAB di kebun	Survei RT yang membuang hajat di kebun	Adanya skema dan contoh MCK sehat
Hasil 2.1				
Adanya MCK sehat				
Aktivitas 2.1.1.				
Menyadarkan masyarakat untuk BAB di MCK				

	Program	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Aktivitas 2.1.2.				
Membuat MCK sehat bagi yang belum punya	Membuat skema dan contoh MCK sehat	80% rumah memiliki MCK dari jumlah rumah yang belum memiliki MCK	Observasi lapangan untuk mendata MCK	
Aktivitas 2.1.3				
Pengaktifan gerakan Jum'at bersih		75% rumah dan lingkungan terlihat bersih	Observasi/Survei RT	
Hasil 2.2				
Adanya SPAL sehat				
Aktivitas 2.2.1.				
Membuat SPAL	Membuat skema & contoh SPAL sehat	80% rumah memiliki SPAL		Adanya skema dan contoh SPAL sehat
Aktivitas 2.2.2.				
Pengaktifan gerakan Jum'at bersih		75% rumah dan lingkungan terlihat bersih		

13. Kerangka Berfikir Logis (*Logical Framework*) Dusun Sumberejo

	Intervensi	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Tujuan Utama				
Kecamatan Playen Indah, Nyaman, dan Sehat		Kecamatan Playen bebas sampah		Ada institusi/lembaga yang memfasilitasi seluruh kegiatan
Tujuan Khusus				
Bebas polusi dan gangguan sampah		Tidak ada bau sampah di dekat pasar		
Output 1				
Sampah tidak menumpuk di TPS		Sampah di TPS bersih setiap hari	Pengamatan berkala min 1 bln sekali	
Aktivitas 1.1				
Meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA melalui optimalisasi fungsi armada sampah (penambahan jatah solar perhari dan jam kerja petugas)		PU Armada/UPT kebersihan meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah	Frekuensi pengangkutan sampah meningkat minimal 75%	
Aktivitas 1.2				
Memilah & memanfaatkan sampah menjadi kompos dengan cara: a memilah sampah kering dan basah di tingkat pedagang; b melatih dan melibatkan pemungut sampah & perempuan dalam pembuatan kompos		Sampah terpilah mulai dari tingkat pedagang. Ada proses pembuatan kompos. Pemungut sampah bisa membuat kompos Ada 4 kelompok perempuan pengolah kompos.		

	Intervensi	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Output 2.				
Jalan, sungai, dan selokan bebas sampah		Tdk ada sampah di jalan, sungai, & selokan	Pengamatan berkala 1 bln sekali	
Aktivitas 2.1				
Menyuluh pedagang dan masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah di jalan, sungai, dan selokan.		Tidak ada sampah di jalan, sungai dan selokan	Pengamatan berkala 1 bulan sekali	
Aktivitas 2.2				
Membuat dan menjalankan peraturan lokal tentang larangan membuang sampah di jalan, sungai, dan selokan.		Ada Peraturan Lokal tentang pengelolaan sampah yang implementatif	Dokumen Peraturan Lokal	

	Intervensi	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Output 3.				
Lokasi TPS berada di lokasi yang tepat (tidak mengganggu jalan dan dekat dengan pasar)		TPS baru di tempat yang tepat & strategis		
Aktivitas 3.1.				
Membentuk tim penanganan sampah dan melobi KBDH untuk menyediakan lokasi TPS dengan alasan untuk kepentingan publik di kec. Playen		Terbentuknya tim multi sektor penanganan sampah di kec. Playen.		KBDH bersedia mengalokasikan lahannya menjadi lokasi TPS yg baru
		Terbentuknya SK Bupati mengenai tim penanganan sampah.		Ada dukungan dari masyarakat dan PEMDA setempat.
		Ada catatan lobi, rapat		

14. Kerangka Berfikir Logis (*Logical Framework*) Dusun Ngasemrejo

Goal, objective, kegiatan	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Goal: Masyarakat sehat			
Objective: ❖ Penyakit yang ditularkan lewat air dan makanan menurun	Persentase penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan menurun	Survei dan data rutin Puskesmas	Adanya dukungan masyarakat dan narasumber terkait
Output 1 Semua keluarga memiliki jamban sehat Kegiatan: ❖ Pelatihan pengolahan kayu mentah menjadi barang jadi ❖ Pelatihan pembuatan "silase" makanan ternak ❖ Penyelenggaraan arisan/ tabungan jamban	❖ Persentase rumah yang telah memiliki jamban sehat ❖ Persentase peserta pelatihan yang mempraktekkan usaha pengolahan kayu menjadi barang jadi ❖ Persentase peserta pelatihan yang membuat silase pakan ternak ❖ Persentase rumah tangga peserta arisan yang telah dibangun jamban	Survei, pendataan ke RT, observasi	Adanya dukungan masyarakat dan narasumber terkait

Goal, objective, kegiatan	Indikator	Verifikasi	Asumsi
Output 2 Semua keluarga mempraktekkan hidup bersih dan sehat Kegiatan: ❖ Gerakan cuci tangan pakai sabun saat kritis (5) ❖ Penyuluhan untuk berperilaku aman dalam penyajian dan penyimpanan makanan	❖ 70% keluarga telah mempraktekkan hidup bersih dan sehat ❖ 70% keluarga mempraktekkan cuci tangan pakai sabun saat kritis (5M) ❖ 70% keluarga telah menutup makanan dengan tudung saji	Survei	Adanya kader dan/ penyuluh
Output 3 Kebutuhan air bersih tercukupi Kegiatan: ❖ Mengembangkan bak penampungan air di tingkat rumah tangga ❖ Advokasi ke PAM untuk meningkatkan frekuensi air	❖ 70% rumah tangga telah memiliki stok air yang cukup ❖ 70% rumah telah memiliki tandon air hujan ❖ Jumlah frekuensi pertemuan/ advokasi kepada pihak PAM	Survei, data rutin	Adanya dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait

